



UNIVERSITAS INDONESIA



**KAUM NASIONALIS AMBON : PERAN DAN PERJUANGANNYA
MEMBAWA AMBON MENJADI BAGIAN DARI NKRI
1942-1950**

SKRIPSI

**Diajukan untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Humaniora**

**DITA NURDAYATI
NPM 0705047015**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
DESEMBER 2009**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

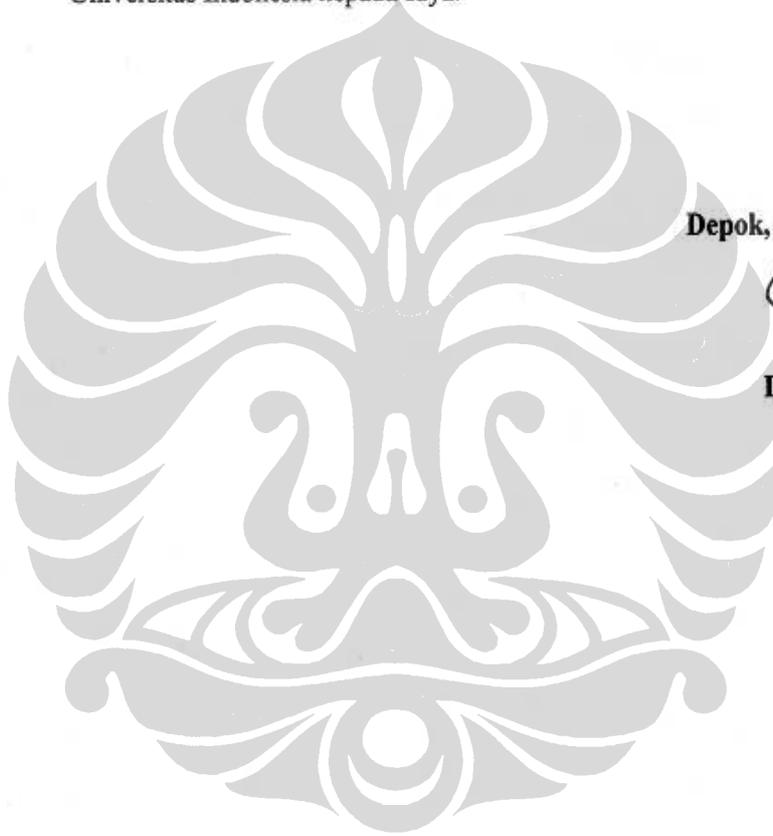
Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 28 Desember 2009



Dita Nurdayati



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dita Nurdayati

NPM : 0705047015

Tanda Tangan :



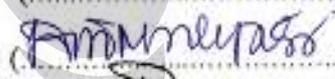
Tanggal : 28 Desember 2009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dita Nurdayati
NPM : 0705047015
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Kaum Nasionalis Ambon :
Peran dan Perjuangannya Membawa Ambon
Menjadi Bagian Dari NKRI 1942-1950

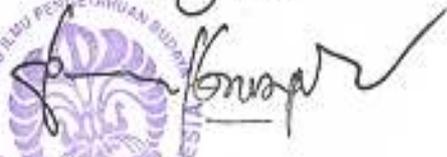
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Abdurakhman, M.Hum (.....)
Pembimbing/Penguji : Dwi Mulyatari, M.A (.....)
Pembaca/Penguji : Dra. M.P.B Manus (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Desember 2009

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
2. Dwi Mulyatari, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. M.P.B Manus, selaku pembaca dan penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini dan memberikan masukan-masukan untuk penulisan skripsi ini.
4. Abdurakhman, M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan terhadap skripsi ini.
5. Dosen-dosen Sejarah, Mas Bondan, Mas Didik, Mas Santo, Mba Ii, Mba Titi, Mba Linda dan semua yang telah memberikan ilmunya selama penulis berada di jurusan tercinta ini.
6. Kepada Kepala Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Disjarah Angkatan Darat, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FIB UI dan LIPI yang membantu penulis menemukan data-data untuk penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta, terutama kepada mama dan papa yang terus menerus mendukung dan memberikan bantuan baik material dan moril serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis. Juga kepada seluruh keluarga tercinta, tante dan om (Tante Adios, Tante Anti, Tante Rosi, Om Rusdi, Om Rusli) yang terus memberikan dukungan berupa *support* dan masukan-masukan terhadap penulis dan terus mendoakan agar penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya (mungkin kalau kalian tidak ada Dita bisa *stress* menghadapi ini semua). Kepada adik-adik ku tercinta (Della, Dendi, Eky, Raffi) yang terus memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini (terima kasih karena kalian selalu membuatku tersenyum dan bersemangat dalam menyelesaikan ini semua). Serta kakek dan nenek yang terus mendoakan penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa ku ucapkan terima kasih kepada keluarga ku yang berada di Ambon yang turut membantu mencarikan data-data untuk penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 yang saling mendukung dan menyemangati, Adi, Bajis, Popon, Hary, Insan, Hari, Bayu, Didi, Dwi, Daru, Dinda, Devi, Lady, Hikmah, Ayu, Safa, Isye, Fathia, Susi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu (walaupun kita dah jarang ketemu tapi celotehan-celotehan kalian melalui *Facebook* sedikit mengurangi ketegangan dan kepanikan menghadapi skripsi ini). Kalian bukan hanya sekedar teman tetapi sudah seperti keluarga kedua bagi ku (*I love you all*). Sejarah Angkatan 2005, *LUARRRRR BIASAAAAA!!!!* Terlebih kepada sahabat-sahabat ku para wanita tangguh (Friska Indah Kartika, Ressa Rizki Andriani, Nia Paramitha Tendean, Sri Pujianti) terima kasih karena kalian bersedia terus berada di samping ku dan mendengarkan segala keluh kesah ku selama penulisan skripsi ini. Senior 2003, Bobby, Syefri, Yanuar, Inana, Lida, dll yang terus menyemangati untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 28 Desember 2009

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Nurdayati
NPM : 0705047015
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**KAUM NASIONALIS AMBON : PERAN DAN PERJUANGANNYA
MEMBAWA AMBON MENJADI BAGIAN DARI NKRI
1942 - 1950**

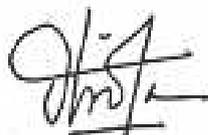
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 28 Desember 2009

Yang menyatakan



(Dita Nurdayati)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sumber Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 AMBON MASA PENDUDUKAN JEPANG.....	15
2.1 Geografi dan Demografi	15
2.2 Kedatangan Tentara Jepang ke Ambon.....	17
2.3 Kehidupan Rakyat Ambon Masa Pendudukan Jepang	21
2.4 Peran dan Perjuangan Kaum Nasionalis Ambon	27
BAB 3 AMBON PASCA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA TERBENTUKNYA NIT.....	34
3.1 Proklamasi Kemerdekaan dan Kedatangan Tentara Sekutu dan Belanda.....	34
3.2 Perjuangan Kaum Nasionalis Ambon Mempertahankan Kemerdekaan.....	37
3.3 Pembentukan Negara Indonesia Timur	41
3.4 Peran Kaum Nasionalis Ambon di NIT	48
BAB 4 MASUKNYA AMBON MENJADI BAGIAN NKRI	53
4.1 Dari <i>Hoge Veluw</i> sampai Konferensi Meja Bundar	53
4.2 Terbentuknya Republik Indonesia Serikat	58
4.3 Reaksi Terhadap Terbentuknya RIS di Ambon	62
BAB 5 KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Maluku Selatan	84
Lampiran 2 Peta Ambon	85
Lampiran 3 Peta Pendaratan Tentara Jepang di Pulau Ambon	86
Lampiran 4 Peta Jalannya Operasi Penumpasan Republik Maluku Selatan.....	87
Lampiran 5 Tokoh Nasionalis Ambon.....	88
Lampiran 6 Tokoh Republik Maluku Selatan.....	92
Lampiran 7 Anggota Partai Indonesia Merdeka Ambon	93
Lampiran 8 Anggota Dewan Maluku Selatan.....	94
Lampiran 9 Peresmian Anggota Kabinet Negara Indonesia Timur.....	95
Lampiran 10 Konferensi Meja Bundar	96
Lampiran 11 Upacara Bendera Republik Maluku Selatan.....	97
Lampiran 12 Kedatangan Pasukan APRIS ke Ambon.....	98
Lampiran 13 Tentara KNIL Ambon	99
Lampiran 14 Nama-nama Anggota Dewan Maluku Selatan	100
Lampiran 15 Susunan Kabinet Republik Maluku Selatan	102
Lampiran 16 Surat Pernyataan Berdirinya Partai Indonesia Merdeka Ambon.....	103

DAFTAR ISTILAH

- Adviesraad* : Dewan Penasehat Residen
- Ambon Hookokai* : Pusat kebaktian rakyat Ambon
- Boldan* : Suatu wilayah kekuasaan politik yang luas yang dikuasai oleh seorang *kolano* dan merupakan bentuk awal dari kerajaan di Maluku
- Commonwealth* : Persemakmuran
- Djawa Hookokai* : Pusat kebaktian rakyat Jawa
- Dumping* : Sistem penjualan yang tidak menggunakan kuota dan biasanya untuk menghabiskan barang kesuatu negara.
- Gemeenebest Molukken* : Persemakmuran Maluku
- Heiho* : Prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut
- Janju/Jugun Ianfu* : Sebutan untuk wanita penghibur pada masa pendudukan Jepang
- Keibodan* : Barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian, seperti : penjagaan lalulintas, pengamanan desa dan lain-lain
- Kempetai* : Polisi rahasia milik Jepang
- Kokang* : Sistem tukar menukar barang di Ambon
- Kolano* : Penguasa boldan yang daerah kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas pada suatu desa atau kelompok desa
- Korte Verband* : Tentara tiga tahun yang dilatih dan di didik untuk menjadi militer selama tiga tahun dan selanjutnya mereka dapat menempuh ujian masuk tentara KNIL Aatau tentara kontrak
- Kumiai* : Sebutan untuk koperasi pada masa pendudukan Jepang

<i>Landwacht</i>	: Penjaga darat yang terdiri dari pensiunan KNIL
<i>Minseibu</i>	: Kepala daerah
<i>Ona-ona</i>	: Sebutan untuk perempuan di daerah Ambon
<i>Onderwijzer</i>	: Guru sekolah dasar
<i>Regentenbond</i>	: Gabungan wakil raja atau bupati
<i>Romusha</i>	: Tenaga kerja paksa pada masa pendudukan Jepang yang tidak diberikan upah
<i>Seinendan</i>	: Merupakan barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang yang beranggotakan pemuda-pemuda
<i>Sensei</i>	: Sebutan untuk guru dalam bahasa Jepang
<i>Stadswacht</i>	: Penjaga pertahanan kota yang terdiri dari pasukan KNIL dan pegawai rendahan.
<i>Uli</i>	: Suatu kelompok desa di Maluku
<i>Vernielings Corps</i>	: Pasukan bumi hangus
<i>Pela</i>	: Sistem persaudaraan di daerah Maluku Tengah

DAFTAR SINGKATAN

<i>AMS</i>	: <i>Algemeene Middelbare School</i>
<i>APRIS</i>	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
<i>APWI</i>	: <i>Allied Prisoners of War and Internees</i>
<i>BFO</i>	: <i>Bijeenkomst voor Federaal Overleg</i>
<i>BIGM</i>	: <i>Bond van Inheemse Gepensioneende Militairen</i>
<i>BPI</i>	: Badan Pembela Indonesia
<i>BT</i>	: Barisan Terpendam
<i>DMS</i>	: Dewan Maluku Selatan
<i>FPPRMS</i>	: Front Penentang Proklamasi Republik Maluku Selatan
<i>GPM</i>	: Gereja Protestan Maluku
<i>GSS</i>	: Gabungan Sembilan Serangkai
<i>HIS</i>	: <i>Hollands Inlandse School</i>
<i>KMB</i>	: Konferensi Meja Bundar
<i>KNIL</i>	: <i>Koninklijk Nederlandsche Indische Leger</i>
<i>KO.TT.IT</i>	: Komando Teritorium Indonesia Timur
<i>MULO</i>	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
<i>NICA</i>	: <i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
<i>NIT</i>	: Negara Indonesia Timur
<i>NKKK</i>	: <i>Nanyo Kohatsu Kubushi Kaisha</i>
<i>NKRI</i>	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
<i>PIM</i>	: Partai Indonesia Merdeka
<i>PMF</i>	: Pertemuan Musyawarah Federal
<i>PRIMA</i>	: Pemuda Republik Indonesia Maluku
<i>PTB</i>	: Partai Timur Besar
<i>RIS</i>	: Republik Indonesia Serikat
<i>RMS</i>	: Republik Maluku Selatan
<i>TKR</i>	: Tentara Keamanan Rakyat
<i>VOC</i>	: <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>

ABSTRAK

Nama : Dita Nurdayati
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Kaum Nasionalis Ambon : Peran dan Perjuangannya
Membawa Ambon Menjadi Bagian Dari NKRI 1942-1950

Skripsi ini membahas mengenai peran dan perjuangan dari kaum nasionalis Ambon membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia. Perjuangan mereka dimulai dari masa pendudukan Jepang hingga Ambon menjadi bagian dari NKRI. Peran dan perjuangan yang dilakukan oleh kaum nasionalis Ambon adalah melalui diplomasi dan juga parlementer. Mereka juga memilih memanfaatkan Jepang dan Belanda untuk mencapai tujuan mereka. Tidak semua orang Ambon pro terhadap Belanda. Di Ambon juga terdapat golongan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan wilayah Ambon ke dalam bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Kata kunci :
Perjuangan, peran, kaum nasionalis, Ambon

ABSTRACT

Name : Dita Nurdayati
Major : History of Science
Title : The Nationalist of Ambon : The Role And Their Struggle to
Bring Ambon Become Part of Indonesia 1942-1950

The focus of this thesis is on the role and struggle of the Ambonese nationalist group which was successful in bringing Ambon to be a part of the republic of Indonesia. Their role and struggle started since the Japanese occupation in Ambon until the Republic of Indonesia became a Unitary State. The Ambonese natioanalist choose the diplomatic and parliamentary ways to reach their goal. They even prefer to make use of the Japanese and the Dutch to realize their idealist. Not all Ambonese people at that time were for the Dutch, freedom fighters. The Ambonese during the Japanese and the Dutch period struggle for the Indonesian independence and also to make Ambon a part of the Republic of Indonesia.

Key words :
The struggle, role, group of nationalist, Ambon

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maluku merupakan salah satu propinsi yang berada di wilayah Indonesia Timur. Maluku terletak di 3°LU-8°20'LS dan 124°BT-135°BB.¹ Pada abad ke-19, istilah Maluku mulai digunakan. Sebelumnya, istilah Maluku hanya ditujukan untuk Maluku Utara. Pada 1817, muncul kebiasaan untuk menggunakan istilah Maluku untuk Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Ambon merupakan kawasan yang berada di wilayah Maluku Tengah yang memiliki luas wilayah 761 km² yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Jazirah Leihitu dan Jazirah Leitimor.² Ambon merupakan salah satu pulau-pulau utama di Maluku Tengah selain kepulauan Uliase yang terdiri dari Haruku, Saparua, dan Nusalaut.³ Penduduk di Maluku Tengah dinamakan orang Ambon. Pada mulanya istilah orang Ambon hanya ditujukan untuk kota Ambon, kemudian pada abad ke-20, istilah orang Ambon ditujukan untuk masyarakat yang berada di Maluku Tengah.⁴ Banyak hal yang menarik di wilayah Ambon, seperti sistem *pela* yang hanya terdapat di daerah tersebut, yang merupakan pemersatu perbedaan budaya antar desa dan juga antar umat beragama, dalam hal ini Kristen dan Islam.⁵ Selain itu, Ambon merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang menjadi komoditi utama pada masa kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan Ambon merupakan wilayah yang paling lama mengalami dampak akibat hubungan dengan bangsa

¹ Tim Penulis Monografi Daerah Maluku, *Monografi Daerah Maluku* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.th), hal. 22.

² Jazirah Leihitu merupakan kawasan yang berada di sebelah utara Ambon, yang wilayahnya meliputi Hitu Lama, Laha, Tulehu, Hila, dan sebagainya yang merupakan awal penyebaran agama Islam. Jazirah Leitimor adalah kawasan yang berada di sebelah timur Ambon, yang wilayahnya meliputi Latuhalat, Kapa, Hutumuri, dan sebagainya. Lihat : R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia* (Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UI, 1975), hal. 4-5.

³ R.Z. Leirissa, *Sejarah Kebudayaan Maluku* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hal. 67.

⁴ *Ibid.*, hal. 66.

⁵ *Pela* berasal dari bahasa lokal di Maluku Tengah yang berarti persekutuan, konfederensi, liga, atau persaudaraan. Lihat *Ibid.*, hal 94-95.

Belanda.⁶ Ini juga yang mengakibatkan kehidupan mereka pada saat itu bercampur dengan kehidupan bangsa Belanda. Meskipun telah lama dikuasai oleh Belanda, namun tidak semua rakyat Ambon berpihak pada pemerintah Belanda. Ada kelompok yang memihak terhadap Indonesia, mereka merupakan kaum nasionalis Ambon. Semua hal yang berkaitan dengan Belanda dihapus dan dilarang ketika Jepang datang ke wilayah Ambon. Tidak sedikit rakyat Ambon yang bekerjasama dengan pemerintah Belanda ditangkap oleh tentara Jepang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menginginkan Belanda kembali ke wilayah Ambon pada masa pendudukan Jepang. Mereka merupakan orang-orang Kristen Ambon yang setia terhadap Belanda. Berbeda halnya dengan kaum nasionalis yang lebih memilih untuk bersikap hati-hati terhadap kedatangan tentara Jepang.

Penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jendral H. Ter Poorten kepada Letnan Jendral Hitoshi Imamura pada 9 Maret 1942, menandakan berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegaskan kekuasaan Jepang.⁷ Setelah pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka dimulailah babak baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu masa pendudukan Jepang.

Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, wilayah Ambon berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang ke-2 yang meliputi Kalimantan dan Timur Besar.⁸ Suatu pemerintahan dibentuk dengan nama *Minseifu* di wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Kantor bawahannya disebut dengan *Minseibu* yang berada di tiga tempat, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram.⁹

Ditandai dengan pengeboman yang dilakukan oleh tentara Jepang pada 6 Januari 1942 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di wilayah

⁶ Des Alwi, *Sejarah Maluku : Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon* (Jakarta : Dian Rakyat, 2005), hal. 578.

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 5.

⁸ Mc. Rikklef, *Sejarah Indonesia Moderen* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 406.

⁹ Bagian-bagian tersebut diantaranya Kalimantan dengan beribukota di Banjarmasin, Sulawesi dengan ibukotanya di Makassar, Nusa Tenggara dengan beribukota di Bali, dan Maluku dengan ibukotanya Ambon. Pembagian ini merupakan tindak lanjut dari *Groote Oost* bentukan Belanda. Lihat : A.B Lapian, *Di Bawah Pendudukan Jepang : Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya* (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988), hal. 5.

Ambon, tentara Jepang mulai memasuki wilayah ini.¹⁰ Tentu saja pemerintah Belanda yang berada di Ambon tidak berdiam diri. Sebelumnya, untuk mencegah kedatangan tentara Jepang ke wilayah Ambon pemerintah Belanda membentuk pertahanan sipil, yaitu *Stadswacht*, *Vernielingscorps*, dan *Landwacht*.¹¹ Penyerangan tentara Jepang ke wilayah Ambon memang mendapat perlawanan dari tentara Belanda yang pada saat itu dibantu oleh tentara Australia. Pada saat itu Ambon dipertahankan oleh 2.400 tentara KNIL dan dibantu oleh satu batalion (1.000 orang) tentara Australia. Tidak ada bantuan bagi Belanda dari negara lain, karena kurangnya koordinasi antara kekuatan-kekuatan Sekutu dan sementara pada saat itu Jepang juga mendaratkan pasukannya di Ambon.¹² Di Ambon, tentara Australia bertugas mempertahankan lapangan terbang Laha (Pattimura) dan Pulau Ambon seluruhnya serta menahan serangan Jepang agar tidak sampai ke Australia.

Tepat pada 31 Januari 1942, Ambon secara penuh berhasil dikuasai oleh tentara Jepang. Mulai saat itu, kehidupan masyarakat Ambon mengalami perubahan. Pada awal kedatangannya, Jepang melakukan propaganda-propagandanya, mereka mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua orang Indonesia. Setelah Ambon berhasil dikuasai, maka Jepang pun mulai merubah struktur masyarakat kolonial yang telah dibangun oleh Belanda pada masa sebelumnya. Pejabat-pejabat kulit putih yang berada di pemerintahan digantikan dengan orang-orang Indonesia, yang dalam hal ini orang-orang Ambon.¹³ Dalam hal ini tugas utama Jepang itu sendiri adalah memulihkan ketertiban dan keamanan, serta menempati wilayah-wilayah yang telah ditinggalkan oleh bangsa Belanda.¹⁴ Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Ambon terbagi menjadi beberapa golongan, terdapat golongan orang-orang Islam Ambon, golongan Kristen Ambon, golongan mata-mata, dan golongan pergerakan yang beranggotakan rakyat Islam dan Kristen Ambon yang memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Pada masa pendudukan Jepang ini golongan

¹⁰ Des Alwi, *op.cit.*, hal. 594.

¹¹ R.Z Leirissa, *et al.*, *Sejarah Sosial di Daerah Maluku* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 103.

¹² Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta : PT Gramedia, 1989), hal. 234.

¹³ R.Z Leirissa, *et al.*, *Sejarah Sosil di Daerah...*, *op.cit.*, hal. 95.

¹⁴ Abdul Irsan, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia* (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, 2007), hal. 214.

nasionalis Ambon dipercaya oleh Jepang untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda, salah satunya adalah Eliza Urbanus Pupella.¹⁵ Dalam hal ini, Pupella mengepalai bidang pemerintahan. Selain Pupella, terdapat pula tokoh Ambon lainnya seperti Yan Taule, Manuhuttu, Ot Pattimaipau, Hamid bin Hamid, Tjokro, dr. Tahitu dan lainnya yang juga memperoleh kepercayaan dari Jepang. Jepang pun berusaha untuk “men-Jepangkan” segala hal, sehingga rakyat Ambon mengalami perubahan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Situasi di Ambon pada masa pendudukan Jepang ternyata tidak jauh berbeda dengan situasi pada masa kekuasaan Belanda. Peran kaum nasionalis Ambon sedikit dikurangi, karena Jepang melarang pendirian organisasi dan hanya organisasi buatan Jepang yang diizinkan. Namun, melalui organisasi buatan Jepang tersebutlah kaum nasionalis Ambon dapat memanfaatkannya, seperti pembentukan *Ambon Hookokai*. Pupella dipercaya Jepang sebagai pemimpinnya. Melalui *Ambon Hookokai* ini kaum nasionalis Ambon dapat mengetahui perkembangan di luar Ambon. Pada masa pendudukan Jepang, kaum nasionalis Ambon berjuang tidak dengan senjata. Para tokoh golongan nasionalis Ambon memilih jalan bekerjasama dengan Jepang dan memanfaatkan badan-badan organisasi buatan Jepang. Melalui badan-badan tersebut, para tokoh nasionalis Ambon berusaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Menjelang akhir pendudukan Jepang, kondisi perekonomian rakyat pun memburuk, situasi ini tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Belanda. Di Jepang sendiri, terjadi pergantian kabinet, dimana Kabinet Tojo digantikan oleh Jendral Kuniaki Koiso. Jepang pun semakin terjepit karena tentara Sekutu mulai menyerang Jepang di Pasifik. Satu persatu daerah yang merupakan kekuasaan Jepang diserang oleh Sekutu, bahkan kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Sekutu.

¹⁵ Eliza Urbanus Pupella merupakan seorang tokoh pergerakan nasional Ambon yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pupella berjuang mengembalikan ketentraman dan memulihkan permusuhan dan balas dendam antar golongan di Ambon, walaupun Pupella harus bekerjasama dengan Jepang. Hal ini dilakukan agar masyarakat Ambon tidak terpecah belah dan terbebas dari penjajahan. Lihat : Tim Penulis Departemen P dan K, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978), hal. 151-155.

Mendengar berita kekalahan Jepang, maka pada 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun berita proklamasi terlambat diterima oleh masyarakat Ambon, namun, di Jakarta pada 19 Agustus 1945, telah berhasil dibentuk kementerian-kementerian dan delapan propinsi. Maluku merupakan salah satu dari delapan propinsi dengan Mr. Johannes Latuharhary sebagai Gubernur Maluku.¹⁶ Mr. Johannes Latuharhary, sebelumnya termasuk ke dalam salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Tidak lama setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Ambon kembali dikuasai oleh Sekutu. Kedatangan Tentara Sekutu ke wilayah Ambon pada Agustus 1945, yang terdiri dari tentara Inggris dan Australia bertugas melucuti senjata tentara Jepang, mereka juga membebaskan tentara-tentara Belanda yang ditangkap pada masa pendudukan Jepang. Pada saat itu Belanda yang berkedudukan di Brisbane, Australia membentuk *Nederlands Indies Civil Administration* (NICA). Setelah tentara Australia meninggalkan Ambon pada pertengahan 1946, maka pemerintah Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah Indonesia Timur dan mengambil alih kekuasaan di Ambon. Letnan Gubernur Jendral Dr. H.J van Mook yang pada saat itu berada di Brisbane, Australia memang masih menginginkan pemerintah Hindia Belanda akan dapat kembali berkuasa di Indonesia.¹⁷ Di wilayah Ambon, Residen Van Wych bertugas sebagai pimpinan.¹⁸ Hal ini mengakibatkan Mr. Latuharhary yang telah terpilih sebagai Gubernur Maluku tidak dapat berangkat ke Maluku dan menjalankan pemerintahan di Maluku, karena Ambon kembali dikuasai oleh Belanda. Kaum nasionalis Ambon berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Ambon. Langkah yang mereka tempuh adalah dengan membentuk Badan Pembela Indonesia (BPI) yang dipimpin oleh M.Q Maruapey dan Pemuda Republik Indonesia Maluku (PRIMA) yang dipimpin oleh Abdul Kadir Tuakia.¹⁹

¹⁶ G.A Ohorella, *et al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993), hal. 2.

¹⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta : Gajah Mada Press, 1985), hal. 1.

¹⁸ John Pattikayhatu, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Maluku* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1979), hal. 31.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-34

Tidak hanya mereka yang berada di Ambon, tetapi kaum nasionalis Ambon yang berada di wilayah Jawa juga berusaha merebut Ambon dan Maluku pada umumnya dari kekuasaan Belanda. Langkah mereka ini dikenal dengan ekspedisi Merah Putih ke Maluku, dan diantara mereka itu terdapat Bram Matulesy, Andries Latupeirissa, Anna Luhukay, Ateng Abbas, Jusuf dan Isbiyanto.²⁰

Untuk menghindari pertumpahan darah, pihak Indonesia pada akhirnya mengambil langkah diplomasi untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pada bulan Oktober 1946, pihak Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian mengenai wilayah kekuasaan kedua negara, yang dikenal dengan Perjanjian Linggajati. Pada saat Perjanjian Linggajati sedang berlangsung, di wilayah Indonesia Timur, pihak Belanda telah melaksanakan Konferensi Malino, di Sulawesi Selatan pada 16-25 Juli 1946. Konferensi ini dihadiri oleh pihak Belanda, perwakilan pers, dan tokoh-tokoh daerah dari wilayah Indonesia Timur.²¹ Tokoh-tokoh Ambon pada Konferensi Malino menerima rencana Belanda, yaitu memasukkan Ambon ke dalam suatu negara federal Indonesia. Selain itu, dalam Konferensi Malino diputuskan juga beberapa hal, di antaranya mengenai bendera dan lagu kebangsaan, dalam bidang politik dan ketatanegaraan diputuskan untuk membangun kembali ketatanegaraan di wilayah Hindia Belanda yang meliputi seluruh Hindia Belanda dahulu, serta akan dilaksanakan konferensi kedua. Di Ambon, kelompok nasionalis membentuk partai untuk memperjuangkan kepentingan politik di Ambon yang dinamakan Partai Indonesia Merdeka (PIM), yang dipimpin oleh E.U. Pupella.²² Partai Indonesia Merdeka ini beranggotakan Ot. Pattimaipau, Wim Reawaru, Hamid bin Hamid, Tjokro A.S, S. Bahmid, M.K Soulissa, dan sebagainya. Adapun Tujuan dari PIM adalah

²⁰ Ekspedisi Merah Putih ke Maluku merupakan pengiriman putra-putri Maluku ke daerah asal mereka yang merupakan bagian dari suatu rangkaian usaha untuk mendirikan pusat-pusat pemerintahan Republik di daerah-daerah yang belum dapat dihubungi dari Ibukota. Lihat : R.Z Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia* (Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra, UI, 1975), hal. 116-124.

²¹ Pihak Belanda diwakili oleh Dr. H.J van Mook dan beberapa wakil dari Departemen Urusan Ekonomi, Departemen Pendidikan Departemen Pekerjaan Umum dan perwakilan pers dari Indonesia, Belanda, Inggris, dan Australia. Wilayah Maluku sendiri terbagi menjadi dua, Maluku Utara diwakili oleh Dr. Chassan Boesoiri, Sultan Iskandar dari Ternate, dan Salim Adjidjudi. Wilayah Maluku Selatan diwakili oleh Dr. D.P Tahitu, R.J Matekohy, J.M Tupenalay, dan Kapten Tahija sebagai penasehat. Lihat : Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal. 99-102.

²² Ricard Chauvel, "Ambon : Bukan Revolusi Melainkan Kontrarevolusi," *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, ed. Audrey R. Kahin (Jakarta : Grafiti Press, 1990), hal. 251.

merealisasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui cara-cara yang sah dengan menggunakan institusi-institusi politik yang dibangun Belanda, karena Ambon pada saat itu berada di dalam kekuasaan Belanda sehingga mereka harus bersikap hati-hati.

Sebelum dilaksanakan konferensi kedua, tiap-tiap daerah di Indonesia Timur membentuk dewan perwakilan. Di Ambon, pemerintah Belanda membentuk lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Maluku Selatan. Kaum nasionalis Ambon berusaha untuk masuk ke dalam lembaga legislatif tersebut. Melalui pemilihan yang diselenggarakan oleh Belanda, PIM memperoleh suara terbanyak. Hal ini dikarenakan tokoh-tokoh nasionalis PIM pada masa pendudukan Jepang telah banyak berperan. Adapun anggota DMS, diantaranya Dr. Tahitoe, Pupella, W. Reawaru, Tjokro, dan lain-lain.²³

Selanjutnya dilaksanakan Konferensi Denpasar yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 7-24 Desember 1946. Konferensi ini pun dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang hadir dalam Konferensi Malino. Utusan dari Maluku Selatan berasal dari anggota DMS, di antaranya E.U Pupella, dr. Tahitu, dan Kapt. Tahya. Mereka pun menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), dan melalui NIT ini mereka meneruskan perjuangan mereka mengembalikan kemerdekaan Indonesia di Ambon. Melalui Konferensi Denpasar terpilihlah Tjokorde Gde Rake Soekawati sebagai Kepala Negara NIT.²⁴ Secara tidak langsung, van Mook telah berhasil menguasai wilayah Indonesia Timur. Di Indonesia Timur yang berkuasa secara *de facto* dan *de jure* adalah pemerintah Belanda, termasuk di dalamnya wilayah Ambon.²⁵

Pemerintah Belanda menyambut dengan gembira pembentukan NIT tersebut. Dalam hal ini, van Mook mengharapkan agar NIT dapat berkembang menjadi suatu negara yang kuat dan mempunyai identitas sendiri sehingga dapat menjadi negara bagian yang berharga di lingkungan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Berbeda halnya dengan pemerintah Belanda, Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya tidak menerima hasil dari Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar, dikarenakan seharusnya

²³ *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, (Rabu, 20 November 1946), hal.1

²⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal. 171.

²⁵ *Ibid.*, hal 179.

pembentukan negara-negara bagian dilakukan bersama-sama dengan pihak Republik Indonesia. Pihak Republik harus menerima bahwa wilayah yang diakui secara *de facto* hanyalah Jawa dan Sumatra, sedangkan pemerintah Belanda berhak untuk wilayah Indonesia Timur. Pembentukan NIT merupakan kemunduran bagi kelompok pro Republik di wilayah Indonesia Timur, namun hal ini mereka terima dengan melanjutkan perjuangan mereka di dalam parlemen NIT. Di wilayah Ambon sendiri dengan diresmikannya NIT, terjadi pro dan kontra antara DMS yang beranggotakan sebagian besar kaum nasionalis, diantaranya Dr. D.P Tahitoe, E.U Pupella, Tjokro, Wim Reawaru dengan Gabungan Sembilan Serangkai (GSS) yang merupakan lawan dari kaum nasionalis yang beranggotakan pastor-pastor, raja-raja, guru, dan persatuan Kristen, di antaranya Niegelyn Nikijuluw, L. Tupanela, dan Dolf Metekohy sebagai ketua GSS.²⁶

Setelah dilaksanakan Perjanjian Linggajati pada 7 Oktober 1946–25 Maret 1947, hubungan antara Indonesia dan Belanda tidak bertambah baik. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militernya yang pertama. Untuk menyelesaikannya maka dilaksanakan Perundingan Renville pada 8 Desember 1947-17 Januari 1948. Namun, Belanda kembali melanggar perjanjian tersebut dengan kembali melakukan agresi militernya yang kedua pada 19 Desember 1948. Selanjutnya, dilaksanakan Perundingan Roem Royen pada 14 April-17 Mei 1949 yang kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus-2 November 1949.²⁷

Konferensi Meja Bundar menghasilkan keputusan mengenai penyerahan kedaulatan atas Indonesia dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949.²⁸ Keputusan ini disambut gembira oleh kaum nasionalis Ambon, karena perjuangan mereka untuk kemerdekaan Indonesia dapat menjadi kenyataan.

²⁶ Dalam hal ini tujuan DMS menyetujui Ambon menjadi bagian dari NIT agar mereka dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam parlemen NIT, akan tetapi GSS menginginkan pemerintahan Belanda yang kekal di Maluku Selatan dan Ambon akan tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Lihat : G.A Ohorella, *op.cit.*, hal. 22-23.

²⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 137-169.

²⁸ Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa* (Jakarta : CV Rajawali Corporation, 2002), hal. 93.

Dalam waktu enam bulan setelah pengakuan kedaulatan itu, tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan atau disalurkan ke TNI.²⁹ Akan tetapi, pihak KNIL tidak menerima bekerjasama dengan TNI. Pihak KNIL pun menuntut untuk ditetapkan sebagai alat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian. Di wilayah Ambon, kelompok kontra Republik yang diketuai oleh Dr. Soumokil memanfaatkan keadaan ini. Adanya penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS, ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Ambon. Ada gerakan kelompok yang menentang Republik yang dipimpin oleh Dr. Soumokil yang menginginkan berdirinya negara Republik Maluku Selatan (RMS). RMS dapat diselesaikan melalui operasi militer yang dipimpin oleh Letkol. Ign. Slamet Riyadi. Negara RIS bertahan kurang dari satu tahun. Pada 17 Agustus 1950, RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berubahnya RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Ambon kembali menjadi bagian dari wilayah NKRI.

Banyak hal menarik dalam penulisan perjuangan kaum nasionalis Ambon. Perjuangan mereka terlihat sejak masa pendudukan Jepang hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Mereka berhasil membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hal menarik dari perjuangan kaum nasionalis Ambon adalah perjuangan yang menghindari kekuatan senjata. Kaum nasionalis Ambon memilih berjuang melalui diplomasi dan parlementer, karena wilayah Ambon berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di Indonesia sebelah barat. Kaum nasionalis Ambon memilih bekerjasama dengan Jepang dan Belanda hanya untuk memanfaatkan dan menghindari peperangan. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan Jepang maupun Belanda. Keadaan ini mengakibatkan tidak sedikit dari rakyat Indonesia yang berada di luar Ambon menganggap bahwa rakyat Ambon pro Belanda. Ternyata, di wilayah Ambon terdapat kaum nasionalis yang berjuang dan memiliki tujuan yang sama dengan rakyat Indonesia lainnya. Mereka juga menginginkan Indonesia merdeka dan berjuang untuk menjadikan Ambon bagian dari Republik Indonesia.

²⁹ R.Z. Leirissa, "Pemberontakan Maluku Selatan", *Majalah Prisma*, 8 : 32, Agustus, 1978.

Adapun karya-karya sebelumnya yang membahas mengenai hal ini adalah karya Richard Chauvel yang berjudul *The Rising Sun In The Spice Island : A History of Ambon During The Japanese Occupation*, dalam karyanya, Richard Chauvel membahas wilayah Ambon hanya pada periode masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Serta karya Usman Thalib dalam tesisnya yang berjudul *Ambon Di Masa Revolusi Percaturan Politik Antara Kelompok Pro dan Kontra RI 1946-1949*, membahas mengenai kehidupan perpolitikan di Ambon pada masa revolusi (pasca kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1946-1949. Adapun yang membedakan penulisan skripsi ini dengan karya sebelumnya adalah dalam penulisan ini akan dipaparkan perjuangan serta peran kaum nasionalis Ambon pada masa pendudukan Jepang, pembentukan NIT, hingga penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia, agar cita-cita mereka, yaitu Ambon dapat menjadi bagian dari NKRI dapat terwujud.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai perjuangan kaum nasionalis atau golongan yang pro Indonesia di wilayah Ambon pada masa pendudukan Jepang hingga terbentuknya NKRI 1942-1950. Untuk mengembangkan permasalahan tersebut, maka digunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan perjuangan kaum nasionalis Ambon pada masa pendudukan Jepang di Ambon?
2. Bagaimana perjuangan kaum nasionalis Ambon terhadap upaya kembalinya kekuasaan Belanda ke wilayah Ambon dan peran mereka dalam Negara Indonesia Timur yang dibuat oleh Belanda?
3. Bagaimana sikap dan perjuangan kaum nasionalis Ambon untuk mengembalikan wilayah Ambon menjadi bagian dari NKRI?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membatasi periode pada tahun 1942 hingga 1950. Dimulai pada 1942, pada tahun tersebut dimulai masa pendudukan Jepang. Ambon itu sendiri berhasil dikuasai oleh Jepang pada 31 Januari 1942. Pada masa

pendudukan Jepang inilah, rakyat Ambon memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Peran kaum nasionalis Ambon semakin besar, dimana mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali ke Indonesia dan membentuk Negara Indonesia Timur. Di dalam NIT inilah kaum nasionalis Ambon kembali berperan. Para golongan nasionalis berjuang melalui parlemen Negara Indonesia Timur. Mereka memilih bergabung dengan Negara Indonesia Timur dengan tujuan untuk tidak menentang pemerintah Belanda yang pada saat itu mulai kembali berkuasa di Indonesia Timur

Penulisan ini berakhir pada periode 1950. Pada 17 Agustus 1950, RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimana negara-negara bagian melebur menjadi bagian NKRI. Dalam hal ini perjuangan kaum nasionalis Ambon dalam memperjuangkan wilayah Ambon kembali menjadi bagian dari Indonesia dapat terwujud. Pada 1950, permasalahan di Ambon mengenai berdirinya Republik Maluku Selatan juga dapat diselesaikan.

Penulis pun membatasi wilayah penelitian hanya untuk wilayah Maluku Tengah, khususnya Pulau Ambon. Hal ini dikarenakan sebutan untuk orang Ambon itu sendiri memang ditujukan untuk masyarakat yang berada di Maluku Tengah. Selain itu, Pulau Ambon merupakan pusat dari kekuasaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai perjuangan serta peran kaum nasionalis Ambon pada masa pendudukan Jepang hingga Ambon menjadi bagian dari NKRI. Hal ini merupakan hasil dari perjuangan nasionalis Ambon yang menginginkan Ambon kembali menjadi bagian dari wilayah Indonesia dan terlepas dari kekuasaan Belanda.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini yang akan digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah itu sendiri terbagi menjadi empat bagian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap awal penulisan penulis melakukan tahap pengumpulan data atau heuristik. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data

baik itu sumber primer maupun sekunder. Untuk sumber primer ini, penulis menggunakan surat kabar sezaman, diantaranya, *Ambon Baroe*, *Soeloeh Ambon*, dan *Negara Baroe*. Untuk sumber-sumber sekunder, penulis menggunakan buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Tahap ini dinamakan tahap kritik. Tahap kritik ini adalah suatu tahapan dimana data-data yang didapatkan diseleksi untuk menjadi fakta. Dalam hal ini penulis harus meng-*cross check* sumber yang satu dengan yang lainnya. Pada tahap kritik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan internal. Dalam penulisan sejarah tahap kritik memang sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dari sumber-sumber yang yang digunakan pada dasarnya tidak terdapat perbedaan. Baik tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang Ambon dengan orang luar yang bukan berasal dari Ambon, salah satunya karya R.Z Leirissa dengan Richard Chauvel. Akan tetapi, sumber-sumber tersebut saling melengkapi. Setelah melalui tahap kritik, maka tahap selanjutnya adalah interpretasi. Dalam tahap ini, fakta-fakta yang telah diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder ini lalu dianalisis atau diuraikan. Data-data yang diperoleh maka diinterpretasikan sesuai dengan deskripsi peristiwa. Dalam hal ini periodisasi dari sejarah pun termasuk ke dalam proses interpretasi ini

Tahapan terakhir setelah melalui tahap interpretasi adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah. Melalui fakta-fakta yang telah dianalisis, maka fakta-fakta tersebut disusun, dan diberi tekanan terhadap fakta-fakta yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat Ambon pada masa pendudukan Jepang hingga terbentuknya penyerahan kedaulatan Indonesia secara naratif atau kronologis dengan deskripsi-analisis.

1.6 Sumber Penelitian

Dalam pencarian sumber-sumber penelitian ini, penulis memperoleh sumber-sumber baik primer maupun sekunder di perpustakaan, di antaranya Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Disjarah TNI, dan Perpustakaan LIPI. Selain itu sumber-

sumber primer mengenai penelitian ini penulis peroleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain dari perpustakaan dan ANRI sumber-sumber untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari koleksi pribadi penulis, dan koleksi pribadi dosen program studi Ilmu Sejarah FIB UI.

Adapun sumber-sumber sekunder yang diperoleh, diantaranya karya Des Alwi dengan judul *Sejarah Maluku : Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, yang berisikan mengenai sejarah wilayah Ambon. Onghokham dengan judul *Runtuhnya Hindia Belanda*, yang berisikan situasi Indonesia di akhir kekuasaan Hindia Belanda. John Pattikayhatu dengan judul *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Maluku*, yang berisikan mengenai perjuangan masyarakat Maluku pada masa revolusi Indonesia. Richard Chauvel dengan judul *Nasionalists, Soldiers, and Separatists : The Ambonese Islands From Colonialism to Revolt 1880-1950*, yang berisikan keadaan Ambon sejak masa kolonial hingga revolusi. Ide Anak Agung Gde Agung dengan judul *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, yang berisikan mengenai pembentukan NIT hingga RIS. G.A Ohorella yang berjudul *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, yang berisikan mengenai perjuangan masyarakat Ambon untuk kembali menjadi bagian Indonesia.

Sumber sekunder lainnya adalah berupa artikel yang diperoleh dari *Majalah Prisma*, dimana penulis memperoleh tulisan dari R.Z Leirissa yang berjudul *Pemberontakan Republik Maluku Selatan*, Richard Chauvel yang berjudul *Ambon : Dari Masa Kolonial Sampai Proklamasi RMS* dan artikel lainnya. Untuk sumber primer itu sendiri penulis menggunakan *Algemeen Secretarie*, Dokumen Sekretariat Negara, dan surat kabar sezaman, diantaranya *Ambon Baroe*, *Soeloeh Ambon*, dan *Negara Baroe*.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari :

Bab pertama yang merupakan : pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul : Ambon Masa Pendudukan Jepang. Bab ini menjelaskan keadaan dan perjuangan kaum nasionalis Ambon pada masa pendudukan Jepang.

Bab ketiga berjudul : Ambon Pasca Pendudukan Jepang Hingga Terbentuknya Negara Indonesia Timur. Bab ini akan menjelaskan mengenai perjuangan kaum nasionalis Ambon pasca pendudukan Jepang, di mana setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, kekuasaan Belanda kembali masuk ke Indonesia, khususnya Indonesia Timur dimana Ambon menjadi salah satu wilayah kekuasaan Belanda. Bab ini juga menjelaskan mengenai pembentukan NIT dan peran serta perjuangan kaum nasionalis Ambon dalam NIT tersebut.

Kemudian, bab empat berjudul : Masuknya Ambon Menjadi Bagian NKRI. Bab ini memberikan penjelasan mengenai perjuangan kaum nasionalis Ambon untuk mengembalikan wilayah Ambon menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Diawali dari Persetujuan *Hoge Veluwe* hingga Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan RIS hingga peran kaum nasionalis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Ambon yang disebabkan oleh gerakan separatis yang mendirikan Republik Maluku Selatan. Bab kelima atau bab terakhir dalam penulisan ini merupakan penutup yang menarik hal-hal penting dari bab-bab sebelumnya untuk dijadikan kesimpulan dari hal-hal yang dikemukakan.

BAB 2

AMBON MASA PENDUDUKAN JEPANG

2.1 Geografi dan Demografi

Pulau Ambon terdapat di kawasan Kepulauan Maluku. Wilayah Maluku terletak di 3°LU-8°.20`LS dan 124°BT-135°BB, berbatasan langsung sebelah utara dengan Laut Teduh, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Sulawesi, dan sebelah timur dengan Irian Jaya.³⁰ Istilah Maluku pada mulanya merupakan empat wilayah pusat kerajaan di Maluku Utara. Dimana dalam *Sejarah Ternate* dan *Kronik Kerajaan Bacan* kerajaan-kerajaan yang muncul akibat *boldan-boldan*, menggunakan istilah Maluku, yaitu *Maloko Boldan Ternate*, *Maloko Boldan Tidore*, *Maloko Boldan Bacaan*, dan *Maloko Boldan Jailolo*.³¹ Namun, istilah Maluku meluas pada masa kekuasaan Belanda ketika meluaskan wilayah kekuasaannya. Pada abad ke-17 Belanda membagi wilayah kekuasaannya, yaitu *Gouvernement Ternate* untuk Maluku Utara, *Gouvernement Amboina* untuk Maluku Tengah, dan *Gouvernement Banda* untuk Maluku Tenggara.³² Maluku merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Ternate, Tidore, Bacaan, Sula, Ambon, Haruku, Nusa Laut, Banda.

Maluku Tengah mempunyai pulau-pulau utama, yaitu Ambon dan Kepulauan Uliase yang terdiri dari Haruku, Saparua, dan Nusa Laut. Ambon merupakan pusat kegiatan di Maluku Tengah. Pada masa kekuasaan VOC, Ambon menjadi tempat kedudukan seorang residen dan menjadi pusat kekuasaan. Golongan terpelajar, perkumpulan-perkumpulan seperti *Christelijke Ambonse Volksbond*, *Sou Moloeka*, *Nusa Ina* dan sebagainya, serta surat kabar seperti *Ambon Baroe*, *Sinar Maloekoe* menunjukkan bahwa aspirasi kemajuan terdapat di

³⁰ Tim Penulis, *Monografi Daerah Maluku*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,t.th), hal. 22.

³¹ *Boldan* adalah suatu bentuk politik yang luas yang dikuasai oleh *Kolano*. Daerah kekuasaan *Kolano* sangat luas dan tidak terbatas pada satu desa atau satu kelompok desa (*uli*), sehingga *Boldan* adalah bentuk awal dari kerajaan di Maluku. R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal, 1.

³² R.Z. Leirissa, *Sejarah Kebudayaan...*, *op.cit.*, hal. 65.

Pulau Ambon.³³ Di Pulau Ambon juga muncul semangat dan cita-cita persatuan dan kemerdekaan untuk Indonesia yang mulai tersebar disana. Pada abad ke-20 istilah Ambon ditujukan untuk wilayah Maluku Tengah, begitu pun dengan istilah orang Ambon ditujukan untuk masyarakat di Maluku Tengah.³⁴ Asal usul orang Ambon tersebut memang tidak diketahui secara jelas, namun dalam *Hikayat Tanah Hitu* dijelaskan bahwa mereka datang dari Pulau Seram bagian timur, Tuban, Jailolo, dan dari Gorom.³⁵ Mereka yang pertama kali menempati wilayah Ambon dan Kepulauan Uliase.

Pulau Ambon terletak pada posisi 3°29`LS-3°48`LS dan antara 127°55`BT-128°21`BT.³⁶ Pulau Ambon juga berbatasan Pulau Seram di sebelah utara, Laut Banda di sebelah selatan, Kepulauan Uliase di sebelah timur, dan Pulau Buru di sebelah Barat. Topografi Pulau Ambon pada umumnya berbukit dengan dengan sedikit dataran rendah di wilayah pesisir. Luas wilayah Ambon sekitar 761 km², dengan luas daratan 361 dan sisanya merupakan luas perairan.³⁷ Luas dataran rendah hanya 8%, luas tanah bergelombang 24%, sedangkan sisanya 68% tanahnya bergunung-gunung.³⁸ Curah hujan di Pulau Ambon sekitar 2700 mm per tahun dan cocok untuk ditanami tanaman cengkih dan pala. Ini juga yang menyebabkan banyak bangsa barat seperti Portugis dan Belanda yang datang ke Ambon.

Pulau Ambon terbagi menjadi dua jazirah, yaitu Jazirah Leihitu dan Jazirah Leitimor. Jazirah Leihitu terdapat di sebelah utara Pulau Ambon, meliputi antara lain Hitu Lama, Laha, Tulehu, dan Hila, yang merupakan wilayah awal penyebaran agama Islam dan Jazirah Leitimor adalah kawasan yang berada di sebelah timur Ambon, dimana wilayahnya antara lain meliputi Latuhalat, Kapa, dan Hutumuri.³⁹

³³ R.Z Leirissa, *loc.cit.*, hal. 26-39

³⁴ R.Z Leirissa, *Sejarah Kebudayaan ...*, *op.cit.*, hal. 66.

³⁵ W.A. Selekty, "Asal Usul Penduduk Ambon Menurut Safara 'Rridjali," *Majalah Yaperna*, 8 : 56-61, Agustus, 1970

³⁶ Mc. Suprapti dan P. Wayong (ed), *Geografi Budaya Daerah Maluku*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hal. 165.

³⁷ Tim Penulis, *Monografi Daerah Maluku*, *op.cit.*, hal. 23.

³⁸ Mc. Suprapti dan P. Wayong (ed), *op.cit.*, hal 167-168.

³⁹ R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 4-5.

2.2 Kedatangan Tentara Jepang ke Ambon

Ambon merupakan bagian dari Maluku Selatan yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Maluku yang lama dikuasai oleh Bangsa Belanda. Dalam beberapa hal, kehidupan rakyat Ambon telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh Belanda. Kebiasaan masyarakat Ambon di antaranya adalah mereka lebih senang memakai pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang Belanda dibandingkan pakaian daerah mereka. Mereka juga lebih nyaman memakai sepatu bot kulit dibandingkan dengan bertelanjang kaki, serta pada umumnya masyarakat Ambon pandai berbahasa Belanda walaupun pendidikannya kurang.⁴⁰ Kehadiran orang Jepang di Ambon, ternyata telah ada jauh sebelum Jepang berkuasa pada tahun 1942. Sudah ada sebelumnya toko-toko Jepang dan nelayan-nelayan yang berasal dari Jepang yang diizinkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu.

Menjelang 1942, orang-orang Jepang tersebut mulai melakukan propagandanya terhadap orang-orang Ambon. Toko-toko milik orang-orang Jepang, yaitu Toko *Iwanaga* dan *Kitano* menjual barang-barangnya yang jauh lebih murah dibandingkan di toko lain untuk menarik pembeli. Orang-orang Jepang yang berada di toko tersebut menceritakan kepada para pelanggan mengenai keadaan Jepang dan membanding-bandingkan Jepang dengan Belanda. Para nelayan-nelayan Jepang juga melakukan propagandanya dengan merekrut orang-orang Ambon menjadi buruh penangkap ikan. Mereka diajarkan mengenai teknik-teknik menangkap ikan, perhitungan arus, dan cuaca.⁴¹ Melalui cara tersebut orang-orang Jepang mencari simpati masyarakat Ambon. Pemerintah Belanda sendiri tidak menyadari hal ini, karena orang-orang Jepang melakukan propagandanya secara diam-diam, yaitu hanya dari orang ke orang.

Keadaan di Ambon menjadi ramai ketika Pearl Harbour dibom oleh Jepang. Pemerintah Belanda lalu mengambil tindakan-tindakan untuk menghadapi bahaya yang sedang mengancam dengan membentuk organisasi pertahanan sipil, seperti *Stadswacht*, *Vernielingscorps*, dan *Landwacht*.⁴² Penyerangan tentara

⁴⁰ Des Alwi, *op.cit.*, hal 581.

⁴¹ Tim Penulis, *Sejarah Kebangkitan ...*, *op.cit.*, hal 139-141.

⁴² R.Z. Leirissa, *Sejarah Sosial...*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1984), hal. 103.

Jepang ke Pearl Harbour yang merupakan pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941 memunculkan Jepang sebagai kekuatan besar.⁴³ Pada saat itu, Pemerintah Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang pun mulai menguasai wilayah selatan. Hindia Belanda merupakan salah satu wilayah di selatan. Wilayah Indonesia satu-persatu dikuasai oleh tentara Jepang, mulai dari Tarakan (Kalimantan Timur) dan Menado (Sulawesi Utara) pada 11 Januari 1942, Balikpapan (Kalimantan Barat) pada 24 Januari 1942 hingga Ambon (Maluku) pada 2 Februari dan Makasar (Sulawesi Tenggara) pada 9 Februari 1942.⁴⁴ Tentara Jepang berhasil menguasai dari timur ke Laut Jawa serta pulau-pulau di Indonesia Timur. Hal ini mengakibatkan pemerintah Belanda kehilangan stasiun radio antara Jawa dan Ambon yang merupakan stasiun radio terpenting di Indonesia.⁴⁵

Di Ambon wilayah Indonesia Timur merupakan salah satu bagian yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang ke-2. Kedatangan Jepang ke wilayah Ambon ditandai dengan pemboman yang mengakibatkan kerusakan besar di kota Ambon pada 6 Januari 1942. Sebelumnya, pada Desember 1941, wilayah Ambon terlebih dahulu dikepung oleh kapal-kapal perang Jepang. Kedatangan tentara Jepang ke wilayah Ambon telah diketahui oleh tentara Belanda yang berada di wilayah tersebut, oleh karena itu pemerintah Belanda telah mempersiapkan pasukan di wilayah-wilayah yang merupakan tempat strategis untuk melakukan pendaratan oleh tentara Jepang, seperti halnya daerah-daerah di pesisir Ambon, seperti : Passo-Hutumury-Lehari dipertahankan oleh tentara KNIL, sedangkan Laha-Tawiri-Hatiwe Besar dipertahankan oleh tentara Australia.⁴⁶ Adapun tujuan Australia mengirimkan pasukannya untuk membantu Belanda di wilayah Ambon, agar tentara Jepang tidak meluaskan serangannya hingga ke Australia. Pemerintah Belanda memperbesar pasukannya dengan merekrut pemuda-pemuda Ambon untuk menjadi militer yang bertugas membantu pasukan Belanda yang

⁴³ W.G Beasley, *Pengalaman Jepang : Sejarah Singkat Jepang*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 320.

⁴⁴ A.B Lapian, *Di bawah Pendudukan Jepang : Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*, (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988), hal. 1.

⁴⁵ Onghokham, *op.cit.*, hal. 234

⁴⁶ Tim Penulis P dan K, *op.cit.* hal. 105

sebelumnya hanya terdiri dari pasukan KNIL, pasukan tersebut dikenal dengan nama *Korte Verband*.⁴⁷

Usaha pemerintah Belanda dalam mempertahankan wilayah Ambon dari serangan tentara Jepang memang dititik beratkan pada wilayah Teluk Dalam dan Jazirah Hitu bagian utara. Menurut perhitungan dari pemerintah Belanda pada saat itu tentara Jepang akan memilih tempat yang strategis untuk melakukan pendaratan. Pemerintah Belanda juga mendirikan benteng-benteng pertahanannya di daerah-daerah tersebut. Daerah Jazirah Leitimur bagian selatan tidak diperhatikan karena daerah ini sulit untuk melakukan pendaratan dan daerah pantainya terjal dan berbatu. Pasca pemboman yang dilakukan tentara Jepang pada 30 Januari 1942 pasukan Jepang mulai memasuki wilayah Ambon melalui Hitu dan Latuhalat. Pasukan Belanda yang telah dipersiapkan mampu menahan serangan tentara Jepang, sehingga Belanda dapat menggagalkan serangan Jepang. Tentara Jepang terus berusaha untuk masuk ke wilayah Ambon. Kegagalan Jepang di Hitu dan Latuhalat dikarenakan kekuatan Belanda yang besar di daerah tersebut. Kegagalan pendaratan di Hitu dan Latuhalat membuat Jepang beralih ke wilayah Tulehu. Pendaratan Jepang di Tulehu tidak berbeda jauh seperti di daerah sebelumnya. Jepang mengalami kegagalan di wilayah tersebut. Di wilayah Tulehu, rakyat Ambon menjadi korban akibat serangan tentara Jepang. Usaha tentara Jepang untuk melakukan pendaratan di wilayah Ambon terus mendapat perlawanan dari tentara Belanda.⁴⁸ Jepang akhirnya berhasil mendaratkan pasukannya di Passo dan Lehari dekat Hutumury.⁴⁹ Passo merupakan pusat pertahanan Belanda. Di wilayah tersebut Jepang mendapatkan perlawanan kuat dari pasukan Belanda. Banyak tentara Jepang yang tewas dalam usaha pendaratan di wilayah tersebut. Namun, tentara Jepang terus datang ke wilayah tersebut

⁴⁷ *Korte Verband* merupakan tentara tiga tahun, mereka dilatih dan dididik untuk menjadi militer selama tiga tahun, setelah mereka menjalani tugas selama tiga tahun tersebut barulah mereka dapat menempuh ujian masuk tentara KNIL. Lihat : John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 2-3.

⁴⁸ Adapun beberapa daerah yang gagal dilakukan pendaratan oleh tentara Jepang setelah mengalami kegagalan di Hitu Latuhalat, di daerah Tulehu pun tentara Jepang mengalami kegagalan karena pasukan Belanda dapat menahan serangan Jepang. Kemudian, Jepang melakukan pendaratan di Passo (Batu Gong) dan Lehari, walaupun tetap mendapatkan serangan dari pasukan Belanda, namun di wilayah tersebut Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Passo. Lihat : Tim Penulis P dan K, *op.cit.*, hal. 145-146.

⁴⁹ Untuk lebih jelas dapat melihat peta pendaratan tentara Jepang di wilayah Ambon pada bab lampiran.

hingga Passo dapat diduduki.⁵⁰ Berbeda dengan di Passo, pendaratan tentara Jepang di Lehari tidak mendapat perlawanan, karena pemerintah Belanda tidak menempatkan pasukannya di daerah tersebut sebab daerahnya berbatu dan sulit melakukan pendaratan. Tentara Jepang mengetahui wilayah tersebut dari orang-orang Jepang yang telah menjadi mata-mata dan sudah terlebih dahulu berada di wilayah Ambon, sehingga Jepang dapat mendaratkan pasukannya di Passo dan Lehari.

Dimulai dari daerah Lehari, tentara Jepang masuk ke daerah-daerah lainnya. Jepang kembali melakukan pemboman terhadap wilayah Laha dan Balong yang merupakan pusat kekuatan pemerintah angkatan laut Belanda, sehingga Jepang dapat menguasai daerah-daerah tersebut.⁵¹ Pada saat itu wilayah tersebut menjadi sepi, karena rakyat Ambon menyingkir ke hutan-hutan. Dikuasainya daerah yang merupakan pusat kekuasaan pemerintah Belanda, maka Ambon telah berhasil dikuasai oleh tentara Jepang. Ketika Jepang mulai menduduki wilayah Ambon, terjadi pertentangan diantara pasukan Belanda dan Australia. Pasukan Australia bertugas membantu pasukan Belanda menahan serangan Jepang. Mereka yang berada di Ambon masih ingin melanjutkan perjuangannya melawan tentara Jepang. Pasukan Belanda sendiri telah menyerah karena kekuatan Jepang yang lebih besar dibandingkan pasukan Belanda. Serangan-serangan Jepang ke beberapa wilayah Ambon membuat Belanda menyadari kekuatan Jepang yang kuat. Akibat dari tidak menyerahnya pasukan Australia, maka mereka melakukan perjuangannya sendiri tanpa pasukan Belanda. Usaha tentara Australia tidak berhasil. Tentara Jepang lebih banyak jumlahnya dibandingkan tentara Australia, sehingga Jepang dapat mengalahkan tentara-tentara Australia. Mereka yang tersisa melarikan diri, kembali ke Australia pada 3 Februari 1942. Menyerahnya pasukan Belanda dan Australia membuat Jepang semakin meluaskan kekuasaannya dari Hitu Lama, Latuhalat, Hutumury, Passo, dan Teluk Eri.⁵² Tentara Jepang pada akhirnya berhasil menguasai wilayah

⁵⁰ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal 6

⁵¹ Tim Penulis P dan K, *op.cit* hal. 146-148.

⁵² Untuk mengetahui wilayah-wilayah tersebut dapat melihat Peta Pulau Ambon pada halaman lampiran.. Lihat : *Ibid.*, hal 149.

Ambon secara utuh. Mulai saat itu rakyat Ambon mulai memasuki babak baru berada di bawah pendudukan Jepang.

2.3 Kehidupan Rakyat Ambon Masa Pendudukan Jepang

Di awal kedatangannya, orang-orang Jepang berusaha bersikap baik terhadap rakyat Ambon. Jepang melakukan sistem *dumping* sebagai propagandanya. Propaganda-propaganda Jepang pada umumnya tidak diperdulikan oleh masyarakat Ambon. Ini disebabkan karena rakyat Ambon lebih percaya pada pemerintahan Belanda. Akan tetapi, Jepang tetap melakukan propagandanya untuk meraih simpati seluruh rakyat Ambon. Mereka menyebarkan selebaran yang memberitahukan bahwa telah terjadi perang. Selebaran tersebut menggambarkan mengenai :

1. Jepang akan membebaskan rakyat Asia dari orang-orang kulit putih
2. Jepang akan datang untuk membuang orang-orang kulit putih
3. gambar-gambar yang membuat kebangunan Asia
4. gambar-gambar yang melukiskan kedatangan Jepang bukan untuk berperang dengan orang-orang Asia, melainkan membantu orang Asia
5. Jepang datang untuk bekerjasama dengan orang-orang Indonesia.⁵³

Dengan disebarkannya pamflet-pamflet tersebut, rakyat Ambon pada saat itu menyadari bahwa telah terjadi perang pada saat itu.

Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Ambon terbagi menjadi empat golongan. *Golongan pertama* adalah masyarakat yang menyambut kedatangan tentara Jepang. Golongan ini beranggotakan masyarakat Islam Ambon. Mereka menyambut kedatangan tentara Jepang karena telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Sementara, pada masa kekuasaan Belanda mereka merasa tertindas. Golongan Islam pada masa pemerintahan Belanda tidak mempunyai hubungan dengan Pemerintah dan selain itu mereka tidak bisa memperoleh pendidikan seperti masyarakat Kristen.⁵⁴ Rakyat Ambon yang menyambut kedatangan tentara Jepang dilatar belakangi karena sikap Jepang yang baik. Tentara Jepang berusaha membina hubungan baik dengan masyarakat Islam. Hal

⁵³ *Ibid.*, hal 143.

⁵⁴ Des Alwi, *op.cit.*, hal 578.

ini dilakukan tentara Jepang untuk menarik simpati masyarakat Ambon yang tidak menyukai keberadaan Belanda. *Golongan kedua* adalah rakyat Ambon yang tidak menyukai kedatangan tentara Jepang. Golongan ini beranggotakan orang-orang Kristen yang setia terhadap Belanda, seperti kelompok yang dipimpin Sersan pensiunan KNIL “Oom” Thijs de Fretes yang menjauhi kekuasaan Jepang.⁵⁵ Kedatangan tentara Jepang yang berusaha menghilangkan orang-orang kulit putih dan juga pengikutnya membuat mereka khawatir. *Golongan ketiga* adalah masyarakat Ambon yang bersikap hati-hati terhadap kedatangan tentara Jepang. Golongan ini beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan Ambon yang bersifat nasionalis. Mereka terdiri dari orang Kristen dan Islam. *Golongan keempat*, merupakan golongan mata-mata Jepang. Mereka merupakan rakyat Ambon yang dipercaya oleh Jepang. Golongan mata-mata ini di takuti oleh sebagian rakyat Ambon, karena mereka dapat menunjuk seseorang yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda.⁵⁶

Setelah Jepang berhasil menguasai Ambon, tentara Jepang merubah struktur pemerintahan di Ambon yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda, yaitu seluruh pegawai kulit putih atau yang berkaitan dengan Belanda ditangkap dan digantikan oleh masyarakat Ambon.⁵⁷ Bahkan di awal kekuasaan Jepang di Ambon, banyak pendeta-pendeta, guru, dan tentara KNIL dihukum pancung oleh tentara Jepang. Mereka dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang ini orang-orang Kristen banyak menderita, karena kedekatan mereka dengan Belanda. Orang Kristen dicurigai sebagai mata-mata orang Belanda. Untuk tentara KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*), mereka banyak yang menjadi *heiho*. Mereka dikirim ke berbagai tempat di luar Indonesia.⁵⁸

Pertentangan antara orang-orang Ambon Islam dan Ambon Kristen terlihat di awal masa pendudukan Jepang. Orang Kristen melihat bahwa Jepang memihak

⁵⁵ Kelompok ini memang setia terhadap pemerintah Belanda, dalam hal ini tentara Jepang menyatakan bahwa jika kelompok ini masih setia terhadap Belanda maka semua orang Ambon yang menyandang nama “de Fretes” akan menerima hukuman penggal. Pada Agustus 1943 “Oom” Thijs de Fretes meyerahkan diri dan menerima hukuman penggal. Lihat : de Jonge, *Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta : Kesaint Blanc, 1991), hal. 94.

⁵⁶ Tim Penulis P dan K, *op.cit.*, hal. 152-153.

⁵⁷ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 95.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 96.

pada masyarakat Islam. Sikap Jepang ini membuat masyarakat Kristen tidak menyukai masyarakat Islam. Keadaan ini dapat terselesaikan ketika Pupella ditugaskan oleh Jepang untuk menangani keadaan tersebut. Melalui dasar paham kebangsaannya, Pupella memberikan pemikirannya atas kekeliruan dan memperbaiki kesalahpahaman.⁵⁹

Pada masa pendudukan Jepang sistem pemerintahan di Ambon tidak mengalami perubahan yang besar, hanya perubahan pada aparat-aparat pemerintahan saja. Jepang membuat aparat-aparat pemerintahan sipil, seperti kepala daerah yang dikenal dengan *minseibu chokan* yang berkedudukan di Ambon, Tual, dan Ternate.⁶⁰ Pegawai-pegawai bekas pemerintahan Belanda di Ambon tetap diizinkan bekerja, akan tetapi berada di bawah pengawasan tentara Jepang, sehingga mereka tidak dapat bergerak bebas. Hal serupa pun terjadi terhadap guru-guru Belanda di Ambon.

Dalam kehidupan masyarakat Ambon terjadi perubahan, seperti mengenai hak milik. Menurut Jepang bahwa manusia, tanah air, tumbuhan, dan binatang itu semua milik Jepang. Pernyataan Jepang ini yang membuat suatu kejutan untuk rakyat Ambon yang telah terbiasa dengan pemilikan pribadi dan kebebasan pribadi.⁶¹ Rakyat Ambon tidak berani melawan kekuasaan Jepang. Di masa pendudukannya, Jepang memiliki polisi rahasia yang dikenal dengan nama *kempetai*. *Kempetai* mempunyai kekuasaan tidak terbatas yang suatu saat dapat menangkap mereka bila menentang keputusan Jepang.⁶² *Kempetai* bertugas untuk memata-matai orang-orang Ambon yang masih setia pada Belanda. Kehidupan rakyat Ambon memang tidak jauh berbeda dengan di daerah-daerah lainnya. Para wanita Ambon banyak yang dijadikan sebagai wanita penghibur, yang dikenal dengan nama *janju*. Sikap Jepang ini membuat rasa takut baik di kalangan para wanita dan orang tua. Saat itu banyak wanita Ambon yang dikawinkan di bawah umur yaitu antara 15-16 tahun. Bagi mereka yang tidak menyerahkan anak

⁵⁹ Richard Chauvel, *Nasionalist, Soldiers and Separatists : The Ambonese Islands From Colonialism to Revolt 1880-1950*. (Leiden : KITLV, 1990), hal. 174-175.

⁶⁰ Sutrisno Kutoyo, ed., *Sejarah Daerah Maluku*, (Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan Departemen P dan K, 1977), hal. 83.

⁶¹ Tim penulis P dan K, *op.cit.*, hal. 158.

⁶² Sutrisno Kutoyo, *op.cit.*, hal. 84.

gadisnya akan disiksa oleh polisi rahasia Jepang.⁶³ Masyarakat Ambon juga banyak yang dijadikan *romusha* yang dipekerjakan oleh Jepang tanpa menerima upah. Mereka juga banyak yang meninggal dunia, karena kesehatan yang tidak terjamin, kelaparan, bahkan siksaan dari tentara-tentara Jepang

Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah di Ambon tetap berjalan. Melalui sekolah tersebut Jepang memanfaatkannya sebagai media propaganda. Keberadaan sekolah di Ambon hanya terbatas pada sekolah-sekolah Melayu dan yang bersifat nasional seperti Balai Pendidikan yang menyerupai Taman Siswa. Sekolah yang berkaitan dengan Belanda seperti HIS dan MULO dilarang dan ditutup oleh Jepang. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggantikan bahasa Belanda. Jepang juga melarang penggunaan buku-buku berbahasa Belanda. Di setiap sekolah dibiasakan untuk melakukan senam pagi atau *taiso* dan juga diajarkan latihan jasmani secara Jepang seperti *sumo* (bergulat), *yudo* (beladiri ala Jepang), dan *kendo* (beladiri yang menggunakan pedang kayu).⁶⁴ Sekolah-sekolah seperti Balai Pendidikan diizinkan berdiri karena tidak terkait dengan Belanda. Jepang juga mendirikan sekolah *Jamakote* yang berkurikulum sesuai dengan pendidikan yang berada di Jepang.⁶⁵ Melalui sekolah, tokoh-tokoh Jepang datang berkunjung untuk memberikan penerangan mengenai keberadaan mereka di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa Jepang adalah saudara tua orang-orang Indonesia serta orang Jepang dan Indonesia itu adalah sama. Langkah ini ditempuh Jepang dengan harapan agar murid-murid serta guru-guru menyampaikan penerangan mereka ini kepada orang tua dan masyarakat lainnya. Orang-orang Jepang sangat menghormati guru atau *sensei*. Namun, tindakan Jepang tersebut hanyalah propaganda semata. Adapun tujuan mereka sebenarnya adalah menggantikan posisi Belanda di Indonesia, bukan menganggap Indonesia sebagai adik dan menolong rakyat Ambon pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di Ambon, Jepang melakukan

⁶³ Pada setiap rumah yang memiliki lebih dari seorang wanita muda, tentara Jepang akan mengambilnya. Alasan dari tentara Jepang adalah mereka akan bekerja di asrama sebagai pembantu, walaupun pada dasarnya tugas mereka adalah sebagai wanita penghibur tentara-tentara Jepang. Kata *ona-ona* yang berarti perempuan bagaikan momok bagi mereka yang mempunyai anak gadis lebih dari satu. Lihat : Tim Penulis P dan K, *op.cit.*, hal. 159-160. Pada setiap rumah yang memiliki lebih dari seorang wanita muda, tentara Jepang akan mengambilnya.

⁶⁴ Sutrisno Kutoyo, *op.cit.*, hal 85.

⁶⁵ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 19.

pelatihan-pelatihan semi militer seperti *keibodan* yang merupakan barisan pembantu polisi, *seinendan* yang merupakan barisan pemuda yang bertujuan untuk membantu perang Jepang nantinya.

Di Ambon, Jepang menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di negara Jepang. Masyarakat Ambon diwajibkan menghormati bendera dan lagu kebangsaan Jepang. Mereka juga diharuskan menunduk ke arah matahari terbit. Ini merupakan suatu bentuk rasa hormat terhadap Kaisar Jepang. Kebiasaan Jepang ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Masyarakat Islam mulai menyadari bahwa sikap Jepang pada mulanya hanya sebuah usaha untuk mencari simpati rakyat. Dalam kehidupan keagamaan, masyarakat Islam mulai menyadari akan tujuan Jepang. Sikap mereka yang baik, ternyata hanyalah bentuk propaganda Jepang untuk mendapat simpati masyarakat Ambon. Akhirnya kehidupan keagamaan pun harus berada di bawah penguasaan tentara-tentara Jepang. Hal ini dilakukan karena pihak Jepang mencegah adanya propaganda anti Jepang melalui khotbah-khotbah dan dakwah-dakwah. Tindakan Jepang ini pada akhirnya dilakukan terhadap semua rakyat Ambon baik Kristen maupun Islam. Walaupun, memang Jepang lebih bersikap tegas terhadap orang-orang Kristen.⁶⁶ Hubungan Jepang dengan orang-orang Kristen membaik ketika Jepang membentuk suatu kerja sama yang dinamakan *Chris Tokyo Renjokai*.⁶⁷ Bentuk kerjasama ini adalah mengirimkan Pendeta Sato ke Ambon untuk menggantikan pendeta Belanda. Melalui *Chris Tokyo Renjokai*, khotbah-khotbah yang pada mulanya dilarang kembali diizinkan. Di setiap khotbah, Jepang juga menyisipkan propagandanya.

Di bidang ekonomi, rakyat Ambon pada masa pendudukan Jepang mengalami kesulitan, karena kehidupan dan kegiatan perekonomian rakyat Ambon semuanya ditujukan untuk persiapan perang Jepang. Jepang juga membentuk badan yang membantu perekonomian rakyat, yaitu koperasi atau *kumiai*.⁶⁸ Keberadaan *kumiai* membuat toko-toko di Ambon tidak berfungsi

⁶⁶ Jepang melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap gereja-gereja di Ambon. Bahkan gereja harus selalu melaporkan kegiatan-kegiatannya hingga Jepang pun mengharuskan mereka merubah cara beribadah, bentuk khotbah dan segala hal yang berkaitan dengan Belanda ataupun Eropa. Lihat : *Ibid*, hal. 21.

⁶⁷ R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 106.

⁶⁸ Tim Penulis P dan K., *op.cit.*, hal 161

seperti biasa. Semua barang-barang kebutuhan pokok rakyat disediakan melalui *kumiai*, seperti bahan-bahan utama, yaitu sandang dan pangan. Jepang memonopoli kebutuhan pokok rakyat, dan menyalurkannya melalui badan buatan Jepang. Jepang membuat *Nanyo Kohatsu Kabushi Kaisha* (NKKK) dan juga *Busihang* serta Badan Perekonomian Rakyat (BPR).⁶⁹ Melalui badan-badan inilah barang-barang disalurkan ke *kumiai-kumiai* di desa-desa.

Menjelang akhir kekuasaan Jepang di Ambon, keadaan perekonomian rakyat semakin memburuk. Setiap rumah yang memiliki persediaan makan lebih menurut tentara Jepang maka tentara Jepang berhak mengambil makanan tersebut. Keadaan perekonomian yang semakin sulit membuat rakyat Ambon melakukan kegiatan tukar menukar barang, kegiatan ini dikenal dengan nama sistem *kokang*.⁷⁰ Rakyat Ambon yang melakukan kegiatan ini terjadi di luar pengawasan tentara-tentara Jepang, dan apabila kegiatan ini diketahui tentara Jepang akan merampas barang itu dan menghukum bahkan membunuh pelakunya. Barang-barang kebutuhan pokok pada waktu itu makin langka dan sulit diperoleh. Keadaan ini dirasakan juga oleh tentara-tentara Jepang di akhir masa pendudukan. Sistem *kokang* pun terpaksa dilakukan pula oleh tentara Jepang dan juga secara diam-diam agar tidak diketahui oleh *kempetai*. Rakyat Ambon menyadari bahwa apabila mereka diketahui mencuri, *kempetai* akan menghukum mereka, namun mereka tidak takut, karena susahnya keadaan pada saat itu. Menjelang akhir pendudukan Jepang, koperasi di Ambon yang pada awalnya menyediakan kebutuhan rakyat, tidak lagi berfungsi.⁷¹ Kehidupan rakyat Ambon pada masa pendudukan Jepang cukup sulit, apalagi menjelang berakhirnya pendudukan Jepang. Walaupun pada mulanya rakyat Ambon percaya akan propaganda Jepang, namun mereka kemudian menyadari bahwa Jepang datang bukan sebagai kakak, melainkan memang ingin menggantikan kekuasaan Belanda untuk menguasai Ambon.

⁶⁹ John Pattikayhatu., *op.cit.*, hal 22

⁷⁰ Sistem ini pada dasarnya menyerupai sistem barter, yaitu sistem tukar menukar. Rakyat Ambon biasanya menukar emas dan pakaian dengan serat ubi kayu. Adapun mereka melakukannya dengan orang-orang Buton. Lihat : *Ibid.*, hal. 23.

⁷¹ Sutrisno Kuntoyo., *op.cit.*, hal 165

2.4 Peran dan Perjuangan Kaum Nasionalis Ambon

Keberadaan Belanda yang cukup lama di wilayah Ambon atau Maluku memberi kesan kepada masyarakat yang berada di luar Maluku bahwa orang-orang Ambon lebih memihak kepada Belanda, karena Belanda telah lama berkuasa di Maluku sejak awal abad 19. Mulai saat itu wilayah Maluku termasuk Ambon masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Namun, tidak semua rakyat Ambon pro Belanda, terdapat tokoh-tokoh yang pro Indonesia. Mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan hingga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Masuknya gagasan nasionalis ke Ambon berasal dari putra-putri Ambon yang memperoleh beasiswa dari *Ambonsche Studiefonds* tahun 1909.⁷² Mereka melanjutkan pendidikannya di Jawa. Gerakan kebangkitan nasional di Jawa, selain diketahui melalui mereka, juga melalui surat kabar. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang didirikan pada 1908. Di Ambon sendiri sudah terdapat organisasi sosial, seperti *Christelijke Ambonse Volksbond*, *Sou Maloeka*, *Nusa Ina*, dan sebagainya.⁷³ *Sarekat Ambon* merupakan organisasi nasional pertama di Ambon yang didirikan pada 1920 oleh A.J Patty. A.J Patty merupakan nasionalis Ambon dan pelopor gerakan kebangsaan di kalangan orang-orang Ambon. *Sarekat Ambon* merupakan organisasi politik pertama di Ambon yang sebelumnya didirikan di Semarang yang terbuka bagi semua golongan orang Ambon tanpa memandang status dan agama. Tujuan *Sarekat Ambon* di awal berdirinya adalah berusaha dengan cara-cara yang tidak menyalahi hukum yang berlaku, memajukan kemakmuran penduduk di *Residentie Ambon* secara rohaniah dan jasmaniah.⁷⁴ Organisasi ini mengambil sikap menentang Belanda. Gagasan nasionalisme mereka adalah penyamaan posisi masyarakat Ambon sebagai pribumi sama seperti masyarakat jajahan Belanda. Gagasan itu tidak dapat diterima oleh para raja dan masyarakat Kristen Ambon yang telah memperoleh keuntungan serta kemudahan dalam hubungan mereka dengan Belanda. Secara perlahan, A.J Patty membawa *Sarekat Ambon* menerima ide nasionalisme

⁷² Richard Chauvel, "Ambon : Dari Masa Kolonial Sampai Proklamasi RMS," *Majalah Prisma*, 11 : 77, November, 1991.

⁷³ Tim Penulis P dan K, *op.cit.*, hal. 27-28.

⁷⁴ John I Matullatuwa, "Azas Sarekat Ambon", *Surat Kabar Sapoelalan*, April, 1926, hal.1.

Indonesia yang telah ditanamkan oleh *Indische Partij*. Banyak orang Ambon yang bergabung dalam *Sarekat Ambon*, sehingga akhirnya, A.J Patty diusir dari Ambon pada tahun 1924.⁷⁵ Organisasi ini bubar saat menjelang Perang Dunia II, karena pemimpin-pemimpinnya menolak unsur agama dalam politik. Selain *Sarekat Ambon*, gerakan nasionalis lainnya yang cukup menonjol adalah *Insulinde*, *Nationale Indische Partij*, dan pergerakan wanita *Ina-Ina*. Banyak anggota-anggota dari organisasi tersebut ditangkap, karena mereka menentang Belanda. Peran Pupella mulai terlihat pada masa itu. Pupella bahkan sering ditangkap oleh pemerintah Belanda karena nasionalisme yang ia perjuangkan.

Kegiatan pergerakan nasionalis di Ambon sejak 1939 mulai menurun, karena Belanda mulai melakukan pengawasan terhadap tokoh-tokohnya. Mereka yang dianggap berbahaya ditangkap, juga dilakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh nasionalis Ambon, sehingga tokoh-tokoh nasionalis juga menunjukkan sikap yang pasif. Nasionalisme kembali muncul pada masa pendudukan Jepang.

Tokoh-tokoh nasionalis Ambon sebagian besar adalah orang-orang Ambon berpendidikan dan berorganisasi. Mereka merupakan kumpulan orang-orang Ambon yang berpihak pada Indonesia. Ketika tentara Jepang datang ke wilayah Ambon, mereka tidak disambut dengan gembira dan tidak membuat para nasionalis Ambon merasa khawatir. Kaum nasionalis Ambon lebih bersikap hati-hati terhadap kedatangan pasukan Jepang yang memberikan kepercayaan kepada para tokoh nasionalis Ambon untuk membantu masuk dalam pemerintahan di Ambon. Ini dilakukan Jepang untuk mencari simpati. Untuk kaum nasionalis Ambon, hal ini dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di awal kedatangannya, Jepang mendekati orang-orang Islam untuk mendapatkan dukungan.⁷⁶ Sikap Jepang yang memberi kebebasan kepada masyarakat Islam, membuat mereka menyambut gembira kedatangan Jepang di Ambon. Keadaan berubah ketika terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan norma agama Islam, seperti membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Sikap Jepang ini membuat masyarakat Ambon tidak menyukai keberadaan tentara Jepang. Setelah Jepang tidak lagi mendapat simpati masyarakat Islam, mereka beralih mendekati kaum nasionalis Ambon.

⁷⁵ Richard Chauvel, *loc.cit.*

⁷⁶ Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto., *op.cit.*, hal. 24.

Dalam struktur pemerintahan, Jepang mempercayakan tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang pernah menjadi anggota *Sarekat Ambon* untuk duduk di dalam pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang, tokoh-tokoh *Sarekat Ambon* dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya mendapat tempat yang baik dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Salah satu tokoh nasionalis Ambon yang pernah menjabat sebagai pemimpin *Sarekat Ambon* adalah Eliza Urbanus Pupella yang menggantikan Ajawaila. Pupella juga pernah menjadi anggota *Ambon Raad* pada masa kekuasaan Belanda di Ambon.⁷⁷ Tokoh Pupella sangat berperan pada masa pendudukan Jepang. Pupella dipercaya oleh Jepang untuk duduk di dalam pemerintahan. Ini merupakan langkah Jepang yang berusaha mendekati kaum nasionalis untuk memperoleh simpati. Pupella sendiri merupakan tokoh yang disegani di Ambon. Tidak hanya Pupella, tokoh nasionalis Ambon lainnya yang dipercaya Jepang untuk bekerjasama di antaranya adalah Yan Taule, Manuhuttu, Hamid bin Hamid, Tjokro, dr. Tahitu, dan Ot Pattimaipau. Ot Pattimaipau dipercaya Jepang untuk memimpin pers dan memimpin *Surat Kabar Ambon Simbun*.⁷⁸ Tokoh-tokoh nasionalis ini memanfaatkan posisi mereka, dan bersedia bekerjasama dengan Jepang. Namun, di satu sisi mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya Pupella yang mendapat kepercayaan penuh dari Jepang, diizinkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih, walaupun hanya sekitar tiga bulan dari masa awal pendudukan Jepang. Jepang sendiri menyetujui pengibaran bendera merah putih hanya untuk memperoleh dukungan dari kaum nasionalis Ambon.

Pada akhir tahun 1942, rakyat Ambon baru menyadari perubahan politik Jepang. Jepang datang ke Ambon bukanlah seperti apa yang mereka propagandakan. Jepang datang ingin menguasai wilayah Ambon. Menyadari sikap Jepang yang ingin menguasai Ambon membuat hubungan antara rakyat Ambon dan Jepang menjadi buruk. Situasi yang buruk di Ambon tidak dihadapi dengan perlawanan senjata oleh kaum nasionalis Ambon. Mereka memilih langkah berdiplomasi menawarkan bantuan. Kaum nasionalis Ambon yang terdiri dari orang Islam dan Kristen Ambon membentuk panitia untuk menghadap tentara Jepang. Mereka menawarkan jasanya untuk menjadi penengah antara Jepang

⁷⁷ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 14.

⁷⁸ Richard Chauvel, *op.cit.*, hal. 189.

dengan rakyat Ambon. Mereka di antaranya adalah Pupella, Ot. Pattimaipau, Hamid bin Hamid, Moh. Abu Kasim, Ahmad Syukur dan dr. Tahitoe.⁷⁹ Melalui jasa mereka hubungan antara Jepang dan rakyat Ambon membaik. Rakyat Ambon memang mempercayai Pupella dan tokoh nasionalis lainnya, karena menurut mereka tanpa bantuan dari pemimpin-pemimpin nasionalis tersebut Jepang tidak dapat berbuat apapun.

Jepang mulai melarang pembentukan organisasi-organisasi pada saat itu. Hanya organisasi buatan Jepang yang diizinkan berdiri di Ambon. *Ambon Shu Seinendan* merupakan salah satu badan bentukan Jepang. Badan ini merupakan pusat pendidikan yang dapat disamakan dengan organisasi Pramuka. Jepang kembali memilih Pupella sebagai pemimpin umum, sedangkan untuk cabangnya di kota Ambon dipercayakan kepada dr. Siswoyo.⁸⁰ *Ambon Shu Seinendan* bertujuan untuk mengobarkan kembali semangat pemuda yang telah dipadamkan oleh Belanda. Melalui *Ambon Shu Seinendan* ini kaum nasionalis memberi kursus politik kepada mereka.⁸¹ Pada masa pendudukan Jepang, Pupella yang juga merupakan pendiri Balai Pendidikan terus mendapat kepercayaan Jepang. Hal ini juga disebabkan karena ia cukup berperan dalam kehidupan masyarakat Ambon, sehingga Jepang menempatkan Pupella pada posisi penting. Tujuannya adalah agar hubungan antara Jepang dan rakyat Ambon dapat tetap terjaga. Menyadari akan kepercayaan Jepang terhadap dirinya, Pupella malah memanfaatkan keadaan tersebut untuk berjuang mencapai kemerdekaan, ia juga dapat menugaskan perwira-perwira KNIL orang Indonesia yang berpikir nasionalis untuk pergi ke Jawa. Mereka ditugaskan untuk mencari kontak dengan kaum nasionalis di Jawa, karena Jawa merupakan pusat perjuangan bangsa Indonesia. Anggota KNIL tersebut adalah Kapten Kazeiger dan Letnan Didikartosmisa.⁸² Mereka berangkat dari Ambon menuju Surabaya. Ini menunjukkan bahwa di Ambon juga terdapat kaum nasionalis yang juga menginginkan Indonesia merdeka, sama seperti nasionalis-nasionalis di Jawa.

⁷⁹ R.Z Leirrisa, *Sejarah Sosial...*, *op.cit.*, hal 105.

⁸⁰ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 25

⁸¹ Richard Chauvel, "Ambon : Bukan ...", *op.cit.*, hal 247.

⁸² *Ibid.*

Ambon Hookokai merupakan salah satu organisasi yang didirikan Jepang di Ambon. Melalui organisasi buatan Jepang, tokoh-tokoh nasionalis Ambon bergabung di dalamnya dan hubungan antara orang-orang Kristen dan Jepang dapat diperbaiki. Dalam organisasi ini tokoh-tokoh nasionalis Ambon berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. *Ambon Hookokai* berdiri pada 8 Desember 1944. Pupella kembali dipercaya Jepang sebagai ketua dari *Ambon Hookokai*. Melalui organisasi ini, tujuan golongan nasionalis Ambon adalah untuk mengerahkan rakyat Ambon dan sumber daya alam serta mempersiapkan Indonesia merdeka.⁸³ Tujuan dari *Ambon Hookokai* ini sama dengan tujuan *Djawa Hookokai*. Tujuan dari *Djawa Hookokai*, antara lain :

- Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
- Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa.
- Memperkokoh pembelaan tanah air.⁸⁴

Dalam pertemuan-pertemuan *Ambon Hookokai*, Pupella membiasakan anggota-anggota *Ambon Hookokai* untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pertemuan serta mengibarkan bendera Merah Putih. Melalui *Ambon Hookokai* kaum nasionalis dapat mengetahui perkembangan di Pulau Jawa, berdasarkan informasi dari orang-orang Jepang. Pupella juga dapat mengetahui mengenai berita Perdana Menteri Koiso, yang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.⁸⁵ Melalui pejabat dari *Minseibu*, Okabe, diketahui bahwa Mr. Latuharhary mendapat tempat di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Dalam badan tersebut Mr. Latuharhary mewakili daerah Maluku. Peran Mr. Latuharhary di Jawa, khususnya di Jakarta cukup penting. Ia dipercaya Jepang untuk mengurus orang-orang Maluku di seluruh Jawa.⁸⁶ Mr. Latuharhari bersama dengan Dr. Johannes Leimena mendapat kepercayaan dari masyarakat yang berada di Maluku maupun di luar Maluku.

⁸³ Richard Chauvel, *Nasionalist Soldier...*, *op.cit.*, hal 191.

⁸⁴ Marwati Djoened P. dan Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hal. 22.

⁸⁵ Pernyataan tersebut dikenal dengan istilah “Janji Koiso”, dimana Koiso berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

⁸⁶ I.O. Nanulaitta, *Johannes Latuharhary, SH : Hasil Karya dan Pengabdiannya*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983), hal.100-101.

Mereka juga merupakan tokoh yang membalikkan kesan umum bahwa orang Maluku adalah kaki tangan Belanda.⁸⁷ Mendengar berita bahwa di pusat telah dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, maka kaum nasionalis Ambon membentuk suatu panitia yang menyerupai panitia di Jakarta. Panitia ini beranggotakan :

- E. U. Pupella, menangani urusan dalam negeri
- dr. D.P. Tahitoe, menangani urusan kesehatan
- W.J Lilipaly, menangani urusan pertanian
- Hamid bin Hamid, menangani urusan perekonomian
- Ot Pattimaipau, menangani urusan penerangan
- J. Litaay, menangani urusan keuangan
- C. A Rehatta, menangani urusan pertahanan dan keamanan
- Baeng Ohorella, menangani urusan sosial
- E. Pattiruhu, sebagai sekretaris.⁸⁸

Mereka sebelumnya pada masa kekuasaan Belanda pernah menjadi anggota *Sarekat Ambon* dan *Ambon Raad*. Panitia tersebut melakukan persiapan untuk mengambil alih tanggung jawab dari Jepang, namun sebelum rencana mereka terlaksana, ternyata Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Selama masa pendudukan Jepang, kaum nasionalis Ambon berjuang tanpa melakukan gencatan senjata. Kaum nasionalis Ambon memilih jalan bekerjasama dengan Jepang. Ini dikarenakan, kaum nasionalis Ambon menyadari akan kekuatan mereka yang jauh berbeda dengan Jepang dan kurangnya persenjataan yang dimiliki. Selain itu, wilayah Ambon merupakan wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang yang cukup ketat menjaga wilayah Indonesia Timur. Bahkan kehidupan perpolitikan di Indonesia Timur diawasi dan cukup ditekan sehingga tidak mendapat kebebasan. Itu pula yang menjadi alasan kaum nasionalis Ambon bersedia bekerjasama dengan Jepang, namun tetap berhati-hati, kaum nasionalis Ambon tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

⁸⁷ Steve Gaspersz, *et al.*, *Dr. Johannes Leimena : Negarawan Sejati dan Politisi Berhati Nurani*, (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2007), hal 192.

⁸⁸ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal 25-26

BAB 3

AMBON PASCA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT)

3.1 Proklamasi Kemerdekaan dan Kedatangan Sekutu dan Belanda

Pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki membuat hancur kedua kota tersebut. Kehancuran tersebut membuat Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada 14 Agustus 1945, kehancuran Jepang membuat kaum nasionalis di Jawa berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Latuharhary yang merupakan tokoh nasionalis Ambon di Jawa turut mendampingi Soekarno dan Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.⁸⁹ Proklamasi kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai awal kehidupan baru untuk rakyat Indonesia, dan harapannya adalah agar rakyat Ambon bergabung dan menjadi bagian Indonesia.

Berita proklamasi tersebut ternyata tidak dapat diketahui langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Di Ambon, Pupella mengetahui berita kemerdekaan tersebut dari *menseibu* yang bernama Mr. Okaba, dan bahwa Indonesia telah merdeka dan Mr. Latuharhary memiliki posisi yang bagus, yaitu Mr. Latuharhary dipercaya sebagai Gubernur Maluku.⁹⁰ Berita kemerdekaan dan perjuangan kaum nasionalis di Jawa memang hanya diketahui oleh para pejuang dan pemimpin-pemimpin nasionalis Ambon. Rakyat Ambon yang berada di desa-desa mengetahui tentang kemerdekaan Indonesia melalui tokoh-tokoh Ambon tersebut, namun mereka tidak mengerti mengenai perjuangan yang telah dilakukan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, maka disusunlah pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Pada 19 Agustus 1945 terbentuklah delapan propinsi yang dipimpin oleh gubernur. Delapan propinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatra, dan Yogyakarta.⁹¹ Untuk wilayah Maluku ditunjuk Mr. Johannes Latuharhary. Tidak

⁸⁹ I.O Nanulaitta, *op.cit.*, hal. 127.

⁹⁰ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 29.

⁹¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 98.

lama setelah proklamasi, pasukan Sekutu datang ke wilayah Indonesia pada Agustus 1942. Kedatangan tentara Sekutu menyebabkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia terlambat diketahui rakyat di Indonesia Timur. Selain kedatangan Sekutu, sulitnya perhubungan juga membuat mereka yang berada di Indonesia Timur tidak mengetahui mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta. Di Ambon, E.U Pupella memimpin pemerintahan sementara pasca kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan Mr. Latuharhary belum menempati posisinya di Maluku. Masyarakat Ambon pada saat itu mempercayai Pupella yang memegang kepemimpinan sementara di Ambon.

Kedatangan tentara Sekutu ke wilayah Indonesia Timur mengurangi perjuangan di Indonesia Timur. Ini juga menjadi penyebab Mr. Latuharhary tidak dapat menduduki posisinya di Maluku. Pada saat itu Mr. Latuharhary menetap di Jawa. Tugas Mr. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku pada saat itu hanya mengurus orang-orang Ambon yang berada di Jawa dan Sumatra, dan banyak di antaranya yang berada di Jawa dan Sumatra menjadi korban, karena dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Oleh karena itu orang-orang Ambon yang berada di Jawa dan Sumatra menginginkan kembali ke Maluku.⁹²

Secara *de jure* daerah Maluku sudah termasuk wilayah Negara Republik Indonesia, namun secara *de facto* daerah Maluku pada mulanya belum dapat dikuasai pemerintah RI beserta aparat-aparatnya.⁹³ Tentara Sekutu yang berada di Maluku bertugas antara lain untuk :

1. Membebaskan secepat mungkin tahanan perang (*Allied Prisoners of War and Internees* (APWI)).
2. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah dan mengirimkan mereka ke pelabuhan agar secepat mungkin dapat diberangkatkan ke Jepang.
3. Memelihara ketertiban hukum dan keamanan (*maintenance of law and order*) sehingga dapat diwujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan militer Inggris kepada pemerintahan sipil dari penguasa yang secara sah berkuasa di wilayah tersebut.⁹⁴

⁹² I.O Nanulitta, *op.cit.*, hal. 133.

⁹³ Sutrisno Kutoyo, *ed.*, *Sejarah Daerah Maluku*, *op.cit.*, hal. 87.

⁹⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal 4.

Di Ambon, tentara Inggris dibantu tentara Australia yang mewakili Sekutu. Pasukan Australia mendarat di Ambon pada Agustus 1945 di bawah pimpinan F.O Chilto menggantikan Brigadir Jendral Dougherty. Mereka bertugas menerima penyerahan tentara Jepang, melucuti senjata-senjata Jepang, serta mendorong Belanda untuk mengadakan pendekatan terhadap masyarakat Ambon.⁹⁵ Tentara Australia bertugas untuk wilayah Timur Besar dan Kalimantan. Markas Besar tentara Australia berada di Morotai. Kedatangan tentara Sekutu disambut gembira oleh rakyat Ambon yang merasa sengsara pada masa pendudukan Jepang karena sikap mereka yang pro Belanda. Sekutu pun menyerahkan pemerintahan sementara yang berada di Ambon dari Pupella kepada keluarga Gaspersz yang merupakan salah satu keluarga yang setia pada Belanda.⁹⁶ Pada saat itu kaum nasionalis memilih tidak menonjolkan diri dan lebih bersikap waspada, terutama terhadap para serdadu Ambon.

Kedatangan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) ke Ambon pada 1945, kembali menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat di Ambon. Kedatangan NICA disambut dengan gembira oleh rakyat Ambon yang terbiasa hidup dengan orang-orang Belanda. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak menginginkan kembalinya penjajahan, kedatangan NICA di Ambon tidak disambut dengan gembira. Ambon dipimpin oleh *Chief Conica* yang juga menjabat sebagai residen bernama Resident van Wijk. Sementara itu NICA menyebarkan propagandanya, bahwa di Jawa timbul suatu pemberontakan oleh gerombolan bernama “Merah Putih” dan menimbulkan kesan yang buruk.⁹⁷ Mereka pun membebaskan pasukan Belanda yang ditangkap oleh tentara Jepang.

Pada 1946, tentara Australia meninggalkan Ambon dan Belanda kembali menguasai Ambon. Belanda pun dengan cepat mengembalikan keadaan di Ambon. Bendera Belanda berkibar di seluruh Ambon dan kantor-kantor milik Belanda yang pada masa pendudukan Jepang ditutup, kembali beroperasi. Pupella yang sebelumnya ditangkap oleh NICA, kembali di bebaskan oleh Belanda. Residen van Wijk mengajak Pupella beserta dr. Tahitoe, J. Picauly, A.S Seharlawan, Imam Hatala, Hamid bin Hamid, dan Hong Bun Hiong bergabung

⁹⁵ G.A Ohorella, *op.cit.*, hal. 2.

⁹⁶ Richard Chauvel, “Ambon : Bukan ...”, *op.cit.*, hal. 249.

⁹⁷ R.Z Leirissa, *et.al.Sejarah Sosial ...*, *op.cit.*, hal. 107.

dalam Dewan Penasehat Residen (*Adviesraad*).⁹⁸ Pada saat itu diadakan perundingan antara Eliza Urbanus Pupella dan Residen van Wyck. Pupella ditawarkan bekerjasama untuk membangun kembali Ambon dari pendudukan Jepang. Pupella yang pada saat itu ditahan meminta agar dirinya dibebaskan terlebih dahulu. Setelah dibebaskan, ia menerima hasil perundingan tersebut, Pupella menyetujui kerjasama yang telah disepakati atas dasar sama rata.⁹⁹

Pupella juga menyadari bahwa kekuatan NICA lebih kuat dibandingkan kaum nasionalis Ambon sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap NICA. Setelah disetujuinya kerjasama tersebut, NICA membentuk Dewan Penasehat Residen dan memilih Pupella sebagai ketuanya. Kedekatan Pupella dengan rakyat Ambon membuat van Wyck menempatkan posisi Pupella sebagai pemimpin, yang memanfaatkan posisi ini dengan menempatkan tokoh-tokoh nasionalis di dalam dewan tersebut.

Keberadaan tentara NICA dan Belanda di Ambon memperlambat hubungan antara tokoh-tokoh nasionalis di Ambon dengan para pemimpin Republik yang berada di Jakarta. Mereka tidak mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang telah terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kaum nasionalis Ambon mulai membentuk laskar-laskar perjuangan rakyat .

3.2 Perjuangan Kaum Nasionalis Ambon Mempertahankan Kemerdekaan

Kaum nasionalis Ambon yang berada di Jakarta berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan di Maluku. Mereka yang tergabung dalam Perserikatan Pemoeda Ambon membentuk barisan yang aktif serta membantu barisan-barisan lainnya untuk membela dan mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia, mereka menyerukan :

1. Kami orang Ambon bertanah-air Indonesia;
2. Kami berdjoeng oentoek bersama-sama saedara-saedara lain golongan bangsa Indonesia oentoek membela dan mempertahankan Repoeblik Indonesia;
3. Kami tidak maoe soedara-soedara kena ditipoe moeslihat Belanda, maka dari itoe kami minta soepaja :
 - a. Djangan soedara-soedara dipakai sebagai alat Belanda;

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 108.

⁹⁹ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 31.

b. Bekas militer-militer Belanda almarhoem dan djoega jang sekarang bekerdja dalam tentara Belanda, djanganlah menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia; Ingat bahwa Repoeblik Indonesia mendjamin keselamatan Rakjat Indonesia pada oemoemnja dan golongan Ambon pada choesoesnja. Siapa antara saedara-saedara jang beloem dapat mengerti dan toeroet dengan tjita-tjita kita Indonesia-Ambon oentoek membentoeck Indonesia merdeka baiklah diam sadja asal djangan toeroet Belanda. Djika saedara-saedara tidak memperhatikan bahaja atas 30.000 djiwa orang Ambon di Djawa dan Madura.¹⁰⁰

Kaum nasionalis Ambon yang berada di Jawa memang secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Ini sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang berada di Ambon yang lebih memilih memanfaatkan institusi-institusi buatan Belanda untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kaum nasionalis Ambon yang berada di Jawa turut berusaha untuk membantu perjuangan di tanah kelahiran mereka. Pemuda-pemuda Ambon yang berada di Pulau Jawa melakukan ekspansi ke Maluku pada Maret 1946. Ekspedisi ini bertujuan untuk mendirikan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Maluku yang belum dapat dihubungi oleh Ibukota.¹⁰¹ Ekspedisi yang dilakukan pemuda-pemuda Ambon ini dikenal dengan nama Ekspedisi Merah Putih. Mereka membatu perjuangan para kaum nasionalis Ambon yang berada di Maluku.

Pada Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Laut Jawa Tengah menyiapkan dua kapal kayu *type* Kiri Maru yang berukuran 60 ton, yakni *Sindoro* dan *Semeru*.¹⁰² Ekspedisi ini terbagi menjadi dua rombongan. *Kapal Semeru* dipimpin oleh Muljadi bersama dengan Bram Matulesy, J Tahalia, M. Manuputty, Martin Abbas, John Hattu, J. Polnaya, B. Tapilatu, J. Lisapali dan Isbianto menuju Maluku Utara. *Kapal Sindoro* dipimpin Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso bersama Andries Latupeirissa, Anna Luhukay, Karel Salem, A. Hetaria, Noya, D. Pattinasarany, Lilipaly, Sahuleka, Papilaya, Jusuf dan Isbiyanto menuju Maluku Selatan.¹⁰³ Ekspedisi ini dimulai pada 3 Maret 1946. Untuk mencapai Maluku, mereka memilih jalur Kalimantan, Pulau Selajar, dan berakhir di

¹⁰⁰ Leu Lususina (pseud. P. de Queljoe), *Ambon Selayang Pandang*, (Jakarta, 1950), hal. 16, dikutip oleh R.Z Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1975), hal. 104

¹⁰¹ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 116

¹⁰² Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, (Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hal. 56.

¹⁰³ Tim Penulis, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*, (Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah Tradisi dan TNI, 2000), hal. 134.

Maluku. Langkah ini diambil untuk menghindari patroli laut tentara Belanda. Banyak hambatan yang dialami mulai dari serangan badai, kerusakan mesin, kekurangan logistik, hingga intaian dari pihak Belanda.

Rombongan *Kapal Sindoro* mengawali dari Jazirah Hitu, dimulai dari desa Negeri Lima, Said, lalu Kaitetu, Hila, Wakal. Di wilayah tersebut mereka tidak mendapat halangan, dan tidak terdapat tentara NICA, karena mayoritas mereka beragama Islam, sehingga mudah diterima. Perlawanan baru mereka dapat ketika memasuki wilayah Hitu, dimana mereka mendapat perlawanan dari tentara KNIL. Perjuangan kaum nasionalis Ambon terus berlangsung hingga Belanda mengirimkan tentaranya pada 10 April 1946, hal ini mengakibatkan para pemuda terpencar dan ditangkap, seperti Papilaya, Achmad bin Thalib, Djamaluddin Mahulette.¹⁰⁴ Mereka di bawa ke Ambon oleh tentara Belanda.

Perjuangan kaum nasionalis Ambon yang berasal dari Pulau Jawa memberi semangat pada kaum nasionalis di Ambon agar mereka mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekuat tenaga. Untuk itu mereka membentuk laskar-laskar perjuangan dan organisasi di Ambon. Para pemuda Ambon membentuk Pemuda Republik Indonesia Maluku (PRIMA) pada Maret 1946 yang dipimpin oleh Abdul Kadir Tuakia. Ia berasal dari Negeri Pelauw di Pulau Haruku. Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi anggota *heiho* di Sulawesi Selatan.¹⁰⁵ Pada 30 April 1946, PRIMA menghalangi perayaan hari lahir Ratu Juliana di kota Ambon, akibatnya banyak anggota PRIMA yang ditangkap, kecuali Abdulmanaf Latuconsina wakil pimpinan, yang berhasil lolos. Perlawanan dengan senjata menyebabkan banyak korban jatuh. Namun, persenjataan yang kurang dan jumlah pasukan yang tidak sebanding dengan Belanda dan KNIL membuat mereka mengalami kekalahan. Oleh karena itu, Pupella dan kaum nasionalis Ambon lainnya memilih bekerjasama dengan Belanda dengan berdiplomasi dan dalam lembaga parlementer, dan tetap bercita-cita mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kondisi dan situasi politik yang berbeda dengan Jawa dan Sumatra, membuat para tokoh nasionalis Ambon memilih jalan diplomasi dan parlementer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan alasan antara lain :

¹⁰⁴ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 145.

¹⁰⁵ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 34.

1. Sikap sebagian rakyat Ambon yang sangat menentang Jepang karena tindakan-tindakan sadis selama masa kekuasaannya dan sikap pro Sekutu terutama Belanda, sangat sukar diajak membela proklamasi kemerdekaan.
2. Sikap golongan, pimpinan tradisional seperti para raja patih yang tergabung dalam *Regenten Bond*, para pensiunan KNIL yang bergabung dalam BIGM (*Bond van Inheemse Gepensioneerde Militairen*) dan guru-guru pegawai Belanda, merupakan kelompok-kelompok sosial yang sangat berpihak pada Belanda.
3. Tidak cukup kepandaian pemuda-pemuda pergerakan di bidang kemiliteran dan kurangnya persenjataan jika dihadapkan pada KNIL yang serentak telah didaftarkan kembali oleh NICA untuk dinas militer aktif.
4. Akan terjadi aksi-aksi sosial yang mendalam antara golongan keagamaan nantinya yang sukar untuk diperbaiki kelak jika terjadi kles bersenjata.¹⁰⁶

Langkah awal yang mereka ambil dengan membentuk organisasi politik di Ambon.

Partai Indonesia Merdeka (PIM) adalah organisasi politik yang berdiri pada 17 Agustus 1946. PIM beranggotakan orang-orang Ambon yang sadar akan kewajibannya terhadap tanah dan bangsa Indonesia. Mereka sadar akan maksud dari pemerintah Belanda. Mereka mengejar cita-cita Indonesia merdeka dengan mengambil kesempatan dalam bekerjasama dengan pemerintah Belanda.¹⁰⁷ PIM pada dasarnya adalah kelanjutan dari Sarekat Ambon yang memihak kepada Indonesia yang mengusahakan suatu Indonesia merdeka atas dasar satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa melalui cara-cara yang sah menurut hukum, yaitu melalui dukungan terhadap pemerintahan Belanda di Ambon dalam kebijakannya.¹⁰⁸

PIM banyak mendapat dukungan dari masyarakat Ambon, terutama masyarakat Islam. Anggota dari PIM Ambon adalah mereka yang telah bekerjasama dalam *Sarekat Ambon*, Balai Pendidikan dan pada masa pendudukan Jepang serta tokoh-tokoh yang berada di belakang organisasi-organisasi

¹⁰⁶ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 46.

¹⁰⁷ Hasil Rapat Umum Pertama Partai Indonesia Merdeka dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 28 September 1946, hal. 3.

¹⁰⁸ Richard Chauvel, *Nasionalist Soldier ...*, *op.cit.*, hal. 221.

kepemudaan. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya E.U Pupella, Tjokro, Ot. Pattimaipau, S. Bahmid, Hamid bin Hamid, M.K Soulissa, Wim Reawaru, M.T Hentihu, Moh. Abu Kasim dan Bitek Sutan Tjaniago.¹⁰⁹ Perjuangan Partai Indonesia Merdeka Ambon untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan kampanye dan rapat raksasa di Kota Ambon. Di setiap rapat umum di Kota Ambon dan Saparua, Merah Putih dikibarkan dan terpasang gambar Sukarno dan Hatta sebagai pemimpin bangsa.¹¹⁰

Perjuangan golongan nasionalis yang telah bergabung dalam Partai Indonesia Merdeka, tentunya mendapat hambatan. Hambatan itu tidak hanya datang dari pasukan Belanda tetapi juga dari kalangan rakyat Ambon sendiri. Tokoh-tokoh Ambon yang masih setia terhadap Belanda bergabung membentuk Gabungan Sembilan Serangkai (GSS) yang dipimpin oleh Dolf Metekohy yang dibantu oleh Niegelyn Nikijuluw dan L Tupanela, yaitu raja dari Halong.¹¹¹

3.3 Pembentukan Negara Indonesia Timur

Pihak Belanda diuntungkan dengan keadaan ini dan memanfaatkannya dengan mengkonsolidasikan kedudukannya di Indonesia Timur. Pada April 1946, Van Mook berusaha untuk mengambil langkah politik di wilayah Indonesia Timur. Langkah ini sebagai suatu bentuk akibat dari kegagalan dari politik pemerintah Belanda dengan Indonesia dalam memperoleh penyelesaian masalah Indonesia. Van Mook berusaha untuk mengadakan pertemuan antar daerah di wilayah Indonesia Timur. Dibantu oleh Dr. W Hoven yang merupakan seorang direktur pemerintahan dalam negeri, mereka mulai mendekati tokoh-tokoh politik di Indonesia Timur. Tujuan van Mook adalah untuk menyusun suatu bentuk ketatanegaraan baru sesuai politik pemerintah Belanda, di antaranya :

1. Akan diadakan suatu *commonwealth* Indonesia, sekutu dalam kerajaan.
2. Akan diadakan kewarganegaraan Indonesia untuk semua orang yang dilahirkan di Indonesia.

¹⁰⁹ Ustman Thalib, "Ambon Di Masa Revolusi Percaturan Politik Antara Kelompok Pro dan Kontra RI 1946-1949", (Tesis Magister, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 1998), hal. 95.

¹¹⁰ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 47.

¹¹¹ *Ibid.*

3. Urusan dalam negeri Indonesia akan diurus dengan badan-badan Indonesia.
4. Anggaran dasar negara akan menjamin hak-hak asasi, seperti kemerdekaan, beragama, pendidikan dan sebagainya.¹¹²

Semua ini dilakukan Belanda untuk mencari simpati masyarakat Indonesia Timur. Pada kenyataannya, tujuan Van Mook yang sebenarnya berencana membuat Negara Indonesia Timur (NIT). Pembentukan NIT ini dimaksudkan untuk menentang negara kesatuan yang dipelopori oleh Republik Indonesia.¹¹³

Untuk menjalankan rencananya Van Mook memilih tempat di pegunungan Lompobatang di Sulawesi Selatan sebagai tempat pertemuan dengan tokoh-tokoh daerah di Indonesia Timur. Tempat tersebut bernama Malino di daerah Bugis. Alasan Van Mook memilih tempat tersebut karena ia ingin menunjukkan pentingnya arti kedudukan Sulawesi Selatan dalam hubungannya dengan Kalimantan dan daerah-daerah lainnya. Makassar pada saat itu juga merupakan pusat ekonomi untuk wilayah Indonesia bagian Timur dan bandar besar dengan jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia.

Konferensi ini dimulai pada 16 Juli 1946 dengan dihadiri oleh utusan-utusan daerah di Indonesia Timur, dari :

- Kalimantan Barat
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sangehe dan Talaud
- Maluku Utara
- Maluku Selatan
- Irian Jaya
- Tanibar, Kep. Kei dan Aru, Kep. Barat Daya

¹¹² Mereka berencana untuk mengadakan muktamar besar untuk meminta bantuan susunan pemerintahan dalam rangka susunan ketatanegaraan yang baru di Indonesia. Lihat : Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal. 93-95.

¹¹³ Tim Penulis, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953), hal. 75.

- Bali
- Lombok
- Sumbawa
- Sumba
- Flores
- Timor

Alasan yang mendorong para wakil Indonesia Timur menghadiri Konferensi Malino adalah keinginan mereka untuk mewujudkan suatu gagasan politik dengan jalan berdialog dengan pihak Belanda dan memperhatikan perkembangan politik setempat guna menghindari kekacauan di wilayah tersebut.¹¹⁴

Para utusan yang menghadiri Konferensi Malino merupakan orang-orang pilihan Belanda, termasuk di wilayah Maluku Selatan dengan mengutus dr. Tahitu, D.P Metakohy, dan J.M Tupenalay, dan Kapten J. Tahya. D.P Metakohy merupakan salah satu tokoh Ambon yang sangat setia pada pemerintah Belanda. Mereka mengusulkan pembentukan suatu *Gemeenebest Molukken* (Persemakmuran Maluku) yang terdiri dari Maluku Utara, Maluku Selatan, dan Irian Barat.¹¹⁵ Gagasan ini tidak memperoleh tanggapan dalam konferensi. Van Mook pun tidak menanggapi gagasan tersebut, karena tujuan van Mook adalah membentuk pemerintahan federal di Indonesia.

Mengetahui dari hasil konferensi tersebut, kaum nasionalis di Ambon membentuk satu alat politik untuk memperjuangkan kepentingan politik RI di Maluku. Maka, pada 17 Agustus 1946 dibentuk partai politik yang dinamakan Partai Indonesia Merdeka (PIM). Anggota PIM sebagian besar merupakan tokoh-tokoh *Sarekat Ambon*, *Ambon Hookokai*, yang berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka di antaranya adalah E.U Pupella, Ot Pattimaipau, Hamid bin Hamid, Wim Reawaru, Tjokro A., S. Bahmid, M.K Soulissa, Moh. Abu Kasim, Bitek Sutan Tjaniago dan M.T Hentihu.¹¹⁶

Langkah yang mereka tempuh seperti yang diungkapkan dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, adalah tidak akan mengikuti cara Jepang yang cepat dan yang membenci bangsa lain terutama yang berbeda kulit (Eropa). Itu pula yang

¹¹⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara...*, *op.cit.*, hal. 170.

¹¹⁵ Richard Chauvel, "Ambon Bukan ...", *op.cit.*, hal 249.

¹¹⁶ Usman Thalib, *op.cit.*, hal. 95.

menyebabkan kaum nasionalis Ambon lebih memilih untuk bekerjasama dengan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan di Ambon.

Konferensi Malino tersebut, membentuk dewan-dewan untuk mewakili tiap-tiap daerah di Indonesia Timur, yaitu diantaranya Dewan Sulawesi Selatan, Dewan Maluku Utara, Dewan Maluku Selatan (DMS) dan sebagainya. Dewan Maluku Selatan bertugas mewakili Maluku Selatan di Konferensi Denpasar.¹¹⁷ Dewan Maluku Selatan pada mulanya merupakan usul para anggota *adviesraad* yang menginginkan pembentukan suatu dewan yang lebih besar berdasarkan pemilihan dan Belanda bersedia menjadi sponsor pemilihan tersebut. Adapun yang mengikuti pemilihan dewan tersebut adalah PIM Ambon, para raja, pendeta dan kaum veteran yang tergabung dalam Sembilan Serangkai, dan beberapa calon independen seperti dr. Tahitoe dan Wairisal.

Dalam pemilihan yang dilaksanakan pada awal November 1946 tersebut PIM memperoleh suara terbanyak karena mendapat dukungan dari masyarakat Islam Ambon. PIM memperoleh empat kursi dan dua kursi diperoleh Sembilan Serangkai, dan sisanya diperoleh dr. Tahitoe.¹¹⁸ Para anggota DMS antara lain dr. D.P Tahitoe yang merupakan seorang dokter, E.U Pupella yang merupakan seorang guru, W. Reawaru, Tjokro, M.K Soulisa wakil dari PIM Ambon, dan D.J Gaspers, A. Pelu dari Sembilan Serangkai.¹¹⁹

Konferensi Malino menghasilkan beberapa resolusi, di antaranya adalah :

1. persetujuan pembentukan sebuah negara federal dalam wilayah RI
2. memutuskan untuk membangun kembali ketatanegaraan Hindia Belanda sebagai suatu keseluruhan dari Indonesia seluruhnya meliputi federasi (Negara Indonesia Serikat).¹²⁰

Menurut van Mook, hanya dengan bersatunya seluruh Indonesia dalam bentuk federal yang dapat menjamin tercapainya penentuan nasib sendiri sehingga dapat menciptakan perekonomian yang kuat.¹²¹ Negara federasi juga menjamin kehidupan-kehidupan dari segenap golongan sehingga dapat ditempatkan pada

¹¹⁷ Anggota-anggota Dewan Maloekoe Selatan dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 20 November 1946, hal. 1.

¹¹⁸ G.A Ohorella, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 20.

¹¹⁹ *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, *loc.cit.*, hal. 1.

¹²⁰ Tim Penulis, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, *op.cit.*, hal. 81.

¹²¹ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara ...*, *op.cit.*, hal. 104.

bagian tugas yang tepat antara pemerintah pusat di satu pihak dan daerah-daerah di lain pihak.

Adapun harapan dari wilayah-wilayah di Indonesia Timur untuk NIT yang baru terbentuk adalah :

1. Indonesia Timur menghendaki posisi di samping Republik dan bukan di bawah Jawa dan Sumatra.
2. Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk terdiri dari Jawa, Sumatra, Timur Besar dan Kalimantan dengan suatu syarat bahwa mengingat keputusan-keputusan yang diambil di daerah-daerah yang bersangkutan dan mandat wakil-wakil daerah tersebut.¹²²

Mereka menginginkan persamaan, penghargaan yang sama dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya seperti Jawa dan Sumatra. Konferensi Malino tidak memperoleh sambutan dari Republik Indonesia. Media massa Republik Indonesia mencela prakarsa Belanda dalam Konferensi Malino. Belanda dianggap mencari dukungan dari tokoh-tokoh di luar daerah kekuasaan Indonesia.¹²³

Usaha Belanda dalam Konferensi Malino dapat dikatakan berhasil. Keinginan van Mook membentuk negara federal mendapat dukungan dari para peserta konferensi. Komposisi keanggotaan Konferensi Malino memang terdiri dari wakil-wakil daerah yang merupakan kepala swapraja dan himpunan masyarakat adat yang telah lama bekerjasama dengan pemerintah Belanda.¹²⁴ Akan tetapi, di dalamnya juga terdapat tokoh-tokoh nasionalis yang bersimpati terhadap Republik.

Konferensi Denpasar merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi yang berlangsung mulai 7 Desember 1946 – 24 Desember 1946 membicarakan rencana pembentukan ketatanegaraan NIT. Sebanyak 55 perwakilan dari 13 daerah menjadi peserta konferensi. Setiap daerah mengirim utusannya melalui pemilihan yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah, diantaranya Sulawesi Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangehe dan Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Bali, Lombok, Timor,

¹²² Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal. 113-117.

¹²³ *Ibid.*, hal. 107.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 119.

Flores, Sumba dan Sumbawa.¹²⁵ Melalui dewan perwakilannya, tiap-tiap daerah mengirim utusannya untuk Konferensi Denpasar. Kaum nasionalis Ambon yang tergabung dalam DMS mulai melakukan perannya. Mereka mewakili DMS untuk menghadiri Konferensi Denpasar. Dari Maluku Selatan yang diutus oleh DMS adalah dr. Tahitoe dan E.U Pupella, sedangkan Matekohy dan Tahija dipilih oleh pemerintah Belanda.¹²⁶ Bila melihat utusan-utusan yang hadir dalam konferensi dapat disimpulkan bahwa tidak semua utusan daerah tersebut mendukung kebijakan Belanda. Yang mendukung Republik di antaranya wakil dari Sulawesi Selatan, Mr. Tadjoeddin Noor dan Mohammad Akib, wakil dari Maluku Selatan Pupella, wakil dari Bali, Goesti Bagoes Oke, dan yang lainnya.¹²⁷ Keberadaan mereka membuktikan bahwa tidak semua peserta konferensi adalah kaki tangan Belanda. Walaupun, jumlah mereka sedikit namun di tiap daerah terdapat wakilnya yang mendukung Republik Indonesia.

Konferensi Denpasar dimulai dengan rapat informal. Hal ini dilakukan untuk menunggu kedatangan van Mook. Rapat informal ini berlangsung sebanyak tiga kali. Rapat informal pertama dipimpin oleh Dr. W. Hove. Rapat tersebut membahas mengenai susunan ketatanegaraan. Rapat kedua dan ketiga dilaksanakan pada 9 dan 11 Desember 1946 yang dipimpin Wakil Komisaris Pemerintahan Umum, C.H.J.R de Wall.¹²⁸ Van Mook baru berada di Denpasar pada 17 Desember 1946.

Dalam Konferensi Denpasar, timbul beberapa pendapat dari utusan-utusan daerah. Menurut mereka yang menjadi dasar untuk Konferensi Denpasar bukanlah Malino, melainkan Linggajati. Penerimaan Persetujuan Linggajati oleh kedua belah pihak merupakan salah satu syarat mutlak untuk pembentukan Negara Indonesia Timur. Mereka menginginkan posisi yang sederajat dengan Republik, seperti Maklumat Komisi Jendral dan para wakil Indonesia Timur, yaitu :

“... bahwa daerah-daerah ini dalam tempo yang sependek-pendeknya, ketika atau segera setelah Mu'tamar Denpasar akan harus dapat memebentuk dirinya menjadi negara-negara yang berorganisasi dan berkekuasaan sedemikian rupa, sehingga negara-negara tersebut

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 124-125.

¹²⁶ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 140.

¹²⁷ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit.*, hal. 150.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 139.

dapat mengambil tempat sungguh-sungguh yang sederajat dengan Republik dalam Negara Indonesia Serikat yang direncanakan...¹²⁹

Ketika Konferensi Denpasar sedang berlangsung, pada 20 Desember 1946 Persetujuan Linggajati disahkan oleh parlemen Belanda.

Melalui Konferensi Denpasar, NIT secara resmi berdiri. Terbentuknya NIT disahkan pada awal 1947. Tjokorde Gde Rake Soekawati terpilih sebagai Presiden NIT dan Nadjamuddin Daeng Malewa sebagai Perdana Menteri. Tjokorde Gde Rake Soekawati merupakan tokoh yang pro terhadap Belanda. Ia bersedia bekerjasama dengan Belanda yang dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam proses pembangunan Indonesia. Makassar dipilih sebagai Ibukota dari NIT. Semua peserta Konferensi Denpasar menerima hasil keputusan tersebut. Tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang diwakili oleh DMS menerima hasil keputusan konferensi. Mereka memilih untuk tidak menentang Belanda. Mereka menyadari apabila mereka melawan Belanda maka akan merugikan perjuangan mereka selama itu, oleh karenanya, mereka memutuskan agar Ambon menjadi bagian dari NIT dan di parlemen NIT mereka akan terus melanjutkan perjuangan mereka. Pupella tokoh pendukung Republik juga menerima hasil konferensi. Pupella mengira bahwa Konferensi Denpasar sesuai dengan hasil persetujuan Linggajati. Namun, hasil Persetujuan Linggajati dilanggar oleh pemerintah Belanda sendiri.

Pemerintah Indonesia pada mulanya tidak mengakui berdirinya Negara Indonesia Timur. Dalam pembentukan Negara Indonesia Timur, pemerintah Belanda tidak mengikut sertakan Republik Indonesia. Pada saat berlangsungnya Konferensi Malino dan Denpasar, pihak Republik Indonesia dan Belanda juga sedang melaksanakan Perundingan Linggajati. Pada Perundingan Linggajati pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan Belanda di wakili oleh Schermerhorn. Republik Indonesia mengakui keberadaan NIT setelah diterima Persetujuan Linggajati oleh kedua belah pihak. Republik Indonesia berharap dengan diakuinya NIT, maka NIT dan Republik Indonesia dapat bersatu dalam perjuangan. Republik Indonesia pun siap bekerjasama dengan NIT untuk membangun Negara

¹²⁹ Tim Penulis, *Republik Indonesia....*, *op.cit.*, hal. 94.

Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan Persetujuan Linggajati.¹³⁰

Hubungan antara Republik Indonesia dan NIT membaik pada saat Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung, pada akhir Desember 1947. Ide Anak Agung Gde Agung mengarah kepada kerjasama nasional. NIT bekerjasama dengan Republik Indonesia. Langkah ini membuat hubungan antara Republik Indonesia dan NIT membaik. Utusan dari pemerintah Republik Indonesia, Mr. Latuharhary dan Hermani menyerahkan pengakuan kepada NIT. Isi Maklumat tersebut adalah :

1. Pada saat ini pergerakan nasional telah sedemikian majunya, sehingga Negara Indonesia Timur telah mampu membentuk negara sendiri dengan sarana-sarana kenegaraan untuk meneruskan cita-cita menuju Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan demokratis.
2. Baik di Republik, maupun di Negara Indonesia Timur rakyat dan pemerintah nasional harus giat bekerja untuk menyempurnakan cita-cita ini yang pertamanya berarti penyempurnaan sarana-sarana kenegaraan dan negara itu sendiri untuk mewujudkan sebuah tanah air yang makmur dan aman.
3. Di dalam keadaan sekarang Pemerintah Republik dan rakyatnya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Nasional dan rakyat Negara Indonesia Timur untuk mewujudkan segera cita-cita rakyat Indonesia.
4. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Republik mengakui Negara Indonesia Timur sebagai negara bagian Negara Indonesia Serikat
5. Republik mengusulkan kepada pemerintah dan rakyat Negara Indonesia Timur untuk bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama rakyat seluruh Indonesia.¹³¹

3.4 Peran Kaum Nasionalis Ambon di Negara Indonesia Timur

NIT merupakan hasil upaya Letnan Gubernur Jendral van Mook. Hal ini dilakukan untuk melemahkan kekuatan RI di luar pulau Jawa. Setelah terbentuk, maka dibuatlah aparatur negara, seperti presiden, kabinet, badan administrasi, dan

¹³⁰ Achirnja Repoeblik Maoe Djuga Mengakoei NIT Pembangunan Oemoem Akan Segera di Moelai dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 8 Juli 1947, hal. 1.

¹³¹ Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1983), hal. 173.

parlemen,¹³² namun, kekuasaan sepenuhnya atas NIT dipegang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari bendera dan lagu kebangsaan Negara Indonesia Timur adalah milik Belanda, yaitu benderanya berwarna merah-putih-biru dan lagu kebangsaan Wilhelmus.¹³³

Pada April 1947 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Dewan ini tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan oleh dewan-dewan daerah, seperti DMS, Dewan Maluku Utara, Dewan Sulawesi Selatan, dan sebagainya.¹³⁴ Pada pemilihan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, J. Tahija wakil dari Maluku Selatan mencalonkan diri menjadi ketua bersama dengan Tadjoeeddin Noor dan Mr. S. Binol dari Sulawesi Selatan. Pada pemilihan tersebut, Tadjoeeddin Noor terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Tadjoeeddin mewakili kaum nasionalis yang berpihak pada Republik. Menurutnya Indonesia Timur tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Adapun wakil dari Maluku Selatan yang terpilih sebagai anggota Dewan adalah E.U Pupella, J. Tahija, dan dr. Tahitoe.

Melalui dewan ini, kaum nasionalis memanfaatkan untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Di dalam dewan ini sering terjadi pertentangan antara golongan nasionalis yang mendukung Republik Indonesia dengan golongan federal. Salah satunya mengenai pengajuan Bendera Merah Putih. Hal ini terus menjadi pertentangan hingga pada akhirnya NIT tidak memiliki bendera dan lagu kebangsaan sendiri.¹³⁵ Dalam masalah ini, Pupella tidak menyetujui Merah putih digunakan sebagai bendera NIT, karena menurutnya Merah Putih adalah bendera Republik Indonesia seluruhnya, seperti dalam pidatonya dalam Dewan Perwakilan Rakyat NIT :

“... Partai Indonesia Merdeka menolak dengan setegas-tegasnja bendera merah putih jang mengandoeng makna perampokan, pemboenoehan, pentjoelikan, kakedjaman dan lain-lain sebagainja. Akan tetapi, partai kami tetap perdjoeangkan dan pertahankan dengan sekeras-kerasnja Sang Merah Putih jang ada lambang kesoetjian, kemoeliaan, kebesaran dan persatoean tjita-tjita bangsa dan tanah air Indonesia seloeroehnja...”¹³⁶

Pertentangan di dalam parlemen terus berlanjut yang mengakibatkan terbentuknya fraksi-fraksi di dalam parlemen NIT. Terdapat tiga fraksi di dalam

¹³² R.Z Leirissa, *loc.cit.*, hal. 31.

¹³³ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 143.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 142.

¹³⁵ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara ...*, *op.cit.*, hal.143.

¹³⁶ Harapan Dibalik Penjelasan dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 13 Desember 1947, hal. 1.

parlemen NIT tersebut. *Pertama*, Fraksi progresif yang diketuai oleh Arnold Mononutu yang bertujuan membentuk negara serikat sesuai dengan Perjanjian Linggajati dan memperjuangkan kemakmuran di Indonesia Timur. *Kedua*, Fraksi Nasional yang hanya memusatkan perhatiannya pada Indonesia Timur. *Ketiga*, Fraksi Demokrat yang menginginkan terbentuknya negara federal dan menginginkan ikatan yang lebih dekat dengan Belanda.¹³⁷ Kelompok nasionalis dalam parlemen NIT tergabung dalam Fraksi Progresif. Salah satunya tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang ada di dalam parlemen NIT memilih bergabung dengan fraksi tersebut. Hal serupa juga terjadi di dalam DMS, yang juga terbagi menjadi tiga fraksi, yaitu Fraksi Progresif, Fraksi Nasional, dan Fraksi Demokrat.

Kemenangan PIM dalam pemilihan DMS, membuat rakyat Ambon terbagi menjadi dua. Rakyat Ambon yang mendukung PIM berdiri mendukung Republik Indonesia dan Rakyat Ambon yang pro Belanda menginginkan Ambon berdiri sendiri di bawah Belanda.¹³⁸ Melalui rapat DMS, sebanyak 27 anggota dari 33 orang menyatakan Maluku Selatan untuk sementara tinggal di dalam NIT dan sisanya abstain.¹³⁹ Akan tetapi jika keinginan-keinginan rakyat Ambon tidak terpenuhi, maka Maluku Selatan akan keluar dari NIT. Perbaikan perekonomian merupakan tujuan utama Maluku Selatan bergabung dengan NIT. Pada masa kekuasaan Belanda hingga pendudukan Jepang masalah perekonomian merupakan masalah utama daerah-daerah di Indonesia Timur.

Meskipun kaum nasionalis yang berada dalam Dewan Maluku Selatan memilih bergabung dengan Negara Indonesia Timur, namun mereka tetap berjuang untuk Republik. Seperti, yang dikutip dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon* : "...segolongan ketjil seperti golongan di Ambon ini bermati-matian beroesaha oentoek mempersatoekan diri dengan Repoeblik Indonesia di bawah sang merah putih...Hanya dalam negara kesatoeanlah noesa dan bangsa dapat ma'moer..."¹⁴⁰

¹³⁷ R. Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 141-142.

¹³⁸ Negara Indonesia Timoer dan Maloekoe Selatan dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 25 Maret 1947, hal. 1.

¹³⁹ Richard Chauvel, "Ambon : Bukan...", *op.cit.*, hal. 253.

¹⁴⁰ Negara Kesatoean Merah Poetih dan Indonesia Raja dalam *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 12 Juni 1947, hal. 1.

Tokoh-tokoh nasionalis dalam DMS yang telah memutuskan bahwa Maluku Selatan menjadi bagian NIT merubah kehidupan rakyat Ambon. Di Ambon yang pada mulanya dipimpin oleh orang-orang yang setia terhadap Belanda menjadi didominasi oleh tokoh-tokoh nasionalis Ambon. Ini juga yang menyebabkan orang-orang yang setia terhadap Belanda tidak memiliki peran dalam NIT. Orang-orang yang setia ini akhirnya membentuk Gabungan Sembilan Serangkai (GSS) dan para anggotanya berasal dari *Regentbond*, *Volksbond*, *Inlandsleeraarsbond*, *Guru Jemaatbond*, pensiunan militer, anggota militer Ambon, dan sebagainya.¹⁴¹ Keadaan mereka semakin terdesak oleh Partai Indonesia Merdeka yang mendominasi di Dewan Maluku Selatan.

GSS mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri NIT untuk membubarkan DMS, karena tidak mencerminkan keinginan rakyat Ambon. DMS pada akhirnya dibubarkan dan dilakukan pemilihan kembali secara langsung. Dalam pemilihan ini GSS dibantu oleh Belanda melakukan propaganda terhadap rakyat Ambon. Mereka menyebarkan berita bahwa apabila merah putih menang, maka Ambon akan dijajah oleh orang-orang Jawa. Melihat tindakan tersebut, Pupella dan tokoh nasionalis Ambon lainnya dalam PIM tidak tinggal diam. Pupella tidak melakukan penyerangan dengan kekerasan melainkan melalui tulisan dalam *Surat Kabar Masa* milik kaum nasionalis.¹⁴² Mereka sadar bahwa yang mereka hadapi bukan hanya GSS, tetapi juga Belanda. Ternyata, kaum nasionalis yang tergabung dalam PIM kembali memenangkan pemilihan tersebut. Terpilihlah E.U Pupella, A. Wairissal, dan A.B Latuconsina untuk mewakili Maluku Selatan dalam parlemen NIT. Mereka merupakan tokoh nasionalis Ambon. E.U Pupella kembali menjadi ketua DMS yang baru dan A. Wairissal menjadi wakil di DMS.¹⁴³ Usaha kelompok GSS tidak berhasil menjatuhkan golongan nasionalis Ambon. Langkah kaum nasionalis Ambon mempertahankan posisi mereka tanpa harus melakukan kontak senjata memperoleh keberhasilan. Ini juga yang membuktikan bahwa politik separatisme pada saat itu yang ingin memisahkan Maluku Selatan dari kesatuan bangsa Indonesia tidak mendapat

¹⁴¹ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 146.

¹⁴² John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 49.

¹⁴³ *Ibid.*

dukungan dari rakyat Ambon. Perjuangan kaum nasionalis makin gigih ketika mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang berada di Jawa.

Diangkatnya Ide Anak Agung Gde Agung menggantikan Warrouw, diterima dengan gembira oleh kaum nasionalis. Mereka berharap dengan tersusunnya kabinet baru tersebut, khususnya NIT dapat lebih maju dan pada umumnya Indonesia. Pada masa Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung, Pupella adalah sebagai salah satu anggota kaum nasionalis dalam NIT, Ia mengajukan usul agar parlemen NIT mengirim utusannya secara resmi untuk meninjau keadaan di daerah Republik Indonesia. Usul ini diterima, maka diutuslah Mr. A.M. Pelupessy sebagai wakil resmi NIT di Jakarta dan Tahija menjadi wakil soal-soal politik. Mereka berjuang untuk penggabungan dengan Republik Indonesia secara federal.¹⁴⁴ Dalam parlemen NIT, golongan nasionalis Ambon mengajukan Manuhuttu sebagai Kepala Daerah Maluku Selatan dengan berpangkat residen. Usaha mereka pun berhasil, Manuhuttu menjadi Kepala Daerah di Maluku Selatan.¹⁴⁵ Melalui NIT ini mereka tetap melanjutkan perjuangan mereka di dalam parlemen, dan satu persatu dapat menunjukkan hasil. Pada saat itu, keputusan mereka untuk berjuang melalui parlemen cukup tepat. Mereka mengetahui bahwa kekuatan yang mereka hadapi tidaklah sebanding dengan kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi, dengan mengikuti alur yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda, perjuangan mereka dapat memberikan hasil.

¹⁴⁴ R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 147.

¹⁴⁵ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 50.

BAB 4

MASUKNYA AMBON MENJADI BAGIAN NKRI

4.1 Dari *Hoge Veluwe* Sampai Konferensi Meja Bundar

Pemerintah Belanda yang ingin membentuk negara federal di Indonesia terus berusaha untuk mencapai keinginannya. Pemerintah Belanda juga terus mempengaruhi golongan-golongan yang dapat membantu mewujudkan keinginannya. Golongan-golongan tersebut adalah mereka yang setia terhadap pemerintah Belanda. Berbeda dengan kaum nasionalis yang terus berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari serangkaian langkah diplomasi yang dilakukan oleh pihak Republik.

Diawali dari Persetujuan *Hoge Veluwe*, di Belanda pada 14 April 1946 - 25 April 1946. Perundingan dilaksanakan melalui perantara Archibald Clark Kerr dari Inggris. Indonesia diwakili oleh Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo dan Belanda diwakili oleh Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Royen, dan lain-lain.¹⁴⁶ Dalam persetujuan ini, pihak Belanda menolak konsep yang diutarakan Sjahrir, van Mook, dan Clark Kerr yang dilakukan di Jakarta. Terutama mengenai usul Clark Kerr mengenai pengakuan *de facto* atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa dan Sumatra. Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura.¹⁴⁷ Perundingan ini mengalami kegagalan karena tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pasca dilaksanakan persetujuan *Hoge Veluwe*, dilaksanakan Persetujuan Linggarjati pada 7 Oktober 1946 – 25 Maret 1947.¹⁴⁸ Persetujuan dilaksanakan melalui perantara Lord Killern. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. W. Schermerhorn. Persetujuan ini menghasilkan keputusan, diantaranya : Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama

¹⁴⁶ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 126.

¹⁴⁷ A.B Lopian dan P.J Drooglever (*peny.*), *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 2-3.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 3.

menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamakan Negara Indonesia Serikat, pemerintah RIS akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda serta pihak Indonesia dan Belanda menyetujui pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS), NIS ini meliputi Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra, wilayah Kalimantan, dan Indonesia Timur.¹⁴⁹ Negara-negara bagian tersebut akan memperoleh pemerintahannya sendiri tanpa harus berada di bawah pemerintahan pusat. Negara bagian juga akan memperoleh kedudukan yang sama. Akan tetapi Persetujuan Linggajati kembali mengalami kegagalan karena pihak Belanda melakukan gencatan senjata pada 21 Juli 1947, yang dikenal dengan *Agresi Militer 1*.

Pasca Agresi Militer yang pertama, kembali dilaksanakan persetujuan antara Belanda dan Indonesia. Persetujuan dilaksanakan diatas kapal *Renville* milik Amerika Serikat. Persetujuan *Renville* dilaksanakan pada 8 Desember 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Sjarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Sutan Sjahrir, dan lain-lain. Pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Kadir Widjoatmodjo, Mr. H.A.L van Vredenburg, Dr. P.J Koets, dan lain-lain. Persetujuan ini berakhir pada 17 Januari 1948, ditandai dengan ditanda tangani hasil persetujuan, yang berisi mengenai persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda serta enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik.¹⁵⁰ Persetujuan *Renville* tidak berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan. Pada 1948, pihak Indonesia tidak menyetujui gagasan mengenai masa peralihan, tetapi menginginkan pengakuan kedaulatan secara langsung. Sementara, Belanda membentuk Negara-negara bagian di wilayah yang direbutnya sebagai alternatif dan cara untuk menekan Republik.¹⁵¹ Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan Agresi Militernya yang kedua.

Pada 21 Januari 1949, dilakukan perundingan antara delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang terdiri dari Mr. Djumhana dan dr. Ateng

¹⁴⁹ A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 11 : Periode Konferensi Meja Bundar*, (Bandung : Angkasa, 1977), hal. 180.

¹⁵⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 138.

¹⁵¹ A.B Lopian dan P.J Drooglever (*peny.*), *op.cit.*, hal. 3.

dengan Soekarno dan Hatta.¹⁵² Melalui perundingan tersebut, pihak Republik bersedia melaksanakan perundingan dengan Belanda dengan syarat dikembalikannya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta serta pengunduran pasukan Belanda dari wilayah Republik.

Pada 26 Februari 1949, BFO dan Soekarno-Hatta menyatakan bahwa mereka bersedia melaksanakan KMB. KMB direncanakan akan diselenggarakan pada 12 Maret 1949. Akan tetapi, Pihak Republik sendiri, baru akan menghadiri KMB apabila pihak Belanda bersedia menyerahkan kembali Yogyakarta. Untuk menyelesaikan konflik antara Republik dengan Belanda, komisi PBB memberikan bantuannya, antara lain :

1. Tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan pada 28 Januari 1949, yaitu menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian para pemimpin Republik ke Yogyakarta.
2. Menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag agar dapat diselesaikan selekasnya.¹⁵³

Dewan Keamanan juga melakukan pendekatan dengan Republik dan Belanda. Dalam pertemuan di antara ketiganya yaitu, pihak Republik diwakili oleh Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, dr. Leimena, Mr. Latuharhary, Ir. Djuanda dan Dr. Supomo, pihak Belanda diwakili oleh J.H van Royen, Mr. N.S Blom, Mr. A'Jacob dan Dr. J.J van der Velde.¹⁵⁴ Pertemuan tersebut dikenal dengan Perundingan Roem-Royen. Masing-masing delegasi memberikan pernyataannya, yaitu Mr. Roem dari RI dan Dr. van royen dari Belanda. Meskipun jalan yang mereka tempuh hingga dapat dilaksankannya KMB cukup lama bahkan sampai menemukan jalan buntu, namun pada akhirnya dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen, pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara RI, Belanda dan BFO di bawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley dari Australia. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan suatu keputusan, di antaranya :

¹⁵² BFO adalah musyawarah antara negara-negara bagian buatan Belanda. Lihat : Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 163.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 164.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 165.

1. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan pada 1 Juli 1949 pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah tersebut.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta.
3. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan dilaksanakan di Den Haag.¹⁵⁵

Sebelum dilaksanakan KMB, diadakan Konferensi Antar Indonesia pada 19-22 Juli 1949. Konferensi Antar Indonesia menghasilkan persetujuan mengenai ketatanegaraan NIS, yaitu :

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.
4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.¹⁵⁶

Setelah dilaksanakan Konferensi Antar Indonesia dan menghasilkan keputusannya, maka pihak Indonesia bersiap melaksanakan KMB.

KMB dilaksanakan di Den Haag dan dihadiri oleh wakil-wakil Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan Pertemuan Musyawarah Federal (PMF) yang merupakan pertemuan para wakil negara-negara federal.¹⁵⁷ PMF sendiri lebih dikenal dengan nama BFO (*Bijeenkomst Federaal Overleg*) dikukuhkan sebagai lembaga perjuangan untuk menyiapkan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat tanpa adanya kekuasaan Belanda. PMF memberi resolusinya yang diajukan oleh Ide Anak Agung Gde Agung dan bersedia

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 169.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 170.

¹⁵⁷ Kementerian Penerangan RI Jogjakarta, *Perjuangan di Konperensi Medja Bundar Agustus-November 1949*, Jogjakarta, 1949, hal. 55-56.

membentuk pemerintahan federal sementara, akan tetapi dengan syarat, yaitu sebelum pemerintahan itu dibentuk harus diadakan musyawarah dengan wakil-wakil dari bagian Indonesia lainnya.¹⁵⁸

Delegasi pihak Republik dalam KMB yang terdiri dari Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Dr. Supomo, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B Simatupang, dan Mr. Sumardi. Di dalam delegasi tersebut terdapat juga tokoh nasionalis Ambon yang berada di Jawa, yaitu dr. J. Leimena dan Mr. Latuharhary.¹⁵⁹ Ambon juga mengirimkan wakilnya ke Ambon.

E.U Pupella dan Pelaupessij terpilih untuk menghadiri konferensi. Keberangkatan mereka ke Den Haag bersamaan dilarangnya melakukan rapat yang dibuat oleh golongan separatis di Ambon. Keberangkatan Pupella dan Pelaupessij mengakibatkan kekosongan pemimpin di wilayah Ambon. J.H Manuhuttu sebagai kepala daerah tidak dapat mengatasi hal tersebut. Kepergian Pupella ke KMB membuat rakyat Ambon merasa kehilangan seorang pemimpin, karena kedekatan Pupella dengan rakyat Ambon.¹⁶⁰ Mulai saat itu, golongan separatis mulai menguasai Ambon.

KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag dan selesai pada 2 November 1949. KMB membahas mengenai kebijaksanaan yang menyangkut kekuasaan dan kedaulatan Republik Indonesia, masalah Irian Barat, dan NIT. Masalah Indonesia Timur, Belanda menginginkan agar suara dari organisasi separatis seperti *Twapro* di Minahasa dan Partai Timur Besar (PTB) yang merupakan badan gabungan dari semua aliran di Indonesia Timur yang terdiri dari orang-orang Minahasa, Ambon, dan Timor yang setia terhadap Belanda didengar.¹⁶¹ Akan tetapi, dilain pihak, golongan ini menginginkan kedudukan mereka yang sejajar dengan delegasi-delegasi konferensi. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh konferensi. Tidak dipenuhinya keinginan mereka menyebabkan rasa kecewa

¹⁵⁸ Ide Anak Agung Gde Agung, *Pernyataan Roem-Royen* (Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara – Sebelas Maret University Press, 1995).

¹⁵⁹ Marwati Djoened Peospongoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 171.

¹⁶⁰ Richard Chauvel, "Ambon : Bukan...", *op.cit.*, hal. 259.

¹⁶¹ G.A Ohorella, *op.cit.*, hal. 28.

terhadap Belanda. Konferensi juga tidak dapat memenuhi keinginan golongan-golongan tersebut.

KMB menghasilkan keputusan mengenai berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS). Wilayah RIS adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, tanpa Irian Jaya. Adapun Tokoh yang berperan penting dalam KMB adalah Ide Anak Agung Gde Agung, Mohammad Hatta, Mohammad Roem, Sultan Hamid II, Prof. Soepomo, Dr. J. Leimena, Kol. T.B Simatupang, Ali Sastroamidjojo, dan R.T Djumahana Wiriaatmadja.¹⁶² Merekalah yang mempertahankan keberadaan Indonesia di KMB.

4.2 Terbentuknya Republik Indonesia Serikat

Sesuai dengan hasil dari KMB maka terbentuklah RIS. Bendera Belanda dengan cepat diganti dengan Bendera Merah Putih. Wilayah RIS sendiri mencakup seluruh wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda kecuali Irian Barat. RIS dipimpin oleh seorang presiden. Ir. Soekarno pada 16 Desember 1949 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Ir. Soekarno pun menunjuk Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri pada 20 Desember 1949. Untuk Menteri Dalam Negeri terpilih Ide Anak Agung Gde Agung dan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Menteri Pertahanan. Sultan Hamid II dan Mr. Mohammad Roem menjabat sebagai Menteri Negara. Ambon juga mengutus wakilnya untuk duduk di dalam parlemen RIS. Mohammad Padang dan A.J Patty menjadi wakil Ambon dalam RIS.¹⁶³ Mereka bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya yang duduk dalam pemerintahan RIS menginginkan agar Indonesia mejadi negara kesatuan. Tidak hanya wakil dari Maluku Selatan, negara-negara bagian yang dibentuk van Mook juga menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan RIS.

Kabinet RIS adalah pemerintahan Indonesia Serikat yang telah dilantik oleh Soekarno pada 20 Desember 1950, merupakan wadah resmi negara yang

¹⁶² Aco Manafe, *Dr. Ide Anak Agung Gde Agung : Keunggulan Diplomasinya Membela Republik*, (Jakarta : PT Inti Lopo Indah, 2007), hal. 246.

¹⁶³ Mohammad Padang adalah seorang tokoh pemuda anggota pengurus besar Pemuda Republik Indonesia (PRI) di kota Surabaya dan Pemuda Indonesia Maluku di Yogyakarta. Mohammad Padang juga menjadi pengurus besar dalam Partai Indonesia Merdeka di Ambon. A.J Patty adalah tokoh Sarekat Ambon pada zaman pergerakan nasional. A.J Patty sebelumnya dibuang ke Boven Digoel oleh pemerintah Hindia Belanda. Lihat : R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 60.

dipersiapkan untuk menerima penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, sesuai keputusan KMB.

Delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri datang ke Belanda untuk menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Penandatanganan ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda diwakili oleh Moh. Hatta, Ratu Juliana, Dr. Willem Drees sebagai Perdana Menteri Belanda, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. Sassen bersama-sama menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dan di Indonesia sendiri juga dilaksanakan penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di Jakarta. Delegasi yang menandatangani naskah penyerahan kedaulatan di Jakarta, di antaranya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ide Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink.¹⁶⁴ Terbentuknya RIS dianggap sebagai penyelesaian sementara untuk Indonesia. Ini dikarenakan tujuan akhir dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ditandatanganinya naskah persetujuan tersebut, maka secara formal Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui secara penuh RIS, walaupun tidak termasuk Irian Barat di dalamnya. Proses penggabungan negara-negara bagian ke dalam RIS membutuhkan waktu yang cukup lama, salah satunya NIT. Parlemen NIT menyangsikan kemampuan pemerintah pusat di Jakarta yang cukup jauh. Selain itu, di dalam parlemen NIT juga terdapat perbedaan dan pertentangan antara kaum nasionalis dan federalis. Kaum nasionalis menginginkan NIT bergabung dengan RIS, sehingga menolak kelanjutan NIT untuk tetap berdiri sendiri.¹⁶⁵ Perjuangan kaum nasionalis Ambon terus berlanjut dalam parlemen NIT. Mereka juga memperjuangkan Ambon menjadi bagian dari RIS.

Hasil KMB tidak hanya pembentukan RIS, tetapi juga dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu penyelenggara keamanan dan pertahanan negara dijalankan oleh tentara RIS. Angkatan tersebut dikenal dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Dalam badan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi intinya. Di dalam APRIS ini termasuk di dalamnya

¹⁶⁴ Aco Manafe, *op.cit.*, hal. 246-255.

¹⁶⁵ G.A Ohorella, *op.cit.*, hal. 31

anggota-anggota bekas KNIL. Pemerintah NIT tidak menerima pembentukan APRIS tersebut, yang diinginkan keamanan NIT diselenggarakan oleh negara bagian tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Ini juga yang menyebabkan NIT membentuk kepolisian tersendiri. Untuk menyelesaikan permasalahan ini di NIT, maka dilakukan persetujuan antara Menteri Pertahanan RIS dengan Ide Anak Agung Gde Agung dan Dr. Soumokil yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Wakil Perdana Menteri NIT. Hasil dari persetujuan tersebut, adalah :

1. Keamanan di Negara Indonesia Timur akan ditanggung sendiri oleh Negara Indonesia Timur.
2. Di Negara Indonesia Timur tidak akan diangkat seorang Gubernur Militer seperti yang dilakukan di Jawa dan Sumatra sejak 1948.
3. Bila keamanan ternyata tidak dapat dijamin Negara Indonesia Timur maka bantuan APRIS dapat diminta.
4. Yang bertanggungjawab dalam soal kemiliteran di Negara Indonesia Timur adalah suatu komisi yang terdiri dari Ir. M. Putuhena, Letkol. A.J Mokoginta dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Nanlohy dari pihak Belanda. Perjanjian ini dibuat untuk memperbaiki jalan untuk pembentukan kesatuan-kesatuan APRIS di wilayah Indonesia Timur.¹⁶⁶

Keamanan tidak juga tercipta di wilayah NIT. Di Ambon, Rakyat Islam Ambon dan kaum nasionalis Ambon sering mendapat ancaman dari tentara-tentara KNIL. Pada bulan Februari 1950, masyarakat Islam Ambon meminta TNI untuk menjamin keamanan mereka dan meminta Jakarta mengirim bantuannya.¹⁶⁷

Pada 7 Februari 1950, diadakan rapat di Makassar yang dihadiri oleh perwakilan partai-partai dalam parlemen NIT. Hasil dari rapat tersebut adalah dibentuknya Biro Pejuang Pengikut RI. Permasalahan keamanan yang tidak juga berhasil diselesaikan menyebabkan Kabinet Tatengkeng digantikan oleh Ir. Diapari. Ir. Diapari ternyata tetap mempertahankan prinsip federal dalam NIT.¹⁶⁸

Di wilayah Ambon, masuknya NIT ke dalam RIS disambut gembira oleh kaum nasionalis. Mereka berharap kemerdekaan dan kedaulatan Republik dapat terwujud. Namun, terbentuknya RIS dan APRIS menimbulkan masalah baru

¹⁶⁶ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam ...*, *op.cit.*, hal. 156.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 164.

¹⁶⁸ *Ibid.*

di wilayah Ambon. Pihak KNIL tidak mau bergabung ke dalam APRIS karena dianggap sebagai musuh mereka. Diantara 25.000 tentara Ambon yang tergabung dalam KNIL, hanya 1.000 tentara yang bersedia bergabung dengan APRIS.¹⁶⁹ Mereka yang memilih bergabung dalam TNI tidak lagi menjadi kelompok istimewa seperti pada masa kolonial Belanda. Mereka yang menolak bergabung dengan APRIS memilih untuk tetap tinggal dalam barak-barak yang terisolasi. Kedaan ini dimanfaatkan oleh golongan separatis, seperti Manusama dan Soumokil. Mereka menghasut rakyat Ambon agar menentang Republik. Soumokil sendiri menentang NIT untuk bergabung dengan Republik.

Milihat keadaan Ambon yang tidak juga mengalami perbaikan maka Pupella pun mengajukan mosinya dalam parlemen NIT. Di dalam parlemen NIT, Pupella menyatakan bahwa rakyat tidak percaya lagi terhadap pemerintah NIT. NIT harus menyesuaikan diri dengan hasil dari KMB dan pemerintahan RIS.¹⁷⁰ Menurut Pupella, pemerintah NIT tidak dapat mengatasi gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan RIS. Mosi ini mendapat dukungan dari golongan nasionalis yang berada di parlemen NIT. Mosi ini menyebabkan para anggota kabinet NIT meletakkan jabatannya.¹⁷¹ Pupella menyatakan bahwa program kerja dari Kabinet Diapari adalah hanyalah melanjutkan tindakan-tindakan Belanda dan tidak terdapat tindakan yang memperbaiki keadaan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku Selatan.¹⁷² Oleh karena itu, pada 24 April 1950, Pupella kembali mengajukan mosi tidak percaya kepada Parlemen NIT. Mosi tersebut juga banyak mendapat dukungan dari anggota-anggota parlemen lainnya.¹⁷³ Akibat dari mosi Pupella tersebut, Perdana Menteri Diapari meletakkan jabatannya. Perdana Menteri selanjutnya adalah Ir. Martinus Putuhena yang berasal dari kaum nasionalis Ambon. Putuhena merupakan tokoh yang diusulkan Pupella untuk menggantikan Diapari. Program kerja kabinet ini adalah pembubaran NIT dan penggabungan wilayah kekuasaan RIS yang terdiri dari enam belas negara bagian.

¹⁶⁹ Des Alwi, *op.cit.*, hal. 601.

¹⁷⁰ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 61.

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 43.

¹⁷² R.Z Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 171.

¹⁷³ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 61.

Terpilihnya Ir. Putuhena menjadi Perdana Menteri membuat keanggotaan di dalam Parlemen NIT dikuasai oleh kaum nasionalis. Mereka juga mulai melakukan kerjasama dengan Parlemen RIS. Mereka sepakat untuk memasukkan wilayah Indonesia Timur, termasuk di dalamnya Ambon ke dalam wilayah Republik Indonesia Serikat. Parlemen RIS akhirnya memutuskan untuk membentuk suatu negara kesatuan yang bernama Republik Indonesia. Maka, pada 17 Agustus 1950, dihadapan DPRS dan Senat yang bertempat di Jakarta, Presiden Soekarno memproklamasikan kembali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut, adalah :

“Berdasarkan atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pada taraf perjuangan Bangsa Indonesia untuk kemerdekaannya pada saat ini, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini diproklamirkan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia”.¹⁷⁴

Diproklamasikannya kembali kemerdekaan Indonesia menyebabkan negara-negara bagian harus melebur menjadi bagian NKRI. Negara Indonesia Timur akhirnya terbagi menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Sunda Kecil, Propinsi Sulawesi, dan Propinsi Maluku. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno melakukan pidato pertamanya pasca penyerahan kedaulatan. Perjuangan golongan nasionalis melalui diplomasi dan dalam parlemen membuahkan hasil. Tanpa harus melakukan kekerasan, mereka berhasil membawa Ambon menjadi bagian dari NKRI. RIS sendiri hanya bertahan kurang dari satu tahun yang kemudian berganti menjadi NKRI pada 17 Agustus 1950.

4.3 Reaksi Terhadap Terbentuknya Republik Indonesia Serikat di Ambon

Terbentuknya RIS disambut gembira oleh kaum nasionalis Ambon. Akan tetapi mereka harus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Ambon, karena ada usaha-usaha dari kaum separatis yang menentang bergabungnya Ambon ke dalam RIS. Usaha kaum nasionalis Ambon mendapat perlawanan dari Ir. J.A Manusama yang merupakan direktur AMS. Manusama mempropagandakan bila Maluku Selatan bergabung dengan RIS maka akan menimbulkan bahaya bagi rakyat Maluku Selatan. Selain itu, Manusama juga menyebarkan berita mengenai

¹⁷⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara...., op.cit.*, hal. 771.

kekejaman TNI dan maksud kedatangan TNI ke Ambon untuk menghancurkan rakyat Ambon serta mengislamkan orang-orang Kristen. Kabar ini dipercaya oleh orang-orang Kristen, dimana mereka akan kalah ditengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Propaganda yang dilakukan mendapat dukungan dari para raja pati dan kaum separatis serta bekas anggota KNIL yang setia pada Belanda. Salah satu raja pati yang mendukung Manusama adalah Raja Tulehu, yaitu Raja Ibrahim Ohorella. Di Ambon mulai terjadi kerusuhan dan bentrokan antara kaum nasionalis Ambon dengan para anggota bekas KNIL. Kedatangan satu kompi baret hijau bekas anggota Westerling pada 17 Januari 1950 membuat keadaan di Ambon makin memburuk.¹⁷⁵

Keadaan di Ambon makin kacau ketika golongan separatis ini melakukan aksi teror terhadap masyarakat Ambon. Pada 22 Januari 1950 terjadi penyerbuan ke dalam kota-kota di Ambon dan penganiayaan terhadap rakyat Ambon.¹⁷⁶ Golongan ini terdiri dari orang-orang yang menentang Republik dan menginginkan Maluku Selatan berdiri sendiri di bawah Kerajaan Belanda, salah satu yang menentang adalah GSS. Aksi teror ini juga dilakukan terhadap para tokoh nasionalis Ambon yang tergabung dalam PIM. Tindakan yang dilakukan oleh kaum separatis ini membuat keadaan di Ambon menjadi tidak aman. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum separatis ini menimbulkan rasa benci di kalangan rakyat Ambon. Pandangan separatis di Ambon pertama kali muncul dalam DMS, tetapi pemikiran-pemikiran tersebut tidak pernah mendapat dukungan. Ide mengenai negara kesatuan Indonesia yang diperjuangkan kaum nasionalis Ambonlah yang banyak mendapat dukungan dari rakyat Ambon.

Soumokil memegang peranan dalam golongan separatis tersebut. Ia juga memerintahkan tentara bekas KNIL untuk membunuh setiap anggota DMS. Menurut Soumokil, dengan dibunuhnya anggota-anggota DMS, maka Maluku Selatan dapat dinyatakan sebagai negara merdeka. Ternyata tidak semua menyetujui perintah Soumokil.¹⁷⁷

¹⁷⁵ G.A Ohorella, *et al.*, *op.cit.*, hal. 47.

¹⁷⁶ Jusuf A. Fuar, *Peristiwa Maluku Selatan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1956), hal. 15.

¹⁷⁷ G.A Ohorella, *et al.*, *op.cit.*, hal. 51.

Mengatasi keadaan di wilayah Ambon, pemerintah Republik bersama dengan pemerintah NIT dan anggota bekas KNIL mengadakan pertemuan. Mereka melakukan perundingan dengan *Troepencommandant Molukken* untuk menciptakan keamanan di Ambon. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keadaan di Ambon menjadi kacau, di antaranya :

1. Timbulnya salah paham dalam kalangan KNIL di Ambon, yakni antara mereka yang mau masuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan yang sebaliknya.
2. Infiltrasi golongan Belanda yang tetap berpaham kolonial dengan sengaja mengatur kekacauan tersebut.¹⁷⁸

Keadaan di Ambon makin kacau ketika kedatangan pasukan *Korps Speciale Troepen*. Jumlah mereka yang pada mulanya hanya 60 orang bertambah hingga 200 orang. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pasukan tersebut adalah menangkap salah satu anggota nasionalis Ambon. Wim Reawaru, yaitu salah satu tokoh dari PIM ditangkap dan dibunuh oleh pasukan tersebut. Tidak hanya Wim Reawaru, tentara-tentara KNIL juga menangkap Dahlan, Muhammad Nur, Hasan bin Tahir, Kopral Pattiasina yang merupakan kelompok nasionalis pengikut Wim Reawaru.¹⁷⁹ Sebelumnya, Wim Reawaru sempat membangun kembali kelompok-kelompoknya. Sebagian besar dari mereka berasal dari desa-desa besar Islam di Ambon. Mereka dilatih sebagai kesatuan tentara dan polisi cadangan di Ambon.¹⁸⁰

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada dasarnya adalah kelanjutan dari pertentangan antara kaum nasionalis Ambon dengan golongan federalis yang setia terhadap Belanda. Golongan federalis ini berusaha untuk mempertahankan secara ekstrem ide federalisme yang melibatkan anggota bekas KNIL.¹⁸¹ Di wilayah Ambon memang terdapat orang-orang yang pro Republik dan pro Belanda. Keadaan ini jelas terlihat sejak pendudukan Jepang di Ambon. Pada pasca kemerdekaan Indonesia perbedaan ini makin jelas. Orang-orang Islam mendukung PIM dan berjuang bersama orang-orang Kristen di dalam partai

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁷⁹ John Patikayhattu, *op.cit.*, hal. 71.

¹⁸⁰ Richard Chauvel, "Ambon : Bukan...", *op.cit.*, hal. 259.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 62.

tersebut. Untuk orang Kristen yang setia terhadap Belanda, mereka membentuk GSS dan PTB. Dapat dilihat rakyat Ambon terbagi menjadi dua, golongan yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia dan golongan yang berorientasi pada kolonialisme Belanda.

Ide mengenai proklamasi Republik Maluku Selatan yang dipimpin Ir. Manusama dan Soumokil sudah ada sejak Konferensi Denpasar. Mereka memang menginginkan Maluku Selatan berdiri sendiri. Dalam DMS pada mulanya ide ini pun sempat berkembang. Akan tetapi, karena DMS di dominasi oleh kaum nasionalis Ambon maka ide mereka tidak mendapat dukungan. Rakyat Ambon lebih mendukung gagasan yang diperjuangkan oleh Pupella sebagai pimpinan PIM. Soumokil sendiri sejak 22 April 1950 telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Jaksa Agung di NIT.¹⁸² Rencana Soumokil dan Manusama untuk memproklamasikan RMS mendapat tentangan dari pemerintah NIT. Akan tetapi Soumokil beserta golongan separatis lainnya dan anggota-anggota bekas KNIL tidak memperdulikan pemerintah NIT. Pada 23 April 1950, Manusama dan Soumokil melakukan pertemuan mengenai diproklamasikannya RMS. Dalam pertemuan tersebut terdapat Raja Ibrahim Ohorella dan Henk Pieter.¹⁸³ Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Kepala Daerah Maluku Selatan, J.A Manuhuttu dan Wakil DMS, Wairissal yang membacakan proklamasi RMS. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh nasionalis Ambon. Pada 25 April 1950, di Gedung DMS di Batugajah, Ambon, RMS diproklamasikan.¹⁸⁴ Pada saat itu Kepala Daerah Maluku Selatan J.A Manuhuttu dan ketua wakil Dewan Maluku Selatan, A. Wairissal dipaksa untuk memproklamasikan RMS.¹⁸⁵ Pada 26 April 1950 mereka mengirim pernyataan proklamasi RMS ke pihak RIS melalui radio yang berisi :

“Memenuhi kemauan, jang sungguh tuntutan dan desakan rapat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Maluku Selatan *de facto* dan *de jure* jang berbentuk Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan N.I.T dan R.I.S., berdasar N.I.T. sudah tidak sanggup mempertahankan kemerdekaannya sebagai negara bagian selaras dengan peraturan-peraturan Mukhtar Den Pasar jang masih sja berlaku, djuga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tgl. 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah

¹⁸² Soumokil pada saat itu meninggalkan kota Makassar secara diam-diam sehingga dicurigai. Ditambah dengan keberangkatan Soumokil dari Makassar menggunakan pesawat pembom milik Belanda. Lihat : Jusuf A. Fuar, *op.cit.*, hal. 22.

¹⁸³ John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 68.

¹⁸⁴ I.O. Nanulaita, *op.cit.*, hal. 182.

¹⁸⁵ John Patikayhattu, *op.cit.*, hal. 69.

bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan K.M.B. dan Undang-undang Dasarnja sendiri".¹⁸⁶

Adapun yang menjadi alasan Soumokil dan Manusama memilih J.A Manuhuttu membacakan proklamasi RMS adalah agar dunia luar mendapat kesan bahwa proklamasi tersebut merupakan tindakan pemerintah lokal yang resmi.¹⁸⁷ Mereka ingin menghindari Ambon dalam Republik. Proklamasi RMS dihadiri oleh tokoh-tokoh Ambon yang pro Belanda. Diantara mereka ada yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, guru, pendeta, dan kaum professional lainnya. Terutama dukungan datang dari para bekas anggota KNIL. Wilayah RMS meliputi Ambon, Seram, dan Lease.

Setelah di proklamasikannya Republik Maluku Selatan, Bendera Merah Putih diturunkan dan dirobek-robek beserta gambar Presiden Soekarno. Terdapat beberapa pelarangan-pelarangan, diantaranya :

1. Kapal-kapal dilarang mengibarkan merah-putih.
2. Pemimpin-pemimpin pergerakan dan golongan nasionalis ditangkap dan disiksa.
3. KNIL yang tidak mengikuti aksi tersebut dilucuti.¹⁸⁸

Pada 26 April 1950, terbentuklah susunan pemerintahan Republik Maluku Selatan. J.H Manuhuttu terpilih sebagai Presiden RMS. Manuhuttu yang menentang pembentukan RMS menerima jabatan tersebut dengan terpaksa di bawah paksaan golongan separatis Ambon.¹⁸⁹ RMS juga telah mempunyai angkatan bersenjata yang beranggotakan bekas anggota KNIL.

Usaha memerdekakan Maluku Selatan pada dasarnya merupakan bukti bahwa keadaan golongan separatis Ambon yang kian terdesak. Golongan separatis Ambon menyadari bahwa perjuangan kaum nasionalis telah mencapai hasilnya. Kekuasaan kolonial tempat mereka bersandar tidak ada lagi. Mereka menjadi takut akan keadaan mereka sendiri, dimana mereka takut akan rakyat yang selama ini mereka jauhi dan mereka pandang rendah.¹⁹⁰ Oleh karena itu, mereka membentengi sendiri posisi mereka dengan memproklamasikan RMS. Tokoh-

¹⁸⁶ Jusuf A. Puar, *op.cit.*, hal. 26-27.

¹⁸⁷ Richard Chauvel, "Ambon : Bukan...", *op.cit.*, hal. 263.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁸⁹ G.A Ohorella, *et al.*, *op.cit.*, hal. 55.

¹⁹⁰ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam....*, *op.cit.*, hal. 183.

tokoh nasionalis Ambon juga memiliki pandangan tersendiri terhadap pembentukan Republik Maluku Selatan, di antaranya :

1. Mr. Latuharhary, mantan Gubernur Maluku dari Republik Indonesia, menyatakan bahwa rakyat Maluku Selatan pada umumnya dan Ambon khususnya tidak menyetujui pembentukan Republik Maluku Selatan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan semangat rakyat Ambon untuk kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia. Menurut Mr. Latuharhary, proklamasi tersebut hanyalah nafsu beberapa pemuka reaksioner di Ambon yang memanfaatkan keadaan tanpa memikirkan nasib rakyat Ambon itu sendiri.
2. Dr. J Leimena, memandang Republik Maluku Selatan diadakan dipucuk bayonet. Orang-orang yang memegang pemerintahan di Ambon telah melepaskan dirinya dari bagian Indonesia dengan tidak melakukan perundingan terlebih dahulu. Banyak orang-orang Ambon yang pergi ke pegunungan-pegunungan untuk menyelamatkan diri. Rakyat Ambon hidup dalam ketakutan pada saat itu.
3. Eliza Urbanus Pupella, berpendapat bahwa proklamasi Republik Maluku Selatan adalah akibat dari tidak adanya kemerdekaan bersuara di Ambon. Keinginan mereka yang tergabung dalam Gabungan Sembilan Serangkai dan Partai Timur Besar memang tidak pernah didengar karena pada peran kaum nasionalis dalam Dewan Maluku Selatan lebih mendominasi. Akan tetapi, langkah yang mereka tempuh salah. Proklamasi Republik Maluku Selatan bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat.¹⁹¹

Pasca diproklamasikannya RMS, Eliza Urbanus Pupella menyadari bahwa ia telah gagal dalam usahanya menyadarkan rekan-rekan setanah airnya bahwa kemakmuran dan kemajuan mereka di masa depan akan diperoleh di Indonesia. Perannya sedikit berkurang pasca diproklamasikannya Republik Maluku Selatan. Dikuasainya Maluku Selatan oleh kelompok separatis membuat Pupella tidak dapat berbuat banyak untuk rakyat Ambon. Kaum nasionalis Ambon terus diawasi oleh tentara-tentara KNIL Ambon. Kelompok separatis Ambon juga mendapatkan bantuan dari Belanda. Itulah sebabnya peran kaum nasionalis sedikit berkurang.

¹⁹¹ Jusuf A. Puar, *op.cit.*, hal. 34-38.

KNIL melakukan aksi teror terhadap tokoh-tokoh nasionalis Ambon. PRIMA Ambon akhirnya kembali membentuk Barisan Terpendam (BT) yang diketuai M.Q. Maruapey. Tugas PRIMA pada saat itu adalah mengadakan gerakan bawah tanah untuk menggelisahkan pimpinan RMS.¹⁹² Mereka pun kemudian menjadi buronan tentara-tentara RMS.

Pemerintah RIS juga tidak mengakui berdirinya RMS. Kementerian Pertahanan menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan di Ambon. Terdapat tiga tahap untuk menaggulangnya, yaitu usaha penyelesaian secara damai, apabila pihak RMS tidak bersedia melakukan perundingan maka dilakukan cara yang kedua dengan melakukan blokade laut. Pada tahap ketiga adalah operasi militer bila kedua upaya itu mengalami kegagalan.¹⁹³ Tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang tergabung dalam Kebaktian Rakyat Indonesia Maluku, Ikatan Pemuda Indonesia Maluku, Pemuda Pattimura, dan Wanita Maluku membentuk Front Penentang Proklamasi Republik Maluku Selatan (FPPRMS).¹⁹⁴ Mereka lalu membuat kesatuan militer yang akan bekerjasama dengan APRIS.

Langkah pertama adalah dikirimnya Dr. J. Leimena yang merupakan Menteri Kesehatan RIS dan juga tokoh nasionalis Ambon. Leimena memimpin misi ke Maluku Selatan untuk melakukan jalan damai dengan para pimpinan RMS. Namun misi tersebut mengalami kegagalan. Leimena menerima surat yang menyatakan bahwa Soumokil bersedia untuk berunding jika pemerintah RIS mau mengakui RMS.¹⁹⁵ Leimena pun menolak keinginan Soumokil tersebut. Menerima penolakan dari golongan separatis, dr. Leimena menyatakan bahwa :

“...kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan berbitjara dengan kami jang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa. Saja personlijik merasa ini sangat menyedihkan...!”¹⁹⁶

Melihat kegagalan yang terjadi, maka kaum nasionalis Ambon yang berada di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Maluku mengadakan Koferensi Maluku di Semarang pada 12-13 Juni 1950. Konferensi ini dipimpin oleh de Fretes dan Kolibonso yang dihadiri oleh Mr. J Latuharhary, Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena,

¹⁹² John Pattikayhatu, *op.cit.*, hal. 72.

¹⁹³ R.Z. Leirissa, *loc.cit.*, hal. 36.

¹⁹⁴ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 177-178.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Jusuf A. Fuar, *op.cit.*, hal. 65.

E.U Pupella, J.D Siyaranamual, A.J Patty, L. Nanlohy, A. Tahija, dr. Soisa, dr. Lisapaly, Chris Siyauta, dan Laskar Pattimura.¹⁹⁷ Pada konferensi tersebut dibentuk misi persaudaraan yang terdiri dari Domine Siahaja, Sapulete, J. Fernandes, J. Tamasale, dan A. Kailola. Konferensi ini menghasilkan tujuh butir pernyataan yang akan diajukan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagai masukan untuk menyelesaikan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Tujuh butir pernyataan tersebut adalah supaya :

1. Menurut pendapat konferensi sebagai syarat mutlak dalam penyelesaian Maluku diberikan otonomi seluas-luasnya.
2. Pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat terbanyak yang menderita dan tidak bersalah di Maluku Selatan.
3. Bangsa Indonesia khususnya, di dunia umumnya, memperjuangkan nasib rakyat Maluku Selatan terhadap perbuatan-perbuatan tidak mengenal perikemanusiaan.
4. Pemerintah Belanda didesak dengan segera dan sangat untuk melucuti rombongan KNIL di Maluku Selatan, yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah Belanda, bila perlu dengan bantuan UNCI.
5. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mendukung misi persaudaraan ini.
6. Pemerintah atas dasar keadilan sosial mempergunakan seluas-luasnya kecerdasan dan kecakapan baik militer maupun sosial, tenaga-tenaga golongan Maluku khususnya, dan
7. Dalam tindakan Pemerintah hendaknya membedakan antara rakyat Maluku Selatan dengan golongan separatis.¹⁹⁸

Konferensi ini berpendapat bahwa RMS bukan dilakukan oleh rakyat Ambon melainkan oleh golongan separatis yang tidak menghendaki bergabungnya Maluku Selatan ke dalam RIS. Sebelum misi ini dilaksanakan, pihak APRIS telah melakukan blokade laut. Akan tetapi, usul dari Konferensi Maluku akan didengar untuk melaksanakan tindakan selanjutnya.

Blokade laut merupakan gabungan antara angkatan darat dan Laut, Angkatan Laut dipimpin oleh Kolonel Adam dan Mayor E. Martadinata. Mulai

¹⁹⁷ I.O Nanulaitta, *op.cit.*, hal. 186.

¹⁹⁸ G.A Ohorella, *et al.*, *op.cit.*, hal. 60-61.

dari 18 Mei-14 Juli 1950, blokade diadakan di perairan Maluku Tengah.¹⁹⁹ Kapal-kapal kecil milik golongan separatis dapat dihancurkan. Namun Soumokil tetap tidak mau berunding.

Akibat kegagalan cara ini, pemerintah RIS mengambil langkah operasi militer untuk menyelesaikan permasalahan di Maluku Selatan. Pada 16 Juli 1950, dimulailah operasi militer untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Sejak di proklamasikannya RMS hingga dilaksanakannya Operasi Militer pihak RIS melakukan jalan damai untuk menyelesaikan Peristiwa Maluku Selatan. Akan tetapi, selalu mengalami kegagalan. Operasi Militer ini berlangsung cukup lama hingga 8 November 1950. Dalam hal ini, Pemerintah RIS tidak menutup kemungkinan untuk tetap melalui jalan damai, karena dilator belakang dari hasil konferensi tokoh-tokoh nasionalis Ambon. Terlihat pada September 1950, Pemerintah kembali mengirim utusannya dr. Rehatta untuk menyelesaikan melalui jalur damai. Akan tetapi, Soumokil tetap tidak mau diajak berunding.²⁰⁰ Pemerintah kembali mengutus dr. Leimena untuk melakukan perundingan dengan Soumokil. Akan tetapi tetap tidak berhasil. Langkah ini ditempuh oleh Pemerintah untuk menghindari perlawanan dengan kekuatan senjata yang akan menghasilkan penderitaan dan akan memakan banyak korban rakyat Ambon. Ini juga yang menjadi salah satu usul dari Konferensi Maluku. Kaum nasionalis Ambon, terus mendapat perlawanan dari kaum separatis Ambon.

Operasi militer ini dipimpin Panglima Komando Teritorium Indonesia Timur (KO. TT. IT) Kolonel A. Kawilarang, yang kemudian diserahkan kepada Komandan Pasukan, Letkol Ign. Slamet Riyadi. Ikut juga bersama mereka perwira-perwira dari Batalion Pattimura, di antaranya Letnan Lopulisa dan Kapten J. Muskita, bekas anggota KNIL yang bergabung dengan TNI.²⁰¹ Kapten J. Muskita mengetahui mengenai jalan pemikiran serta kemampuan pemimpin-pemimpin KNIL di Ambon. Pasukan RMS hanya dipimpin oleh seorang yang berpangkat Letnan Muda. Operasi militer yang dikenal dengan Komando Pasukan Maluku Selatan berada di bawah pimpinan Letkol Ign. Slamet Riyadi. Gerakan operasi untuk menyelesaikan permasalahan di Maluku Selatan ini terbagi menjadi

¹⁹⁹ R.Z Leirissa, *loc.cit.*, hal. 36.

²⁰⁰ R.Z Leirissa, *Maluku Dalam...*, *op.cit.*, hal. 180.

²⁰¹ R.Z Leirissa, *et, al, Sejarah Sosial...*, *op.cit.*, hal. 110-111.

enam bagian, yaitu : Operasi Malam, Operasi Fajar, Operasi Senopati, Operasi Pulau Maluku, Operasi Bintang Siang, dan Operasi Tertutup.²⁰² Pasukan APRIS yang mendarat di Maluku Selatan diberikan perintah bahwa mereka yang mendarat bukan sebagai pasukan, tetapi adalah sebagai suatu tentara yang sebangsa dengan penduduk di Maluku Selatan yang datang untuk melepaskan penduduk dari tindakan yang dilakukan tentara RMS. Tindakan tentara APRIS tersebut membuat masyarakat Ambon merasa heran, karena adanya propaganda dari golongan separatis yang menyatakan bahwa pendaratan tentara APRIS di Maluku Selatan bertujuan untuk memaksa masyarakat untuk masuk kedalam agama Islam, namun kenyataannya berlainan.²⁰³

Operasi yang dilakukan banyak memakan korban dari pihak angkatan perang Indonesia. Hal ini dikarenakan kemampuan yang minim karena belum mengalami pendidikan latihan serta belum menguasai taktik serangan, terutama mengenai pendaratan dari laut, karena serta mereka belum bisa mengemudikan kendaraan tempur. Maka pertempuran pasukan TNI di Pulau Ambon dibagi menjadi tiga daerah, yaitu :

1. Hitu, dilakukan oleh Batalion Jusmin yang bergerak dari Hitu melalui jalan-jalan besar, namun mengalami hambatan di Jembatan Wanat. Serta Batalion Sutarno yang bergerak dengan berjalan kaki.
2. Waitatiri, dilakukan oleh Pasukan Group II dan Kompi Faah di Pantai Batu Gong. Pasukan ini berhasil merebut Passo dan Lateri, 7 Km dari kota Ambon.
3. Kota Ambon, dilakukan oleh Pasukan Group III, Kota Ambon juga berhasil dikuasai mulai dari Parigi Lima sampai Pelabuhan Ambon. bahkan, Benteng Victoria yang dikuasai pasukan RMS berhasil dikuasai.²⁰⁴

Terbebasnya Maluku Selatan menelan banyak korban diantaranya Letkol. Ign. Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, dan Mayor Abdullah dan anggota APRIS lainnya. Para tokoh golongan separatis RMS banyak yang melarikan diri ke

²⁰² G.A Ohorella, *op.cit.*, hal. 67.

²⁰³ Yusuf A. Fuar, *op.cit.*, hal. 76-77.

²⁰⁴ Pembebasan Ambon Terhadap Kekuasaan Republik Maluku Selatan dalam *Majalah Vidya Yudha*, No.4 , 1968.

Seram, namun akhirnya mereka berhasil ditangkap, walaupun tidak sedikit juga yang melarikan diri ke Belanda untuk meminta perlindungan. RMS hanya berkuasa dari bulan April hingga Desember 1950.

Dengan terbebasnya Maluku Selatan maka pemerintah RI menempatkan gubernur Maluku di Ambon. Indonesia pada saat itu sudah berbentuk Negara Kesatuan. Oleh karena itu, kembali dipilih seorang gubernur di Maluku. Atas dukungan Pupella dan J. de Fretes, Mr. J. Latuharhary kembali menjadi Gubernur Maluku.²⁰⁵ Terbebasnya Maluku dari RMS membuat Mr. Latuharhary dapat menduduki posisinya sebagai Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon. Pada 12 Desember 1950, Mr. Latuharhary mulai melaksanakan tugasnya di tanah kelahirannya, yang telah terbebas dari Belanda dan menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maluku Selatan pada awal 1960-an dapat dikatakan aman keseluruhannya. Usaha dan perjuangan kaum nasionalis Ambon akhirnya tercapai, yang mewujudkan Ambon menjadi bagian dari Indonesia. Strategi yang dipilih kaum nasionalis Ambon adalah diplomasi dan parlementer serta memanfaatkan keadaan yang ada pada saat itu. Mereka awalnya menghindari menggunakan kekuatan senjata, walaupun pada akhirnya langkah itu yang harus diambil untuk menumpas gerakan RMS.

²⁰⁵ I.O Nanulaitta, *op.cit.*, hal. 189.

BAB 5

KESIMPULAN

Ambon merupakan salah satu pulau yang berada di kawasan Maluku Selatan. Ambon juga merupakan wilayah yang cukup lama dikuasai oleh Belanda. Keadaan ini yang mengakibatkan rakyat Ambon terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah diterapkan oleh Belanda. Kedekatan mereka dengan Belanda menyebabkan orang-orang yang berada di luar Ambon beranggapan bahwa rakyat Ambon pro Belanda. Akan tetapi, pada kenyataannya di wilayah Ambon terdapat juga orang-orang yang pro Indonesia. Orang-orang ini mulai terlihat pergerakannya pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu kaum nasionalis menjadi penghubung antara rakyat Ambon yang bertikai. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut gembira oleh masyarakat Islam Ambon. Berbeda dengan masyarakat Kristen Ambon yang menganggap kedatangan tentara Jepang sebagai suatu bahaya. Kaum nasionalis Ambon sendiri beranggotakan orang-orang yang beragama Islam dan Kristen yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia.

Kaum nasionalis Ambon memanfaatkan keadaan pada masa pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari bahwa kekuatan Jepang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan yang mereka miliki, oleh karena itu, mereka menghindari kontak fisik dengan tentara-tentara Jepang. Eliza Urbanus Pupella merupakan salah satu tokoh yang penting pada saat itu. Kedekatannya dengan rakyat dimanfaatkan oleh Jepang untuk mendapat simpati rakyat Ambon. Untuk kaum nasionalis sendiri, sikap baik Jepang dimanfaatkan mereka, melalui *Ambon Shu Seinendan* dan *Ambon Hokookai*. Melalui badan buatan Jepang ini mereka turut menyusun persiapan kemerdekaan. Pupella yang mendapat kepercayaan dari Jepang berhasil mengetahui berita dari pusat mengenai rencana di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Maka, di Ambon ia turut membentuk panitia untuk mempersiapkan pengambil alihan tanggung jawab dari Jepang. Namun, sebelum panitia tersebut terbentuk Jepang sudah terlebih dahulu menyerah kepada Sekutu.

Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia menghasilkan susunan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Maluku menjadi salah satu dari delapan propinsi. Ambon yang merupakan salah satu pulau di Maluku menjadi bagian dari kekuasaan Republik Indonesia. Terpilihlah Mr. Latuharhary sebagai gubernur Maluku yang pertama. Berita mengenai proklamasi di Ambon pada awalnya hanya diketahui oleh kaum nasionalis Ambon. Merekalah yang menyebarkan berita tersebut ke daerah-daerah di Ambon. Namun, perjuangan kaum nasionalis Ambon tidak berhenti setelah kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Sekutu bersama dengan NICA dan Belanda membuat kaum nasionalis Ambon terus melanjutkan perjuangannya.

Kedatangan NICA tentunya disambut gembira oleh rakyat Kristen Ambon. Di awal kedatangannya, NICA menangkap Eliza Urbanus Pupella beserta kaum nasionalis lainnya karena dianggap sebagai tokoh yang pro Indonesia. Namun, melihat peran Pupella yang cukup besar di Ambon, maka NICA mengajak Pupella untuk bekerjasama. Pupella memanfaatkan kesempatan tersebut. Mulai saat itu dimulailah perjuangan kaum nasionalis Ambon melalui diplomasi, dan diplomasinya dengan Belanda yang menghasilkan pembebasan tokoh-tokoh nasionalis yang ditangkap oleh NICA. Setelah tokoh-tokoh nasionalis lainnya dibebaskan, Pupella kembali memanfaatkan keadaan dengan memasukkan tokoh nasionalis lainnya ke dalam *adviesraad*.

Kembalinya tentara Belanda ke wilayah Ambon membuat kaum nasionalis Ambon di Jakarta turut membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Ambon. Mereka melakukan Ekspedisi Merah Putih dengan mengirim Perserikatan Pemoeda Ambon. Ekspedisi tersebut diketahui oleh Belanda dan terjadi kontak fisik dan banyak anggota rombongan ekspedisi tertangkap Belanda. Semangat dari kaum nasionalis Ambon yang berada di Jawa membuat semangat golongan nasionalis di Ambon makin besar. Pemuda-pemuda Ambon yang tergabung dalam laskar-laskar melakukan kontak fisik dengan Belanda akibatnya banyak anggota dari laskar-laskar tersebut ditangkap. Ini membuktikan bahwa kekuatan Belanda memang cukup besar dan kuat. Kekuatan Belanda tidak sebanding dengan kaum nasionalis Ambon, oleh karena itu kaum nasionalis menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Belanda melalui kekuatan fisik.

Dikuasainya Indonesia Timur oleh Belanda menyebabkan Belanda berniat mendirikan negara federal. Dimulai dengan diadakannya Konferensi Malino yang di dihadiri oleh perwakilan yang tunjuk oleh Belanda. Hasil dari Konferensi Malino adalah dibentuknya negara federal. Melalui Konferensi Malino dibentuklah dewan-dewan untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia Timur untuk selanjutnya menghadiri konferensi yang di selenggarakan di Denpasar. Di Maluku Selatan, dibentuklah DMS. Anggota DMS ini sebagian besar terdiri dari kaum nasionalis Ambon. Karena pada saat pemilihan anggota DMS, Partai Indonesia Merdeka (PIM) memenangkan pemilihan tersebut. PIM adalah partai kaum nasionalis di Ambon yang mendapat dukungan dari rakyat Islam Ambon. Melalui Konferensi Denpasar inilah diresmikan NIT.

Kaum nasionalis Ambon pada saat itu menyetujui Ambon menjadi bagian dari NIT. DMS memutuskan agar untuk sementara Maluku Selatan dimana Ambon termasuk di dalamnya masuk ke dalam NIT. Akan tetapi, jika keinginan rakyat Ambon tidak terpenuhi, maka Maluku Selatan akan keluar dari NIT. Mereka melanjutkan perjuangan mereka di dalam parlemen NIT. Pemerintah Indonesia sendiri awalnya tidak mengakui NIT, karena tidak mengikut sertakan Republik Indonesia. Pada saat itu, Republik Indonesia dengan Belanda sedang terlibat dalam menempuh Persetujuan Linggajati. Namun setelah disetujuinya Persetujuan Linggajati antara kedua belah pihak maka Republik Indonesia mengakui NIT. Hubungan antara Republik Indonesia dengan Negara Indonesia Timur mulai membaik pada saat Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung pada akhir Desember 1947.

Di dalam parlemen Negara Indonesia Timur, kaum nasionalis Ambon mengajukan Manuhuttu sebagai Kepala Daerah Maluku Selatan dengan berpangkat sama dengan residen. Dan mereka pun berhasil, Manuhuttu menjadi Kepala Daerah di Maluku Selatan. Perjuangan mereka dalam parlemen pun menunjukkan hasil, yaitu keputusan mereka untuk berjuang melalui parlemen cukup tepat. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi tidaklah sebanding dengan kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi, dengan mengikuti alur yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda, perjuangan mereka dapat membuahkan hasil.

Pertikaian antara Indonesia dengan Belanda berakhir dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini diawali dengan diadakannya pertemuan antara Indonesia, Belanda dan BFO serta dilaksanakannya Konferensi Antar Indonesia. Melalui Konferensi Meja Bundar dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Konferensi tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasionalis Ambon yang berada di Jawa dan Ambon. Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat, maka Negara Indonesia Timur menjadi bagian dari RIS. A.J Patti dan Mohammad Padang menjadi wakil dari Ambon, Maluku Selatan dalam Parlemen Negara Indonesia Timur. Pupella pun dalam parlemen NIT mengusulkan agar NIT segera menyesuaikan diri dengan hasil KMB dan RIS. Pupella juga mengajukan mosi yang menyatakan bahwa program kerja Kabinet Diapari hanya melanjutkan tindakan-tindakan Belanda. Oleh karena itu, Pupella meminta agar Kabinet Diapari digantikan oleh Ir. Putuhena yang merupakan calon dari Pupella. Mulai saat itu Kabinet NIT dikuasai oleh kaum nasionalis. Program kerja Putuhena adalah pembubaran Negara Indonesia Timur dan bergabung dengan wilayah kekuasaan Republik. Perjuangan kaum nasionalis melalui diplomasi dan dalam parlemen membuahkan hasil. Tanpa harus melakukan kekerasan, mereka berhasil membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat sendiri hanya bertahan kurang dari satu tahun yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bergabungnya Ambon dalam RIS menimbulkan permasalahan baru. Golongan separatis Ambon menentang hal tersebut. Mereka ingin Maluku Selatan berdiri sendiri. Atas desakan dari golongan separatis, Kepala Daerah Maluku Selatan dan Wakil Dewan Maluku Selatan membacakan proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan. Dengan diproklamasikannya Republik Maluku Selatan peran kaum nasionalis Ambon pun berkurang. Mereka terus mendapatkan pengawasan dari tentara-tentara KNIL. Jika mereka melakukan perlawanan mereka dibunuh, seperti halnya Wim Reawaru. Untuk mengatasi keadaan di Ambon, kaum nasionalis Ambon meminta bantuan dari Republik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang ditempuh adalah melalui diplomasi, namun golongan separatis tetap menolak sebelum RIS mengakui berdirinya RMS. Maka, langkah terakhir yang dilakukan adalah operasi militer

yang banyak memakan korban dari angkatan perang Indonesia. Namun, RMS berhasil ditumpas. Banyak anggota separatis yang melarikan diri ke Belanda meminta perlindungan. Terbebasnya Maluku Selatan membuat Gubernur Mr. Latuharhary dapat menempati posisinya, karena mendapat dukungan dari Pupella, J. de Fretes beserta kaum nasionalis Ambon lainnya yang menginginkan Mr. Latuharhary kembali menjadi Gubernur Maluku. Usaha dan perjuangan kaum nasionalis membawa Ambon menjadi bagian dari Indonesia dapat terwujud. Jalan yang memang berbeda dengan perjuangan di daerah-daerah lainnya. Mereka menghindari kekuatan senjata, walaupun akhirnya langkah itu yang harus diambil untuk menumpas Republik Maluku Selatan, sehingga Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia terwujud.

Jelas terlihat bahwa strategi yang dipilih kaum nasionalis Ambon adalah diplomasi dan parlementer serta memanfaatkan keadaan yang ada pada saat itu. Dengan strategi tersebutlah kaum nasionalis Ambon akhirnya berhasil membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia. Strategi diplomasi yang digunakan adalah karena jarak yang jauh antara pusat dengan wilayah Ambon. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Belanda. Hal ini terbukti dari perlawanan-perlawanan melalui kontak fisik yang mengakibatkan kekalahan dan banyak memakan korban. Strategi itu digunakan agar kaum nasionalis Ambon dapat diterima oleh semua pihak. Pada masa pendudukan Jepang, mereka dapat diterima oleh pemerintah Jepang dan juga rakyat Ambon. Sedangkan di bawah kekuasaan Belanda, mereka juga dapat diterima oleh Belanda, Parlemen NIT, rakyat Ambon, dan pemerintah Indonesia itu sendiri. Dalam perjuangannya, kaum nasionalis Ambon juga terlihat berusaha mendapat posisi penting untuk mempermudah perjuangan mereka. Hal yang sama pun terjadi masa pendudukan Jepang, kaum nasionalis Ambon juga berhasil mendapat posisi penting dari Jepang.

Dalam perjuangannya, kaum nasionalis di Indonesia Timur memang berbeda dengan yang terdapat di daerah-daerah Indonesia bagian barat. Perjuangan kaum nasionalis di Indonesia bagian barat, mereka seutuhnya untuk Republik Indonesia. Sedangkan, di dalam perjuangan kaum nasionalis di Indonesia Timur terdapat unsur nasionalis kedaerahan. Seperti halnya kaum

nasionalis Ambon, yang berjuang selain untuk Republik Indonesia mereka juga berusaha dan berjuang untuk memajukan Ambon dan berusaha untuk mensejahterakan rakyat Ambon.

Ambon memang wilayah yang cukup lama dikuasai Belanda. Akan tetapi bukan berarti seluruh rakyat Ambon pro Belanda, hal ini terbukti bahwa tidak semua rakyat Ambon pro Belanda. Di Ambon juga terdapat kaum nasionalis yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dengan kaum nasionalis Indonesia lainnya. Ini mereka buktikan dengan perjuangan dan peran mereka dalam usaha membawa Ambon menjadi bagian dari Republik Indonesia.



Daftar Pustaka

Sumber Primer :

Surat Kabar *Ambon Baroe* (Ambon), 1941

Surat Kabar *Sapoelalan* (Ambon), 1926

Surat Kabar *Soeloeh Ambon*, (Ambon), 1946

Surat Kabar *Negara Baroe* (Makassar), 1947

ANRI, *Stukken Betreffende de Personele, Politionele en Politieke Situatie in de Zuid Molukken, Algemeen Secretarie No. 1362.*

Sumber Sekunder :

Artikel :

Chauvel, Richard. "Ambon : Dari Masa Kolonial Sampai Proklamasi RMS," *Majalah Prisma*, 11 : 76-80, November, 1991.

Leirissa, R.Z. "Pemberontakan Republik Maluku Selatan," *Majalah Prisma*, 8 : 26-39, Agustus, 1978.

Seleky, W.A. "Asal Usul Penduduk Ambon Menurut Safara 'Ridjali," *Majalah Yaperna*, 8 : 56-61, Agustus, 1970.

Sluimers, Lászlò. "The Japanese Military And Indonesian Independence," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 27 No. 1 : 19-36, Maret, 1996.

Suryani, Sri. "Hancurnya Pertahanan Hindia Belanda," *Majalah Senakatha*, 34 : 27-37, Desember, 2008.

Thomas, R. Murray. "Educational Remnants of Military Occupation : The Japanese In Indonesia," *Asian Survey*, Vol. 6 No. 11 : 630-642, November, 1966.

Tim Penulis, "Pembebasan Ambon Terhadap Kekuasaan Republik Maluku Selatan," *Majalah Vidya Yudha*, 4 : 112-120, Februari, 1968.

Tesis Yang Belum di Terbitkan :

Najamuddin. "Sulawesi Selatan Pergumulan Antara Negara Federal dan Negara Kesatuan 1946-1949." Tesis Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2000.

Thalib, Usman. "Ambon Di Masa Revolusi Percaturan Politik Antara Kelompok Pro dan Kontra RI 1946-1949." Tesis Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2000.

Ba'in. "Terbentuknya dan Runtuhnya Negara RIS 1945-1950". Tesis Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 1996.

Buku :

Alwi, Des. *Sejarah Maluku : Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*. Jakarta : Dian Rakyat, 2005.

Agung, Ide Anak Agung Gde. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press, 1985.

_____. *Pernyataan Roem-Royen*. Jogjakarta : Yayasan Pustaka Nusantara – Sebelas Maret, University Press, 1995.

_____. *Renville*. Jakarta : Sinar Harapan, 1983.

Beasley, W.G. *Pengalaman Jepang : Sejarah Singkat Jepang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Chauvel, Richard. *The Rising Sun In The Spice Island : A History of Ambon During The Japanese Occupation*. Clyton Victoria : Monash University, 1985.

_____. *Nasionalist Soldier And Separatis The Ambonese Island From Colonialism to Revolt 1880-1950*. Leiden : KITLV, 1990.

_____. "Ambon : Bukan Revolusi Melainkan Kontrarevolusi," *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, ed. Audrey R. Kahin. Jakarta : Grafiti Press, 1990.

Dekker, Nyoman. *Sejarah Revolusi Nasional*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.

Fuar, Jusuf. A. *Peristiwa Maluku Selatan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1956.

Goto, Ken'ichi. *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998.

- Irsan, Abdul. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, 2007.
- Jonge, De. *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta : Kesaint Blanc, 1991.
- Jusuf, Sudono. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*. Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Kahin, George Mc Turnan. *Nationalism And Revolution In Indonesia atau Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, terj. Nin Bakdi Soemanto. Jakarta : Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Kutoyo, Sutrisno. *ed. Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan Departemen P dan K, 1977.
- Lapian, A.B. *Di Bawah Pendudukan Jepang : Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya*. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988.
- _____ dan P.J Drooglever (peny.). *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta : Grafiti, 1992.
- Leirissa, R.Z. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra, UI, 1975.
- _____. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sejarah, 2006.
- _____. *et al. Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- _____. *Sejarah Kebudayaan Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Manafe, Aco. *Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Keunggulan Diplomasinya Membela Republik*. Jakarta : PT. Inti Lopo Indah, 2007.
- Nanulaita, I.O. *Timbulnja Militerisme Ambon Sebagai Suatu Persoalan Politik Sosial Ekonomi*. Jakarta : Bhratara, 1966.
- _____. *Johannes Latuharhary, SH : Hasil Karya dan Pengabdiannya*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983.
- Nasution, Abdul Haris. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I : Proklamasi*. Bandung : Disjarah-AD dan PT Angkasa, 1976.

_____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III : Diplomasi Sambil Bertempur*. Bandung : Disjarah-AD dan PT Angkasa, 1977.

_____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IV : Periode Linggarjati*. Bandung : Disjarah-AD dan PT Angkasa, 1977.

_____. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid IX : Konferensi Meja Bundar*. Bandung : Disjarah-AD dan PT Angkasa, 1977.

Ohorella, G.A., et al. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993.

Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta : PT Gramedia, 1989.

Pattikayhatu, John. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Daerah Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

_____. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Pramono, et.al. *Badan-Badan Perjuangan*. Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1983.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : Serambi, 2005.

Sastrosatomo, Soebadio. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Setyohadi, Tuk. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta : CV rajawali Corporation, 2002.

Silaen, Victor, et.al. (peny.). *Dr. Johannes Leimena Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulya, 2007.

Suprpti, Mc, dan P. Wayong (ed). *Geografi Budaya Daerah Maluku*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978

Tetelepta, H.B. *Sejarah Pendidikan Daerah Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

Tim Penulis Departemen P dan K. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Tim Penulis Monografi Daerah Maluku. *Monografi Daerah Maluku*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.th.

Tim Penulis Sejarah TNI, *Sejarah TNI Jilid I (1945-1949)*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000.

_____. *Sejarah TNI Jilid II (1950-1959)*. Jakarta : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000.

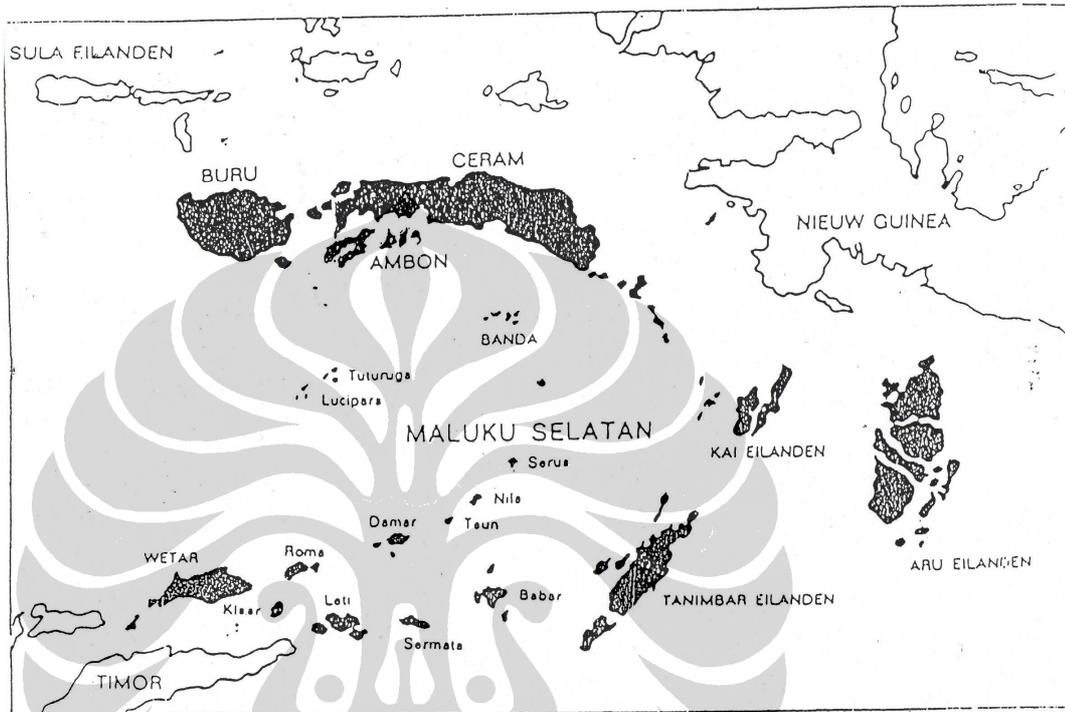
Tim Penulis Propinsi Sulawesi. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953.

Tobing, K.M.L. *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta : PT Gunung Agung, 1986.



Lampiran 1

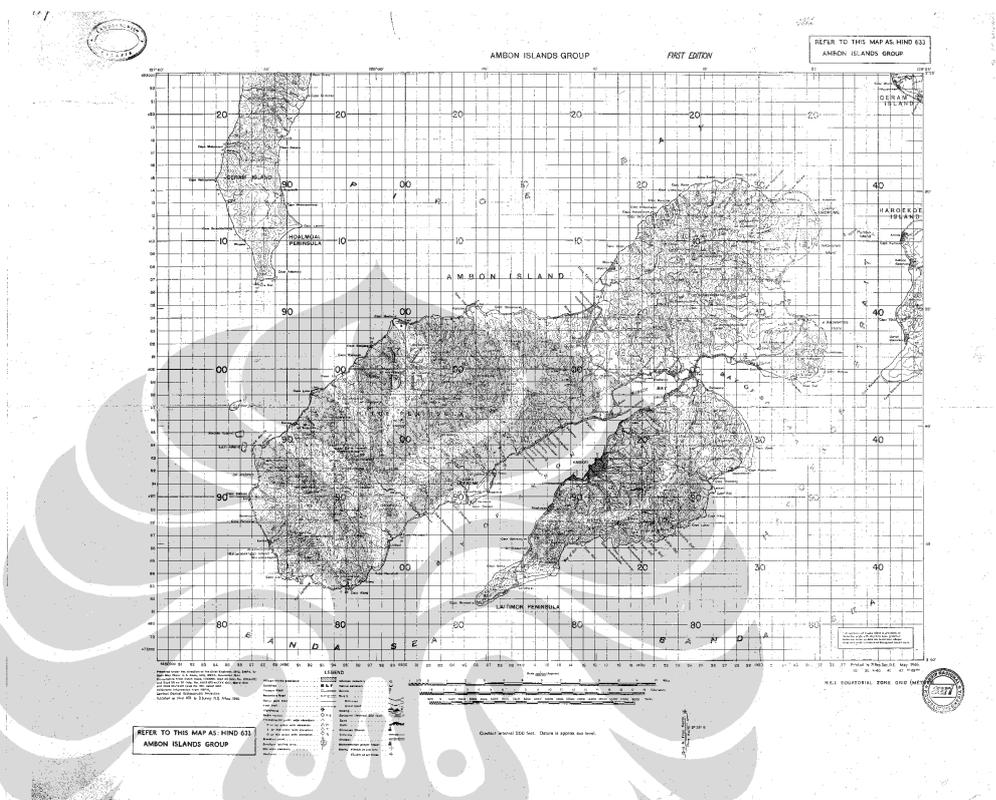
PETA MALUKU SELATAN



Sumber : M. van Selm, Mr. Dr., Chr. R. Soumokil en E.U Pupella *Twee Zuid-Molukse Politici in de Delstaat Oost-Indonesie 1946-1950* (Doctoral Scriptie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1996)

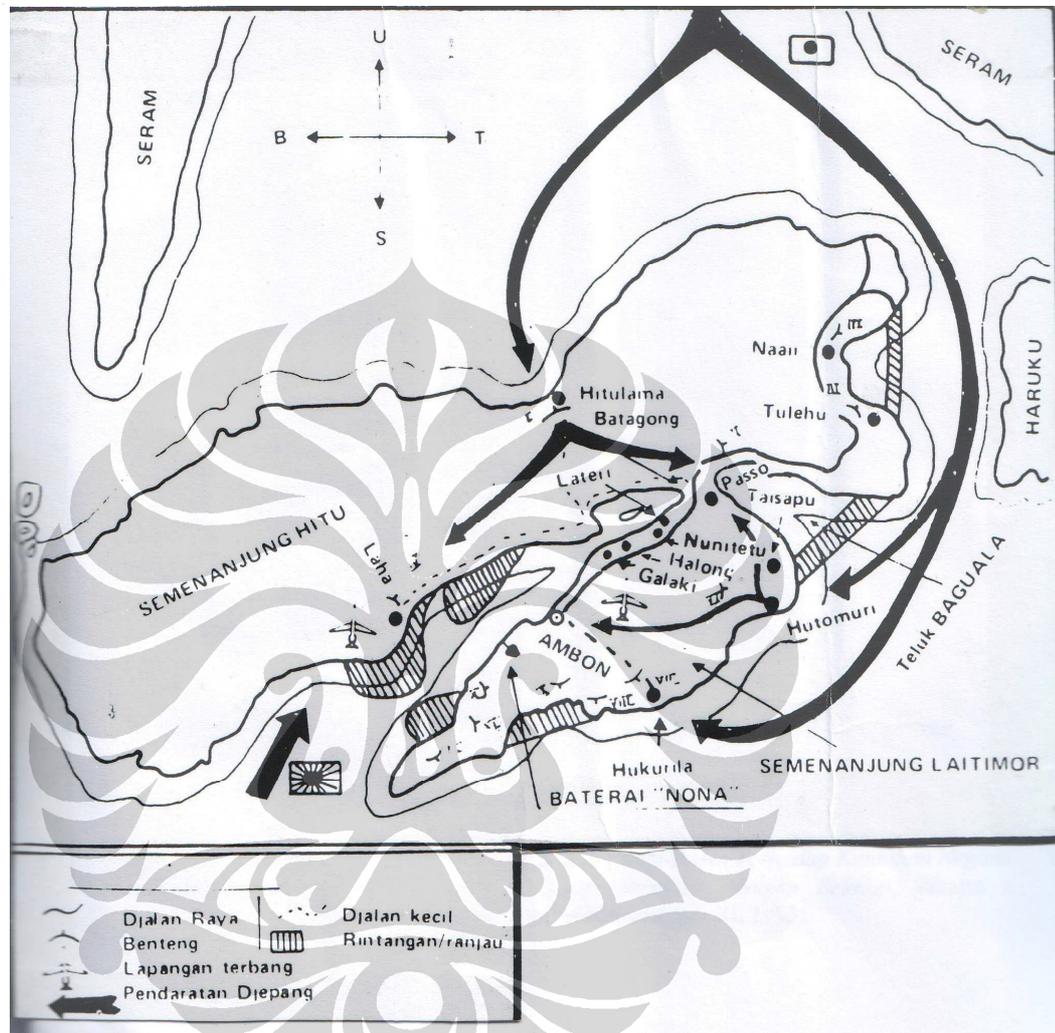
Lampiran 2

PETA AMBON



Lampiran 3

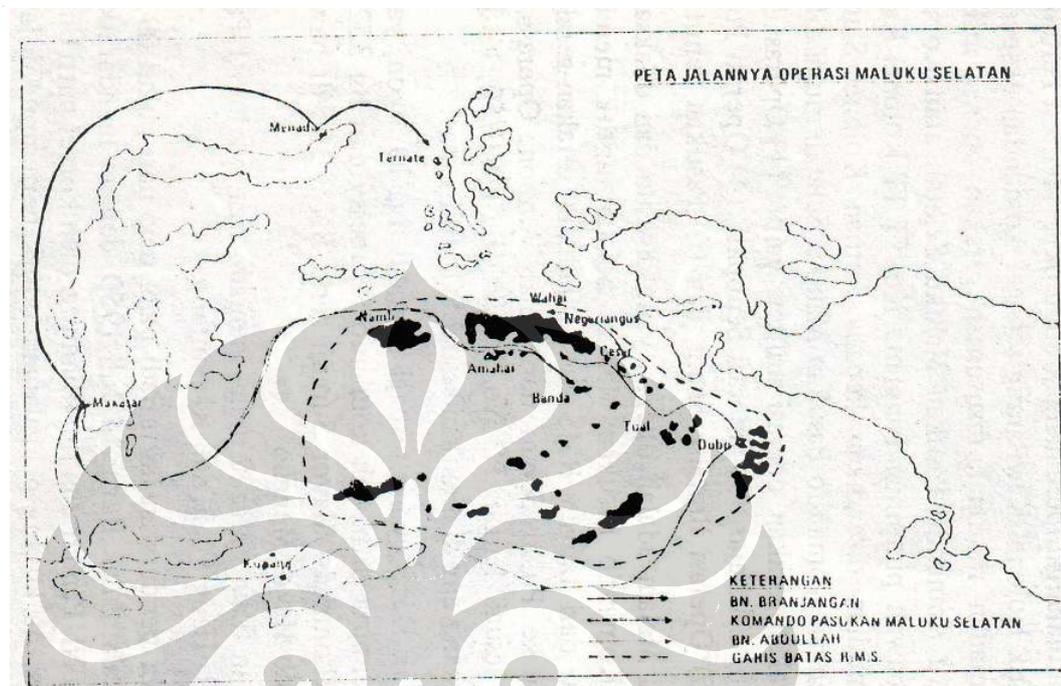
Peta Pendaratan Tentara Jepang di Pulau Ambon



Sumber : A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I : Proklamasi*, Bandung : Angkasa Offset, 1977.

Lampiran 4

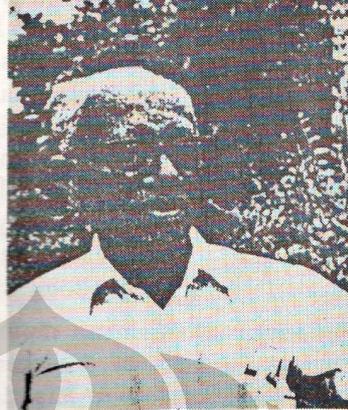
Peta Jalannya Operasi Penumpasan RMS



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Lampiran 5

Tokoh Nasionalis Ambon



*E U Pupella pimpinan
PIM Maluku*

Salah satu tokoh yang memiliki peranan yang cukup besar dalam perjuangan kaum nasionalis Ambon.



*Alexander Jacob Patty
pimpinan Sarekat Ambon*

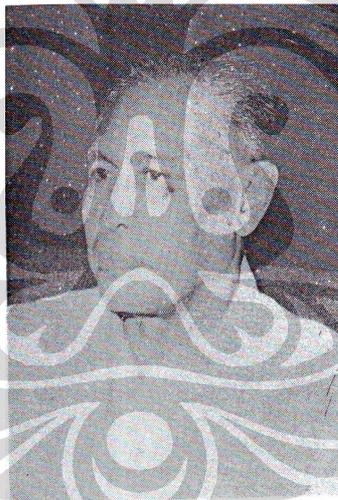
Pendiri Sarekat Ambon dan pelopor gerakan kebangsaan di kalangan orang-orang Ambon

Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Maluku Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Mr. J. Latuharhary
Ketua Umum Sarekat Ambon
Gubernur Maluku yang pertama



Tokoh nasionalis Ambon yang merupakan anggota PPKI dan terpilih sebagai Gubernur Maluku pertama serta salah satu delegasi Indonesia dalam KMB

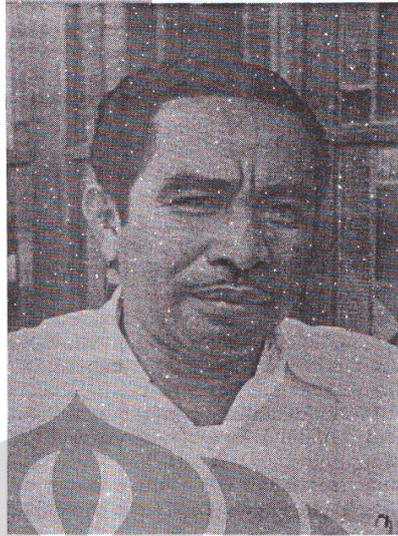


Dr. J. Leimena
Tidak pernah absen dalam tugas nasional
(Photo : Ipphos)

Tokoh nasionalis Ambon yang berjuang di Pulau Jawa. Ia juga dikirim untuk menyelesaikan kasus Republik Maluku Selatan dan juga salah satu delegasi Indonesia dalam KMB

Sumber : R.Z Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional*, Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra, UI, 1975.

Muhammad Padang



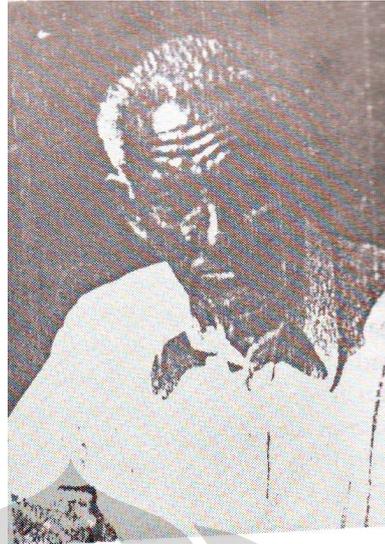
Wakil dari Ambon dalam Parlemen Republik Indonesia Serikat

Ir. Putuhena



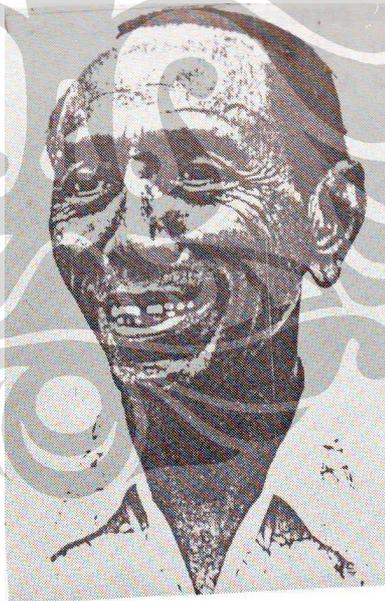
Tokoh nasionalis Ambon yang juga terpilih sebagai kabinet terakhir di Negara Indonesia Timur

Sumber : R.Z Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta : Lembaga Sejarah Fakultas Sastra, UI, 197



J H Manuhutu

Kepala Daerah Maluku Selatan yang merupakan salah satu kaum nasionalis Ambon yan dipaksa golongan separatis untuk membacakan proklamasi RMS



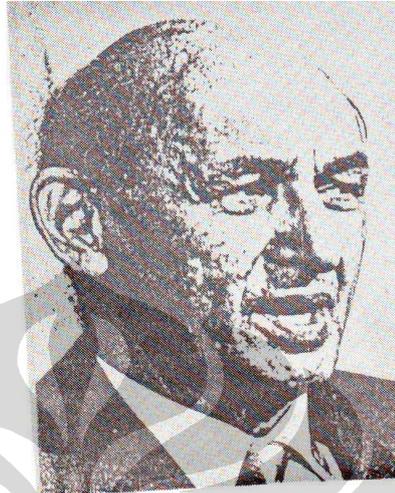
A- Wairisal

Wakil Dewan Maluku Selatan yang juga dipaksa oleh golongan separatis Ambon untuk mendampingi J.H Manuhutu memproklamasikan RMS

Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

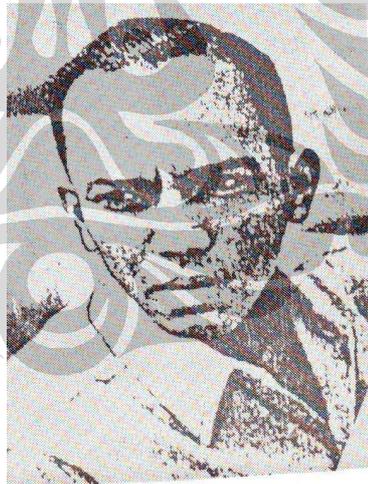
Lampiran 6

Tokoh Republik Maluku Selatan



Ir. J. A. Manusama

Salah satu tokoh pencetus berdirinya Republik Maluku Selatan



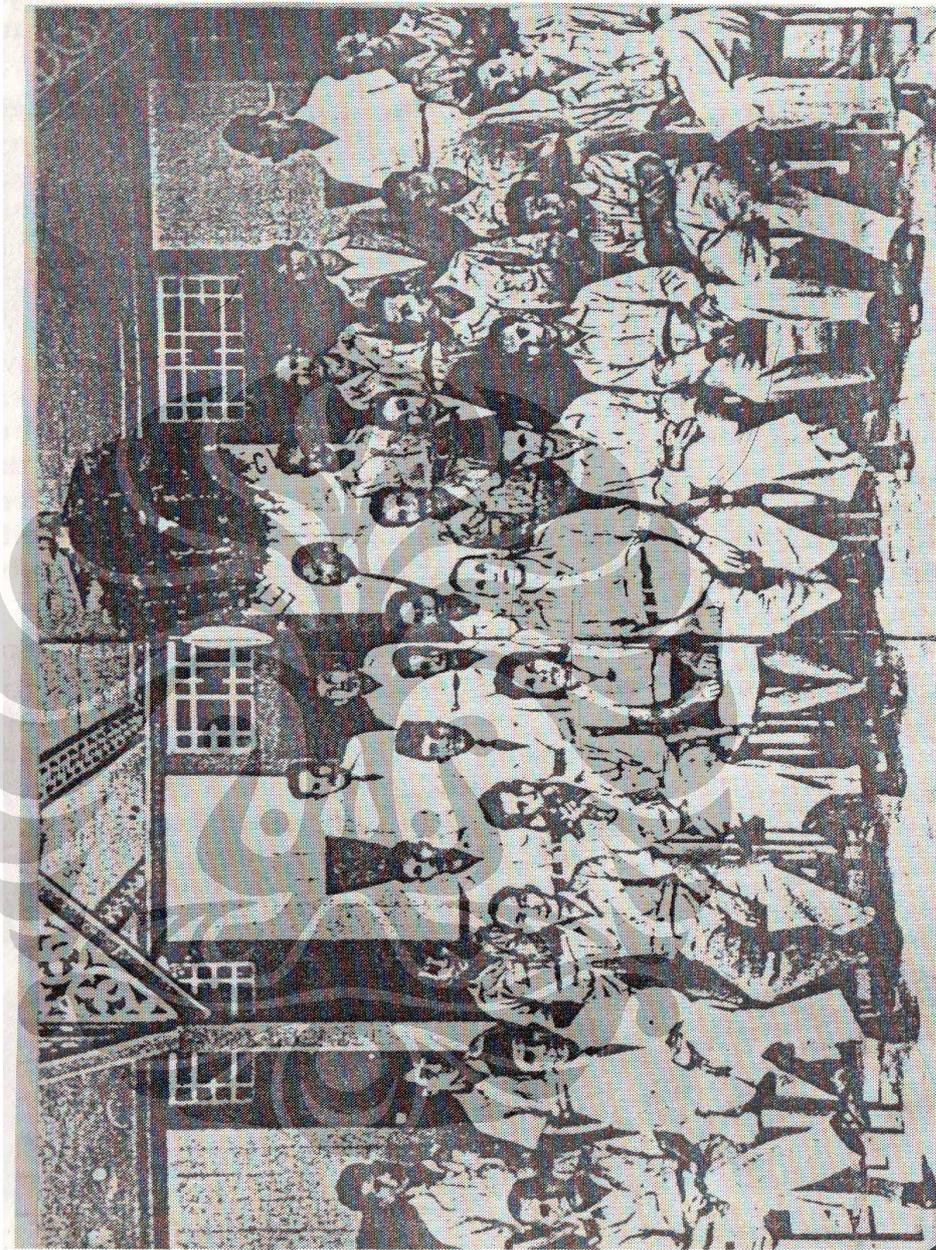
Mr. Dr. Chr Soumokil

Bersama dengan Ir. J. A. Manusama mendirikan Republik Maluku Selatan

Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 7

Anggota Partai Indonesia Merdeka Ambon



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 8

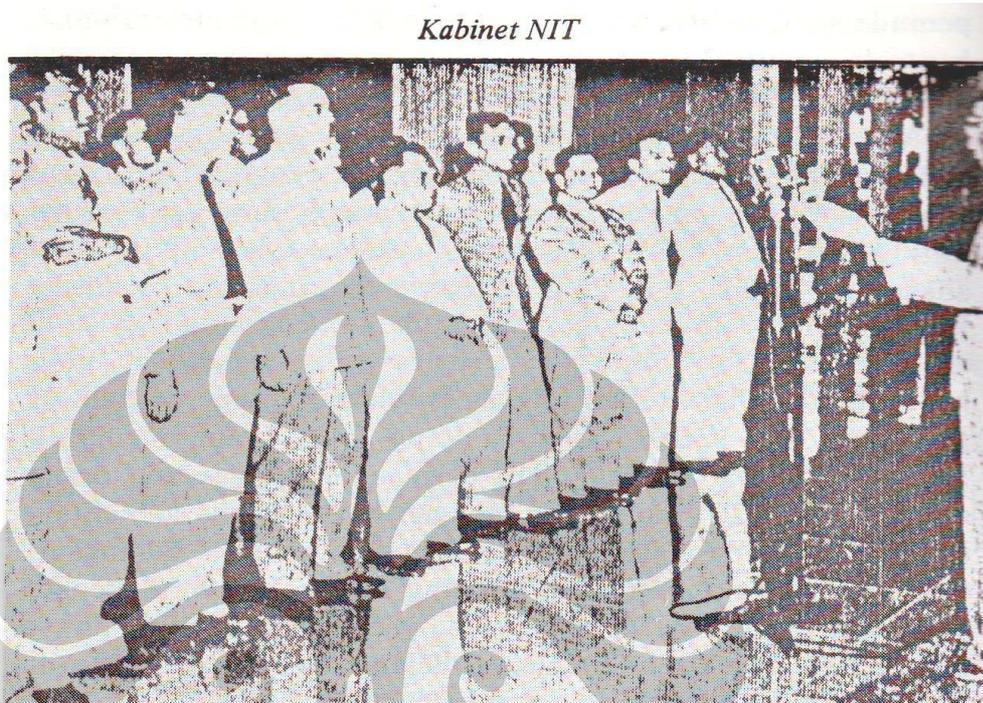
Anggota Dewan Maluku Selatan



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 9

Peresmian Kabinet Negara Indonesia Timur



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 10

Konferensi Meja Bundar



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 11

Upacara Bendera Republik Maluku Selatan



Upacara Bendera "RMS"

Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 12

Kedatangan Pasukan APRIS ke Ambon



APRIS memasuki kota Ambon

Pendaratan APRIS



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Negara dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993

Lampiran 13

Tentara KNIL Ambon



Sumber : G.A Ohorella, *et.al.*, *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan RI : Kasus Republik Maluku Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993.

Lampiran 14

**NAMA-NAMA ANGGOTA
DEWAN MALOEKOE SELATAN**

Ambon Kota

Dr. D. P. Tahitoe	Dokter	Ambon
E. U. Pupella	Onderwijzer	Ambon

Onder Afdeeling Ambon

D. J. Gaspers	H. p. b.	Ambon
S. Tjokro	Onderwijzer	Ambon
M. K. Soulisa	Best. Assistant	Ambon
A. Pelu	Best. Assistant	Ambon
W. Reawaru	Partiklir	Ambon

Ond. Afd. Saparoea

W. Lokollo	Onderwijzer	Saparoea
A. Wairisal	Schoolopziener	Saparoea
A. B. Latukonsina	Regent Pelauw	Saparoea
Dr. W. Poetiray	Dokter	Ambon
Dr. P. Siregar	Dokter	Ambon

Ond. Afd. Ceram-Barat

J. J. Z. Pirsow	Best. Assistant	Kairatoe (Piroe)
J. Kakerissa	Onderwijzer	Saparoea
A. Latukaisupy	Regent Iha	Piroe

Ceram-Oetara

J. Toule Solehuwy	Partiklir	Ambon
-------------------	-----------	-------

Ceram-Selatan

C. Pieter	Onderwijzer	Amahai
-----------	-------------	--------

Ceram-Timoer

S. Kelilouw	Regent	Ondor
Moh. Taha Kuwai-roemeratoe	Regent	Kilmoeri

Boeroe

W. A. F. Gaspersz	H. p. b.	Namlea
-------------------	----------	--------

Banda

Mochsen Helwaken	Partiklir	Neira
------------------	-----------	-------

Toeal

Setitik	H. p. b.	Saumlakki
Koedoeboen	Mantri Landbouw	Toeal

V. Rahail	Hulp Best. Assistant	Elat
-----------	----------------------	------

Dobo		
Ch. Barends	le. Klerk b/d Landgerecht	Ambon
Saumlakki		
E. Jaflaum	Regent Ridoel	Saumlakki
Kisar		
J. S. H. Norimarna	Commies BB.	Ambon
S. Terupun	Brigadier bij/de Nefis	Ambon

ANGGOTA YANG DITETAPKAN (DIBENOEMD)

Abdulgani Renuat	Hendelaar	Dobo
Ir. J. F. Graadt van Roggen	Hoofd Pl. Opbouwdienst	Ambon
J. Huwae	Gepensioneerd Sergeant	Ambon
T. D. Lim	Kapt. der Chineezen	Ambon
S. A. Bahasoan	Kapt. der Arabieren	Ambon
M. A. Fellaupessy	Handelsconsulent	Ambon

Sumber : *Surat Kabar Soeloeh Ambon*, 20 November 1946.

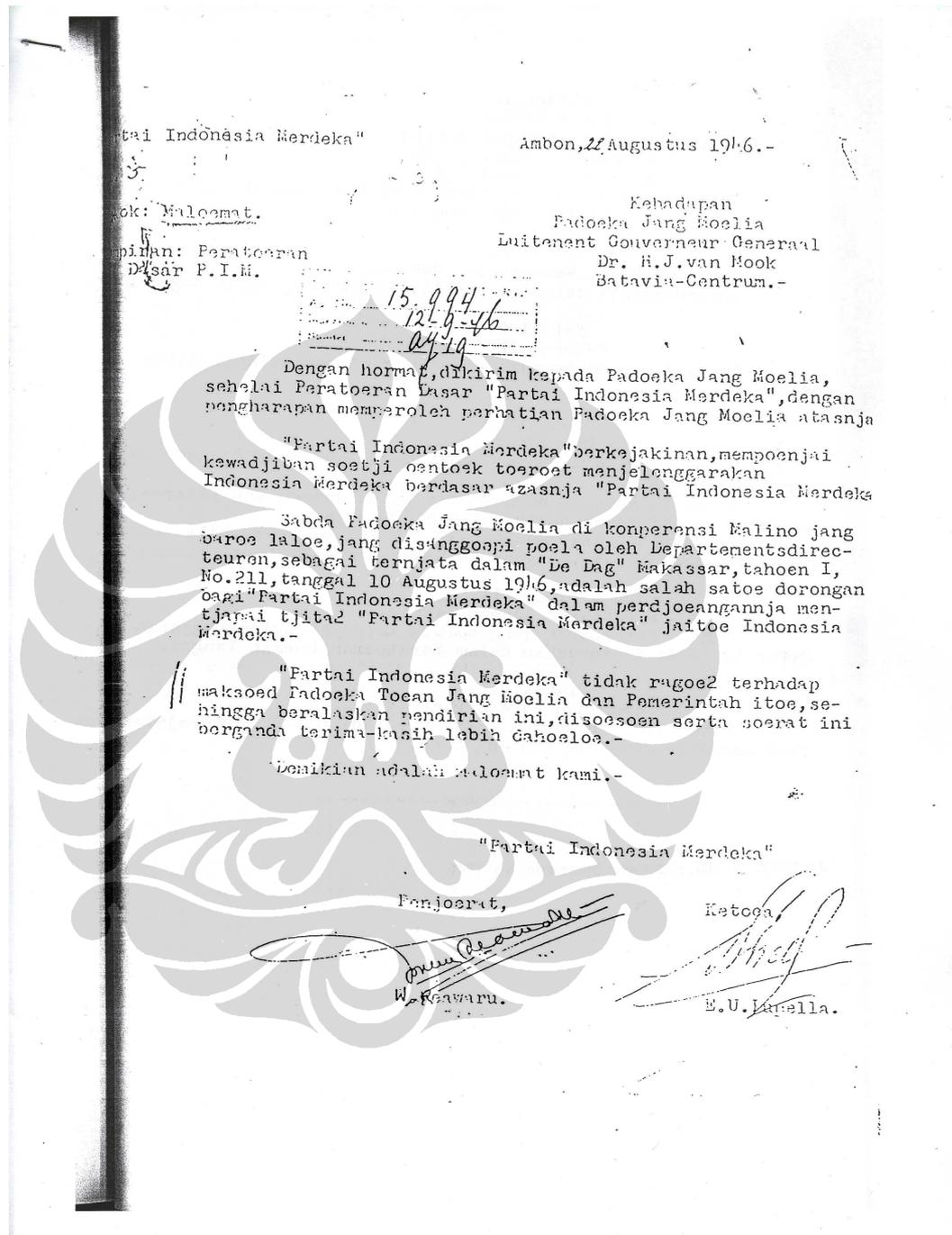
Lampiran 15

Susunan Kabinet RMS

Presiden	: J. H Manuhuttu
Perdana Menteri	: A. Wairissal
Menteri Luar Negeri	: Mr. DR. Chr. Soumokil
Menteri Dalam Negeri	: D.J Gaspersz
Menteri Kehakiman	: J. Taule
Menteri Keuangan	: J.B Pattiradjawane
Menteri Perekonomian	: S.J.H Narimarua
Menteri Pekerjaan Umum	: H.F Pieter
Menteri Perbekalan	: P.W Lokollo
Menteri Pertahanan	: A. Nanlohy
Menteri Pendidikan	: Ir. J.A Manusama
Menteri Kesehatan	: dr. th. Pattiradjawane
Menteri Penerangan	: Ir. Pesuarissa

Sumber : I.O Nanulaitta, *Johannes Latuharhary, SH : Hasil Karya dan Pengabdiannya*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983.

Lampiran 16



fatsal 7.

Harta Benda.

Kemasilan Partai terdapat dari:

1. Ioran anggota.
2. Orang Rangkal.
3. Hadiah jang tidak mengikat perdjuangan Partai.
4. Lain2 oesaja jang sah.

fatsal 8.

Kapat Oemoem Besar Oemoem

Sekoerang2nja setahun sekali, Partai mengadakan Kapat Besa

fatsal 9.

Kekoeasaan.

Kapat Besar memoenjai hak jang setinggi-tinggi dalam Partai.-

fatsal 10.

Hak Soeara.

1. Tiap2 Tjabang memoenjai hak bersoeara, jang diatoer seperti berikoet:

Tiap2 25 anggota berhak atas satoe soeara dan seteroesnja, akan tetapi tidak boleh malibihi 20 soeara.

2. Fengers Besar memoenjai hak satoe soeara. Bila soeara poeoesan sama banjak, Fengers Besar berhak memoetoeskannja.

fatsal 11.

Peratoeran Roemah Tangga.

Segala peratperan jang beloem terdapat dalam Anggaran Dasar ini, akan dipeneuhkan dalam Peratoeran Roemah Tangga.

fatsal 12.

Perobahan Peratoeran Dasar.

Perobahan Peratoeran Dasar terdjadi dalam Fermoesjawaratan jang sngadja diadakan oentoek itoe.-

-----ooOoo-----

SUMBER ; ANRI, Algemene Secretarie. No. 1346